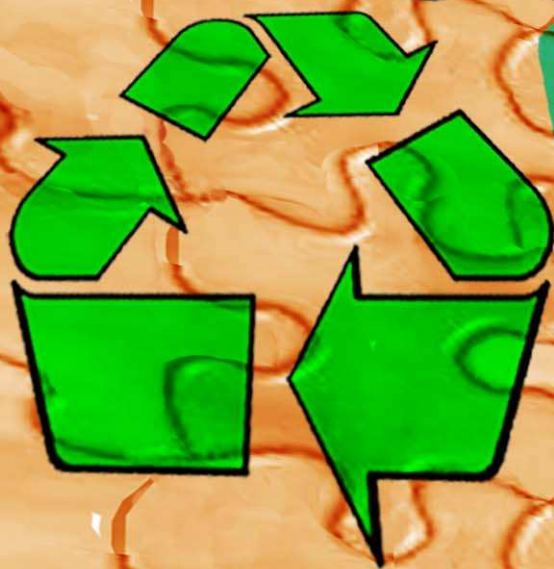


ULLY SIGAR MEMBUAT KONSERVASI AIR

Agustus 2008

# Percik

Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan



**JEJARING**

**AMPL**

ISSN 1829-5967



**Diterbitkan oleh:**

Kelompok Kerja Air Minum  
dan Penyehatan Lingkungan  
(Pokja AMPL)

**Penasihat/Pelindung:**

Direktur Jenderal Cipta Karya  
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

**Penanggung Jawab:**

Direktur Permukiman dan Perumahan,  
BAPPENAS  
Direktur Penyehatan Lingkungan,  
DEPKES  
Direktur Pengembangan Air Minum,  
Dep. Pekerjaan Umum  
Direktur Pengembangan Penyehatan  
Lingkungan Permukiman,  
Dep. Pekerjaan Umum  
Direktur Bina Sumber Daya Alam dan  
Teknologi Tepat Guna, DEPDAAGRI  
Direktur Penataan Ruang dan  
Lingkungan Hidup, DEPDAAGRI

**Pemimpin Redaksi:**

Oswar Mungkasa

**Dewan Redaksi:**

Zaenal Nampira,  
Indar Parawansa,  
Bambang Purwanto

**Redaktur Pelaksana:**

Maraita Listyasari, Rheidda Pramudhy,  
Raymond Marpaung, Bowo Leksono

**Desain/Illustrasi:**

Rudi Kosasih

**Produksi:**

Machrudin

**Sirkulasi/Distribusi:**

Agus Syuhada

**Alamat Redaksi:**

Jl. Cianjur No. 4 Menteng, Jakarta Pusat.  
Telp./Faks.: (021) 31904113  
<http://www.ampl.or.id>  
e-mail: [redaksipercik@yahoo.com](mailto:redaksipercik@yahoo.com)  
[redaksi@ampl.or.id](mailto:redaksi@ampl.or.id)  
[oswar@bappenas.go.id](mailto:oswar@bappenas.go.id)

Redaksi menerima kiriman  
tulisan/artikel dari luar. Isi berkaitan  
dengan air minum dan penyehatan lingkungan  
dan belum pernah dipublikasikan.  
Panjang naskah tak dibatasi.  
Sertakan identitas diri.  
Redaksi berhak mengeditnya.  
Silahkan kirim ke alamat di atas.

Cover: Rudi Kosasih

Ide: OM

# Daftar isi

<b>Dari Redaksi</b>	1
<b>Suara Anda</b>	2
<b>Laporan Utama</b>	
Menegal Beragam Jejaring	3
Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	5
<b>TSI</b>	
Seputar Tahun Sanitasi Internasional	9
<b>Wawancara</b>	
Berjejaring Membangun AMPL	11
<b>Peraturan</b>	
UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah	14
<b>Wawasan</b>	
Teknologi Pengolahan Sampah di PLTSa Gede Bage Bandung	16
Unsur Besi (Fe) dan Mangan (Mn) Air Bawah Tanah	18
Lima Tahun Mendatang Desa Tetap Menjadi Desa Makmur	20
Menegal Pembelajaran Partisipatif Singkat (PPS)	22
<b>Inovasi</b>	
Ecoplas, Tas Ramah Lingkungan dari Singkong	25
<b>Tamu Kita</b>	
Ully Sigar Rusady Membuat Konservasi Air	26
<b>Reportase</b>	
Kunjungan Delegasi Republik Demokratik Timor Leste	28
<b>Inspirasi</b>	
Kota yang Tak Berkelanjutan	30
<b>Cermin</b>	
Toilet Kering untuk Permukiman Padat dan Wilayah Kurang Air	31
<b>Seputar ISSDP</b>	32
<b>Seputar WASPOLA</b>	34
<b>Seputar WES-UNICEF</b>	36
<b>Seputar STBM</b>	38
<b>Seputar Jejaring</b>	39
<b>Seputar AMPL</b>	40
<b>Program</b>	
SToP! (Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi)	47
<b>Klinik IATPI</b>	48
<b>Info CD</b>	49
<b>Info Buku</b>	50
<b>Info Situs</b>	51
<b>Pustaka AMPL</b>	52
<b>Agenda</b>	

Setiap tahun kita memperingati beragam jenis tema peringatan yang terkait dengan air minum dan penyehatan lingkungan mulai dari Hari Air Dunia, Hari Toilet, Hari Lingkungan Hidup, Hari Bumi dan banyak hari-hari lainnya. Belum terhitung setiap tahun kita juga memperingati beragam tema dan kebetulan tahun ini temanya terkait air minum dan penyehatan lingkungan yaitu Tahun Sanitasi Internasional.

Kegiatan peringatan ini kemudian menjadi paradoks. Ide awal setiap peringatan tersebut tentunya untuk mengingatkan kita semua tentang banyak hal penting yang mungkin terlupa akibat kesibukan kita sehari-hari. Namun kemudian peringatan yang dilakukan setahun sekali tersebut kemudian juga tergelincir menjadi bagian dari rutinitas kita. Gaungnya sebatas bagaimana memperingati dan bukannya bagaimana memulai sesuatu agar peringatan tersebut menjadi bermakna. Kita sibuk dengan bagaimana menyiapkan pameran, bagaimana menyiapkan pencanangan oleh presiden atau menteri, dan banyak bagaimana lainnya.

Hal ini kemudian tercermin dari kondisi cakupan layanan air minum dan penyehatan lingkungan Indonesia yang masih belum beranjak jauh dari angka 50 persen untuk air minum, dan 65 persen untuk sanitasi dasar. Masih sekitar 70-100 juta penduduk Indonesia belum terlayani dengan air minum dan sanitasi yang layak. Padahal kita telah memperingati Hari Air Dunia untuk kesekian kalinya. Telah banyak pencanangan dan janji yang diucapkan pada setiap kali Hari Air diperingati.

Peringatan tersebut menjadi suatu rutinitas saja. Diperlukan suatu perubahan sikap agar kita semua baik pemerintah, non-pemerintah, masyarakat, bersama-sama menjadikan setiap tema peringatan tersebut awal dari langkah-langkah nyata bersama.

Gaung dari setiap peringatan tersebut sebenarnya cukup terlihat. Namun kemudian setiap pemangku kepentingan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri untuk memperingatinya dan

kemudian menindaklanjutinya pun secara sendiri-sendiri. Kondisi ini yang dalam beberapa tahun terakhir mulai mengkhawatirkan. Pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan hasilnya menjadi kurang optimal. Cakupan layanan seperti jalan di tempat sementara investasi yang dikucurkan oleh banyak pihak sudah sedemikian banyak.

Dibutuhkan kerja bersama diantara pemangku kepentingan. Tema ini yang kemudian menjadi topik utama **Percik** kali ini. Bagaimana semua pihak bekerjasama dalam pembangunan AMPL. Pada saat ini di Indonesia telah terbentuk Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Jejaring AMPL), yang merupakan wadah untuk mensinergikan potensi informasi, pengetahuan dan komunikasi antarpemangku kepentingan dalam kerjasama yang memberi manfaat kepada semua pihak dalam pembangunan AMPL. Tentunya kita semua berharap tujuan ini dapat tercapai. Untuk itu, kisah perjalanan pembentukan Jejaring AMPL, wawancara dengan pemrakarsa, dan kiprah Jejaring AMPL selama ini menjadi sorotan kali ini. Dilengkapi pula dengan contoh jejaring di mancanegara.

Selain itu, juga diketengahkan beberapa contoh nyata kegiatan dari pelaku pembangunan AMPL seperti Uly Sigar Rusadi dengan komitmennya melakukan konservasi alam, Neni Sintawardani dengan inovasinya berupa toilet kering, dan inovasi terbaru berupa tas plastik dari daun

singkong keluaran Dana Mitra Lingkungan.

Bahasan menarik lainnya adalah tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini merupakan upaya pemerintah memberikan jaminan kehidupan yang baik dan sehat bagi masyarakat Indonesia. Peringatan Hari Lingkungan dan Hari Bumi juga mendapat porsi. Tentunya dengan harapan kita semua dapat menjadikannya sebagai sumber inspirasi. Sebagaimana kata orang bijak "Menjaga bumi tetap nyaman adalah sebaik-baik warisan untuk anak cucu kita". ■ OM.



Foto: Bowo Leksono

## Menambah Wawasan

Saat meliput kegiatan Pokja AMPL di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, saya mendapat hadiah tiga edisi *Percik* dan beberapa brosur disertai janji 'akan mengirim edisi berikut'. Majalah tersebut telah menambah wawasan kami mengenal lebih jauh kegiatan Pokja AMPL. Majalah bersama brosur tersebut setelah saya baca, saya serahkan sebagai koleksi kepada Taman Bacaan Iqra, sebuah taman bacaan masyarakat yang kami bina bersama beberapa rekan di Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Semoga bacaan tersebut dapat memberi manfaat lebih jauh kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi dan penyehatan lingkungan.

Seterusnya, saya berharap taman bacaan kami dapat memperoleh *Percik* tiap terbit. Demikian pula bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan AMPL untuk menambah koleksi. Demikian informasi kami, atas bantuan Bapak sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

**Badaruddin Amir**  
Wartawan majalah Dunia Pendidikan  
Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel  
Pembina Taman Bacaan Iqra  
Jl. Pramuka No. 108 Barru,  
Provinsi Sulawesi Selatan 90711  
Telp 0427-322752, mobile : 081342138499  
email : tamanbacaaniqra@yahoo.co.id  
badarsaja@yahoo.co.id

*Yth. Bp Badaruddin,*  
kami akan berusaha mengirim materi-materi terkait AMPL ke alamat yang Bapak cantumkan. Terima kasih.

## Susah Memperoleh Info Lingkungan

Dengan hormat,  
Saya alumni teknik lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna Jakarta. Saya telah membaca majalah *Percik* dari teman edisi November 2007. Ternyata majalah *Percik* sangat baik untuk mendapatkan informasi mengenai lingkungan, sanitasi dan lain-lain. Di daerah saya yaitu Sumbawa Besar sangat susah sekali mendapatkan informasi ten-

tang lingkungan. Saya sangat berminat mendapatkan majalah *Percik*. Dengan ini saya mencantumkan alamat lengkap:

Jl. Gurami No 63a, RT 11 RW 04,  
Kelurahan Seketeng Sumbawa Besar  
(NTB) 84311

Besar harapan saya untuk mendapatkan majalah *Percik*. Atas perhatian bapak saya ucapkan banyak terimakasih.

**Mukhlis, ST**  
Sumbawa Besar - NTB

*Yth Bp Mukhlis,*  
segera kami tindaklanjuti untuk pengiriman majalah *Percik*.

## SD yang Menerapkan Sekolah Hijau

Saya tertarik membaca artikel *Percik* edisi tahun 2007 mengenai sekolah hijau. Dan yang jadi pertanyaan, adakah sekolah yang tingkatannya sekolah dasar yang sudah mengadopsi sistem sekolah hijau?

Kebetulan saya bagian dari organisasi mahasiswa Kalimantan Barat yang memiliki program pengembangan pendidikan tingkat dasar untuk daerah pedalaman khususnya Kalimantan yang berbasis lingkungan. Isu global mengenai lingkungan yang dibahas di *Percik* cukup



ILustrasi: Rudi Kosasih

up to date sehingga kami pandang perlu untuk mengakses majalah tersebut.

**Untung Junendar**  
Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat Surakarta  
Jl. Anggur 1 No. 15 Kerten Surakarta 57147

*Yth. Bp Untung Junendar,*  
SD di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, DKI Jakarta sudah menerapkan sekolah hijau pada mata pelajaran muatan lokal (mulok).

## Percik Edisi Lama

Kami dari NGO Perancis bekerjasama dengan Departemen Kesehatan, tertarik untuk mendapatkan edisi-edisi lama majalah *Percik*, atau bahkan berlangganan, karena banyaknya data dan bahasan terkait bidang kesehatan yang kami geluti (WASH, gizi, dll). Mohon infonya. Bila perlu saya bisa datang kekantor. Terimakasih.

*Cheers*

**Rayendra**  
Assistant Head of Mission ACF Indonesia  
Office 6221 7220775  
Mobile 0816 903793

*Yth. Bp Rayendra,*  
akan lebih baik bila Bapak datang langsung ke kantor redaksi kami untuk mendapatkan sendiri edisi-edisi *Percik* sebelumnya.

## Majalah Percik untuk Perpustakaan

*Yth. Redaksi Majalah Percik*  
Nama saya Darman Eka Saputra, guru SD N Sukaesmi Kampung Talaga RT 02/04 Desa Cigunungherang Cikalongkulon Cianjur. Saya mohon Majalah *Percik* dikirim kepada kami untuk menambah perpustakaan SD.

**Darman Eka Saputra**  
SDN Sukaesmi Kampung talaga  
Cianjur

*Yth Bp Darman,*  
akan kami kirimkan Majalah *Percik* sesuai dengan permohonan. Semoga bermanfaat. ■

# Mengenal BERAGAM JEJARING

## **PHILIPPINE ECOLOGICAL SANITATION NETWORK (PEN)**

### **Apa itu PEN?**

PEN merupakan sebuah jejaring informal yang teroganisir terdiri dari instansi pemerintah pusat, legislatif, pemerintah daerah, lembaga donor, program/proyek, perguruan tinggi dan LSM.

### **Sejarah Pembentukan**

Pada tahun 2004 diselenggarakan *The 1st International Symposium on Low-cost Technology Options for Water Supply and Sanitation* di Bohol, Pilipina, yang dalam penyiapannya mendorong terjadinya kerjasama diantara pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, LSM, swasta, dan akademisi.

*Ecosan* dipresentasikan pada simposium tersebut. Sebuah Kelompok Kerja dibentuk untuk mempersiapkan draf awal rencana aksi pengelolaan aktifitas terkait pertukaran pengetahuan, proyek percontohan *ecosan*, dan pembentukan PEN.

### **Kiprah Awal**

Kiprah PEN diawali ketika *Clean Water Act of 2004 Implementing Rules and Regulations* sedang disusun. Ketika itu, dibutuhkan masukan tentang pilihan sanitasi selain sanitasi konvensional yaitu sanitasi ekologis (*ecological sanitation/ecosan*). Selain itu, PEN juga berperan sebagai motor penggerak penyelenggaraan *Philippine Sanitation Summit 2007* di Manila. Selanjutnya PEN juga membantu Departemen Kesehatan menyelenggarakan *Southern Philippine Sanitation Summit 2007*.

### **Bentuk Organisasi**

Pada tahap awal PEN masih berbentuk informal dan merupakan organisasi advokasi yang tidak ketat, tetapi setelah dua tahun dengan pertimbangan meningkatkan efektifitas kemudian diputuskan untuk memformalkan dan mencatatkannya pada pihak berwenang sebagai organisasi nirlaba. Diharapkan mobilisasi sumber daya menjadi lebih optimal.

Untuk itu, disepakati menunjuk beberapa orang sebagai pelaksana harian yang menjabat sebagai presiden, wakil presiden, sekretaris, bendahara, dan dilengkapi badan pengawas.

### **Anggota**

Secara resmi organisasi yang menjadi anggota adalah legislatif (*House of Representatives Committee on Ecology*), lembaga pemerintah (*National Water Resources Board/NWRB*), (Departemen Kesehatan), pusat studi (*Center for Advanced Philippine Studies/CAPS, Institute for the Development of Educational and Ecological Alternatives/IDEAS*), perguruan

tinggi (*UP-National Engineering Center, College of Chemical Engineering/Environmental Engineering Program*), lembaga donor (*German Technical Assistance/GTZ, Water and Sanitation Program-East Asia Pacific/WSP-EAP*), LSM (*BNS-Borda*), asosiasi (*Solid Waste Management Association of the Philippines/SWAPP*), perusahaan (*Manila Water Sewerage System/MWSS*), proyek (*LWUA, ECO-ASIA-Linaw Projects, Waste Water Projects, Sustainable Coastal Tourism/SCOTIA*).

### **Peran Saat Ini**

Peluncuran TSI 2008 di Pilipina dimotori oleh PEN. Selain itu, PEN juga berperan dalam mengembangkan Program *Sustainable Sanitation for East Asia (SuSEA)*-Komponen Pilipina Tahun 2007-2010. SuSEA merupakan proyek yang didanai oleh SIDA dengan tujuan mempercepat pencapaian target air dan sanitasi MDGs di Indonesia dan Pilipina.

## **UGANDA WATER AND SANITATION NETWORK (UWASNET)**

UWASNET merupakan organisasi payung nasional dari LSM dan organisasi berbasis masyarakat di sektor air minum dan sanitasi Uganda. Didirikan pada Februari 2000 dengan dukungan *the Directorate of Water Development (DWD)*, Danida, *Water Aid* dan sebuah kelompok kerja gabungan 11 LSM, untuk memanfaatkan potensi keberadaan LSM dan lembaga berbasis masyarakat dalam berkontribusi mencapai target MDGs.

### **Motto**

Bekerja menuju tercapainya akses air minum dan sanitasi bagi semua di Uganda melalui koordinasi efektif, kolaborasi yang lebih baik, dan kemitraan strategik.

### **Misi**

Uwasnet bertujuan memperkuat koordinasi, kolaborasi dan jaringan LSM dan organisasi berbasis masyarakat dengan pemangku kepentingan lainnya di sektor air minum dan sanitasi Uganda.

### **Visi**

Berkontribusi mengurangi kemiskinan melalui peningkatan akses air minum dan sanitasi melalui koordinasi efektif dari LSM dan organisasi berbasis masyarakat dalam sektor air minum dan sanitasi ganda.

### **Kelompok Kerja**

UWASNET melingkupi 4 Kelompok Kerja (Pokja) yaitu (i) Pokja Higinitas dan Sanitasi/*Hygiene and Sanitation Working Group (HSWG)*. Tujuannya adalah mendorong terciptanya dia-

log diantara pemangku kepentingan demi terciptanya peningkatan kepedulian terhadap higienitas dan sanitasi; (ii) Pokja Teknologi Air Minum dan Sanitasi/*Water and Sanitation Technologies Working Group* (WSTWG). Tujuannya adalah menjadi media bertukar ide dan pengalaman tentang teknologi yang tepat guna; (iii) Pokja Air Minum dan Sanitasi Perkotaan/*Urban Water and Sanitation Working Group* (UWSWG). Tujuan utamanya adalah mendorong timbulnya perhatian terhadap penyediaan air minum dan sanitasi bagi penduduk miskin perkotaan; dan (iv) *Water and Sanitation for Women and Children Working Group* (WSWCWG). Tujuannya adalah untuk mendorong timbulnya perhatian terhadap kepentingan wanita dan anak-anak dalam pembangunan air minum dan sanitasi.

### Program dan Proyek

Untuk memaksimalkan hasil kerja LSM Air Minum dan Sanitasi, UWASNET mengembangkan dua program inti yaitu:

#### 1. Program Koordinasi, Informasi dan Jaringan

Program ini ditujukan untuk mempercepat terjadinya koordinasi, kolaborasi, dan jaringan efektif diantara LSM air minum dan sanitasi dengan pemangku kepentingan lain. Diharapkan anggota UWASNET dapat mempengaruhi dan menanggapi kebijakan, strategi dan implementasi melalui jaringan dan pertukaran informasi.

Sasaran program diantaranya adalah (i) memungkinkan anggota bertukar ide dan pengalaman dengan pemangku kepentingan lain terkait kebijakan, strategi, dan implementasi; (ii) menyediakan *focal point* informasi tentang UWASNET maupun isu terkait air minum dan sanitasi; (iii) menjamin keberlanjutan UWASNET.

Kegiatan terkait program ini adalah (i) keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, (ii) kontribusi penulisan artikel di media massa; (iii) mengelola pusat data dan informasi; (iv) menyediakan jasa konsultasi bagi anggota; (v) menerbitkan *newsletter* berkala.

#### 2. Program Peningkatan Kapasitas

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas LSM sehingga akan terbangun jaringan LSM yang mandiri, dinamis, dan efektif, yang akan menjadi mitra kerja pemerintah. Dengan demikian diharapkan LSM dapat berperan aktif dalam turut mencapai target MDGs, mempunyai kemampuan menanggapi kebijakan pemerintah, dan mampu melaksanakan kegiatan air minum dan sanitasi yang inovatif.

## THE SUSTAINABLE SANITATION ALLIANCE (SUSANA)

### Dasar Pembentukan

Motivasi utama pembentukan SuSanA adalah keputusan Sidang Umum PBB untuk mendeklarasikan Tahun 2008 sebagai Tahun Sanitasi Internasional, yang kemudian ditindaklanjuti pada tahun 2007 oleh berbagai organisasi yang berkecimpung dalam pembangunan sanitasi untuk membentuk jejaring sanitasi berkelanjutan yang terbuka untuk mendukung TSI 2008.

### Tujuan SuSanA

- Berkontribusi terhadap pencapaian MDGs melalui promosi sanitasi berkelanjutan.
- Meningkatkan kepedulian terhadap solusi sanitasi berkelanjutan dan mempromosikan dalam skala besar.
- Menunjukkan peran penting sanitasi dalam pencapaian keseluruhan target MDGs.
- Merubah paradigma sanitasi melalui promosi pendekatan sanitasi berorientasi penggunaan kembali (*reuse oriented sanitation approaches*) tanpa membahayakan kesehatan.

### Fokus Utama

Fokus utama SuSanA adalah mempromosikan implementasi sanitasi berkelanjutan dalam program air dan sanitasi skala besar.

### Sasaran Khusus

- Mengumpulkan dan mengompilasi informasi, yang membantu pengambil keputusan untuk menilai beragam teknologi dan sistem sanitasi dengan memperhatikan kriteria keberlanjutan.
- Mendemonstrasikan sanitasi yang berorientasi penggunaan kembali.
- Mengumpulkan dan menampilkan contoh praktik terbaik sanitasi dalam rangka TSI 2008.
- Mengidentifikasi dan menggambarkan mekanisme untuk mereplikasi implementasi sanitasi berkelanjutan termasuk instrumen pembiayaan penyediaan sanitasi *pro-poor*.
- Mengembangkan visi bagaimana pendekatan berkelanjutan dapat berkontribusi dalam pencapaian MDGs.

Dalam rangka pencapaian sasaran khusus ini, *road map* bersama untuk TSI 2008 telah berhasil disusun.

### Bentuk Organisasi

SuSanA bukan organisasi baru, tetapi lebih merupakan jejaring organisasi yang tidak mengikat yang bekerja bersama dan bersifat terbuka dan aktif mempromosikan sanitasi berkelanjutan. SuSanA didukung oleh beberapa kelompok kerja tematik. ■ OM dari berbagai sumber.

### SEKILAS PRINSIP SANITASI BERKELANJUTAN

Beberapa tahun lalu prinsip sanitasi berkelanjutan telah disepakati oleh *Water Supply and Sanitation Collaborative Council* yang dikenal sebagai "*Bellagio Principles for Sustainable Sanitation*" pada Global Forum ke-5, November 2000, yaitu:

- (i) Harga diri manusia, kualitas hidup dan keamanan lingkungan tempat tinggal seharusnya menjadi dasar semua pendekatan sanitasi.
- (ii) Sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, pengambilan keputusan sebaiknya melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, khususnya konsumen dan penyedia layanan.
- (iii) Limbah sebaiknya dipertimbangkan sebagai sumber daya dan pengelolaannya sebaiknya terpadu dan bagian dari sumber daya air terpadu dan proses pengelolaan limbah.
- (iv) Penyelesaian masalah sanitasi lingkungan sebaiknya dilakukan pada ukuran minimum yang dapat dikelola (rumah tangga, lingkungan, kota, daerah tangkapan air). (sumber: WSSCC). ■

# JEJARING AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL)

Pembentukan Jejaring berangkat dari keprihatinan beberapa pihak yang menyadari bahwa isu air minum dan penyehatan lingkungan selama ini masih menjadi arus pinggirannya sehingga belum menjadi perhatian dan komitmen dari para pengambil keputusan ditingkat nasional maupun daerah.

Disisi lain, kebijakan pemerintah dalam pembangunan AMPL masih belum terpadu. Banyak program sering tumpang tindih, para pemangku kepentingan yang peduli terhadap AMPL masih berjalan sendiri-sendiri, sementara di tingkat masyarakat kesadaran terhadap perilaku hidup bersih dan sehat masih rendah.

Dibutuhkan koordinasi dan integrasi yang lebih strategis dari berbagai pihak pemangku kepentingan untuk saling berkoordinasi dan membangun kekuatan bersama yang lebih besar. Untuk itu dibutuhkan suatu jaringan yang dapat mengkomunikasikan kebutuhan dan kepentingan dari berbagai pihak sehingga setiap pihak mampu mempunyai wadah untuk dapat berkontribusi dan saling bersinergi untuk mempercepat pencapaian tujuan bersama dalam pembangunan AMPL.

Maka sejak pertemuan pertama Jejaring AMPL pada 27 Februari 2007 di Bappenas yang membuahkan kesepakatan untuk membangun Jejaring Komunikasi antarpemangku kepentingan di sektor ini, dilanjutkan pertemuan yang lebih intensif pada Juli dan Agustus 2007



Penandatanganan pembentukan Jejaring AMPL pada 8 Oktober 2007 di Jakarta. Foto: Bowo Leksono.

lalu, akhirnya menghasilkan draf konsep dan arahan strategis Jejaring AMPL ke depan. Konsep ini kemudian yang menjadi dasar dari pernyataan bersama anggota Jejaring yang disepakati pada 8 Oktober 2007 dan menjadi mandat untuk dilaksanakan oleh tim pengarah.

## Nama dan Pengertian Jejaring

Jejaring AMPL atau *Watsan Networking-INA* merupakan wadah untuk mensinergikan potensi informasi, pengetahuan dan komunikasi antarpemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kerjasama yang memberikan manfaat kepada semua pihak.

Adapun visi dari Jejaring AMPL adalah menjadikan jejaring sebagai wadah

informasi dan komunikasi AMPL yang efektif untuk mendukung partisipasi pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam proses pembangunan Nasional di Indonesia.

Sedangkan misinya mensinergikan program yang strategis dan implementatif melalui penerapan prinsip kemitraan, pengembangan kerjasama pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan, peningkatan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia, serta peningkatan penyediaan dana pembangunan AMPL.

## Keanggotaan

Secara umum Jejaring bersifat terbuka, inklusif dan independen. Siapa saja

dapat menjadi anggota Jejaring:

- Perorangan, terbuka bagi perseorangan dengan kewarganegaraan apapun.
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga non-pemerintah, lembaga pemerintah atau institusi akademis yang memiliki program dan/atau memiliki minat dalam bidang pendidikan dan lingkungan.
- Lembaga Internasional.
- Proyek/program yang dikelola pemerintah maupun non-pemerintah.

**Struktur Organisasi**

Struktur organisasi terdiri dari (i) anggota sebagai penentu arah kebijakan Jejaring melalui keputusan rapat

anggota; (ii) Komite Pengarah, yang berfungsi menjaga agar organisasi tetap berjalan sesuai dengan keinginan anggota; (iii) Ketua Pelaksana Harian, yang dibantu oleh sekretaris umum dan gugus tugas, yang menjalankan roda organisasi sehari-hari.

**○ Komite Pengarah Jejaring**

Terdiri dari sembilan lembaga yang mewakili berbagai pihak, yaitu pemerintah, LSM, donor, perguruan tinggi, perusahaan, manajemen tim proyek/program di bidang AMPL sebagai berikut: Pokja AMPL, WASPOLA, JAS/GTZ, Air Kita/Europromocap IWAT, IHE Indonesia, Plan Indonesia, ISSDP, Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Trisakti, dan PDAM Tirta Pakuan.

**○ Gugus Tugas**

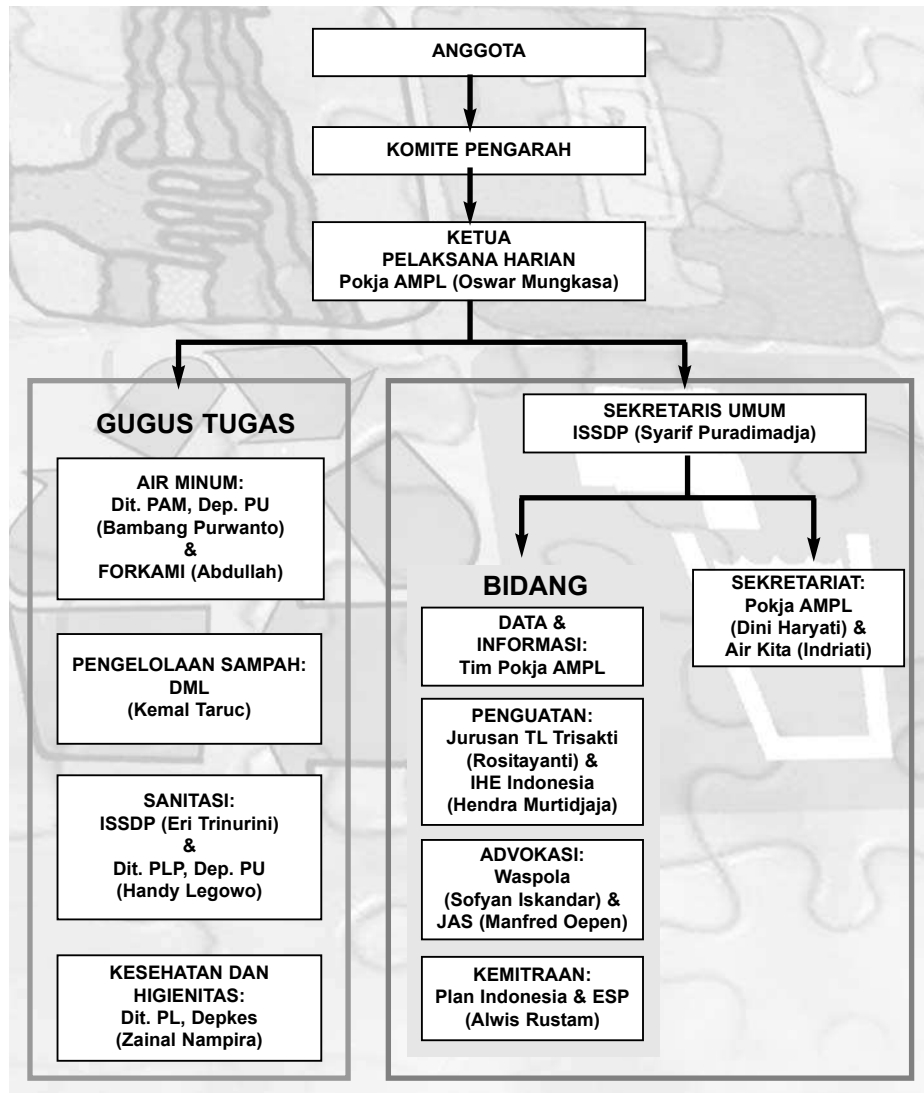
Gugus Tugas dibentuk mengingat adanya beberapa isu pokok dalam konteks AMPL seperti air minum, pengelolaan sampah, sanitasi dan perilaku hidup bersih. Keempat isu tersebut memiliki permasalahan dan pendekatan tersendiri untuk pengelolaannya. Atas dasar keragaman itu, maka dibentuk gugus tugas, agar setiap permasalahan di atas dapat dibahas secara lebih terfokus. Adapun gugus tugas tersebut adalah Gugus Tugas Pengelolaan Sampah (GTPS), Gugus Tugas Sanitasi (GTS), Gugus Tugas Air Minum, dan Gugus Tugas Kesehatan dan Higienitas.

**Program Kerja Jejaring**

1. Pusat Sumber Daya Informasi  
Membangun Program Integrasi Data, Informasi Pengetahuan, dan Program AMPL dalam Bentuk *Data Base*.
2. Program Penguatan Kapasitas  
Mewujudkan penguatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan AMPL yang berkelanjutan melalui *sharing* kapasitas antar-anggota Jejaring dan pihak lain di luar yang terkait, melalui pelatihan/*workshop/seminar* mengenai metodologi dan praktik-praktik terbaik AMPL.
3. Program Pengembangan Kemitraan  
Mengembangkan kemitraan internal antarsesama anggota Jejaring dan eksternal dengan menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan pihak-pihak di luar jejaring komunitas AMPL untuk mendukung program-program di atas.
4. Advokasi  
Mendorong isu AMPL menjadi prioritas pemerintahan maupun publik dengan serangkaian kegiatan advokasi yang melibatkan berbagai pihak untuk membangun dukungan, penetapan kebijakan, pola pendanaan, strategi kampanye dan kajian solusi di bidang AMPL.

**Gugus Tugas Pengelolaan Sampah (GTPS)**

Untuk memfasilitasi para anggota Jejaring yang mempunyai minat di bidang



persampahan maka dibentuklah Gugus Tugas Pengelolaan Sampah (GTPS) atau *Solid Waste Management Task Force* (SWM-TF). Gugus Tugas ini adalah bagian dari Jejaring AMPL yang merupakan wadah untuk mensinergikan potensi informasi, pengetahuan dan komunikasi antaranggota Jejaring AMPL di bidang persampahan dalam kerjasama yang memberikan manfaat kepada semua pihak.

Koordinator GTPS yang juga Direktur Eksekutif Dana Mitra Lingkungan (DML), Kemal Taruc, kepada **Percik** mengatakan fokus dari gugus tugas ini pada kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat skala kecil. Sementara untuk sasaran strategisnya, jelas Kemal, yaitu terintegrasinya data, informasi, pengetahuan dan program gugus tugas pengelolaan sampah, tersedianya fasilitas situs sebagai sarana untuk mengakses informasi yang berkualitas bagi seluruh anggota Jejaring AMPL pada umumnya dan khususnya gugus tugas pengelolaan sampah, serta terwujudnya penguatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

#### ● Keanggotaan

Anggota gugus tugas ini adalah orang-orang ataupun lembaga seperti DML, ESP, Mercy Corps, dan lainnya, yang juga merupakan bagian dari Jejaring AMPL. Menurut Kemal, pihak-pihak yang terlibat dalam GTPS adalah semua pelaku, pemerhati, penggemar, pengamat, pengomentor, pengkritik, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pengusul kebijakan. "Semuanya terbuka bagi siapa saja yang berkenan dengan pengelolaan sampah dan berbasis masyarakat," ungkapnya.

GTPS merintis kerja sama dalam bentuk pertukaran informasi melalui milis dan situs serta informasi yang bisa saling dipertukarkan antaranggota, dan tentu saja kesempatan untuk memperluas jaringan rekan kerja dan apa saja yang bisa dilahirkan dari situ.

Menurut Kemal, kegiatan bersama berupa pengelolaan sampah berbasis



Gugus Tugas Pengelolaan Sampah-Jejaring AMPL menggelar lokakarya "Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat" pada tanggal 16-17 Januari 2008 di Jakarta. Foto: Bowo Leksono.

masyarakat sebagai upaya penting yang harus mendapat pengakuan publik dan dukungan politis (yang berarti anggaran, kebijakan, dan sebagainya). "Bukan seperti sekarang yang hanya sekedar menjadi kegiatan hobi para pengelola sampah di RT-RW, kelurahan, maupun kompleks perumahan," ujarnya.

#### ● Kegiatan GTPS

Hingga saat ini, GTPS telah melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya Lokakarya Persampahan Berbasis Masyarakat pada pertengahan Januari 2008. Sesuai dengan semangat kebersamaan Jejaring AMPL, kegiatan tersebut diselenggarakan atas sinergi banyak pihak diantaranya JBIC dan *Mercy Corps*.

Baru-baru ini, GTPS menyelenggarakan pertemuan di kantor ESP untuk membahas Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang baru saja disahkan DPR awal April 2008 lalu. Fokusnya bukan membedah undang-undang tersebut pasal per pasal, tetapi lebih melihat peraturan perundangan yang diamanatkan, terutama peraturan pemerintah.

"Untuk ke depannya, selain dalam bentuk pertemuan yaitu saling mengundang dan saling mengajak partisipasi dalam acara yang diprakarsai salah satu anggota. Nantinya diharapkan adanya kegiatan bersama yang sedang dicari bentuknya yang paling tepat," tutur Kemal.

#### Gugus Tugas Sanitasi (GTS)

Koordinator GTS Eri Trinurini Adhi mengatakan seperti halnya gugus tugas lainnya, yang terlibat dalam GTS adalah organisasi dan individu yang tertarik dengan isu-isu sanitasi baik untuk kepentingan organisasi maupun individu. "Sebuah organisasi atau individu dapat saja bergabung dengan lebih dari satu gugus tugas," katanya.

GTS saat ini terus menggalang keanggotaannya. Tidak seperti isu persampahan, isu sanitasi (air limbah) memang belum banyak disentuh oleh banyak organisasi. Meskipun demikian kesadaran sanitasi sudah mulai banyak diperhatikan oleh banyak lembaga baik secara khusus maupun bergabung dengan isu lain yang relevan seperti air minum dan lingkungan, kesehatan dan pendidikan.

#### ● Kegiatan GTS

Pada prinsipnya, Jejaring AMPL adalah sebuah jaringan komunikasi. Dengan demikian membuka dan memelihara komunikasi dengan semua *stakeholder* merupakan sesuatu yang harus dilakukan.

Kerjasama antarorganisasi baik sesama anggota maupun organisasi lain di luar Jejaring AMPL merupakan sesuatu yang jamak bagi GTS untuk menjalankan misinya. Misalnya lokakarya *simplified* sewerage yang baru saja dilakukan pada bulan Mei 2008. Kegiatan ini merupakan

kerjasama antara Tim Teknis Sanitasi Nasional, ISSDP, WSP-EAP dan Gugus Tugas Sanitasi.

GTS disini berperan sebagai pelaksana kegiatan tersebut dengan *steering committee* dari Tim Teknis Sanitasi dan ISSDP. GTS juga secara aktif memberikan dukungan kepada DitJen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan Tahun Sanitasi Internasional 2008 dan Hari Air Dunia.

Menurut Eri, fokus GTS adalah pertukaran pembelajaran antarpemangku kepentingan terhadap pendekatan dan model-model pendekatan sanitasi perdesaan dan perkotaan yang selama ini berkembang. "Selama ini sudah banyak model terutama sistem setempat (*on site*) yang dikembangkan, tetapi baru dalam tingkat proyek percontohan" tuturnya.

Antarprogram ini harus selalu melakkan pembelajaran, sehingga dapat muncul inovasi baru. Lebih jauh, GTS ingin mendorong agar model yang sudah dikembangkan tersebut dapat diadaptasi untuk kawasan yang lebih luas lagi oleh pemangku kepentingan lain dan pemerintah.

Sasaran GTS, ujar Eri yang juga menjabat Asisten *Team Manager* Program

Pengembangan Sanitasi (ISSDP), adalah terbentuknya pusat data serta kerjasama yang baik dengan organisasi, program dan individu yang memiliki komitmen terhadap pembangunan sanitasi. "Program kerjanya antara lain menyusun data base anggota gugus tugas, melakukan penelitian, dan melaksanakan lokakarya," ungkapnya.

### Gugus Tugas Kesehatan dan Higienitas (GTKH)

Pembangunan AMPL tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik, tetapi perubahan perilaku juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pada saat ini, pemangku kepentingan AMPL sedang bergiat mendorong perubahan perilaku melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Untuk menghindari program yang tumpang tindih, perlu disinergikan gerakan STBM. Melalui Jejaring AMPL, Gugus Tugas Kesehatan dan Higienitas ini menjadi wadah untuk meningkatkan sinergi pembangunan AMPL melalui gerakan STBM. Langkah-langkah yang dilakukan bersama diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien.

Untuk itu pada 26-27 Mei 2008 atas kerjasama Bappenas dan Departemen Kesehatan, diselenggarakan Lokakarya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Bogor. Kesempatan tersebut juga digunakan sebagai momen peluncuran Gugus Tugas Kesehatan dan Higienitas, salah satu gugus tugas di bawah Jejaring AMPL. Gugus tugas ini berada di bawah koordinasi Direktorat Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan.

Dalam lokakarya STBM ini juga disampaikan presentasi rancangan Strategi Nasional STBM oleh Kasubdit Penyehatan Air yang juga koordinator Gugus Tugas Kesehatan dan Higienitas, Zainal Nampira. Terdapat 6 komponen strategi, yaitu penciptaan lingkungan kondusif, peningkatan kebutuhan, peningkatan penyediaan, pengelolaan pengetahuan, pembiayaan, monitoring dan evaluasi. Strategi Nasional juga dilengkapi dengan rencana kerja dan indikator.

### ● Rencana Kegiatan

Kegiatan Gugus Tugas Kesehatan dan Higienitas, saat ini lebih difokuskan pada kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Terdapat lima pilar utama kegiatan STBM, yaitu *Open Defecation Free* (ODF), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT), Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

Untuk tahun 2008 ini, dari April hingga Desember, serangkaian kegiatan terkait akan dilaksanakan Gugus Tugas Kesehatan dan Higienitas. Mulai dari fasilitasi pelaksanaan gerakan STBM, penyusunan panduan-panduan hingga fasilitasi klinik sanitasi di daerah.

Ke depan diharapkan Gugus Tugas Kesehatan dan Higienitas ini dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan AMPL di Indonesia, khususnya kegiatan STBM. Partisipasi aktif Gugus Tugas Kesehatan dan Higienitas dalam gerakan STBM diharapkan akan mengurangi angka kematian karena diare dan penyakit lainnya yang berhubungan dengan kondisi sanitasi di Indonesia. ■ BW/DH



Diskusi "Simplified Sewerage" diselenggarakan oleh Gugus Tugas Sanitasi-Jejaring AMPL di Departemen Pekerjaan Umum, Jumat 25 April 2008. Foto: Bowo Leksono.

# Seputar Tahun Sanitasi Internasional

Pencanangan Tahun Sanitasi Internasional di tingkat nasional pada tanggal 27 Maret 2008 oleh Menteri Pekerjaan Umum, ternyata cukup bergaung. Beberapa daerah kemudian menindaklanjuti dengan melakukan pencanangan Tahun Sanitasi Internasional dengan beragam kegiatan. Berikut ini cuplikannya

## PERESMIAN PROYEK PEKERJAAN UMUM DI PROPINSI BALI

Sebagai rangkaian dari pencanangan Tahun Sanitasi Internasional di Indonesia, pada tanggal 14 Juni 2008, Departemen Pekerjaan Umum menyelenggarakan serangkaian kegiatan di Denpasar, Bali. Dimulai dengan penyerahan hadiah bagi pemenang lomba pidato anak dan lomba lukisan anak bertema selamatkan air dan lingkungan oleh Menteri PU. Kemudian dilanjutkan dengan peresmian Denpasar *Sewerage Development Project* (DSDP) dan *Trash-Rack* Tukad Badung dan Tukad Mati oleh Presiden.

Pembangunan DSDP dimulai segera setelah terjadinya peristiwa sejumlah wisatawan Jepang terkena Disentri di Bali yang berakibat jumlah wisatawan Jepang ke Bali berkurang 50 persen. Diharapkan setelah terbangunnya DSDP maka kualitas lingkungan perairan akan lebih baik, sehingga peristiwa terjangkutnya Disentri dapat dicegah. Dengan demikian, citra pariwisata Bali akan menjadi lebih baik.

Fakta lain yang juga dapat menurunkan kualitas lingkungan adalah masyarakat yang masih menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Kondisi ini dapat mengakibatkan pendangkalan sungai dan mengakibatkan banjir. Akibatnya derajat kesehatan masyarakat



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto meresmikan proyek-proyek infrastruktur pekerjaan umum dan penyerahan bantuan langsung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri serta kredit usaha rakyat untuk Provinsi Bali di Denpasar. Foto: Repro Kompas.

**Tanpa sanitasi yang baik maka pariwisata tidak akan berkembang.**

dapat menurun, selain estetika lingkungan juga terganggu. Pembangunan *Trash-Rack* dimaksudkan untuk menangkap sampah di sungai dan kemudian diangkat keluar dari badan sungai. Diharapkan hal ini dapat membantu mencegah penurunan kualitas lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan ke sungai.

Peresmian kedua proyek ini dimaksudkan untuk mengingatkan kepada kita semua tentang keterkaitan yang erat antara sanitasi dan pariwisata. Hal ini ditekankan oleh Presiden dalam pidato-

nya bahwa pariwisata tidak lagi hanya menyangkut 5 S yaitu *sun, sand, sea, smile* tapi juga S yang lain yaitu *sanitation*. Tanpa sanitasi yang baik maka pariwisata tidak akan berkembang. ■ OM

## PENCANANGAN TAHUN SANITASI INTERNASIONAL DI NANGROE ACEH DARUSSALAM

Selepas Tsunami 2004, banyak perubahan yang terjadi di NAD, termasuk pembangunan AMPL. Hal ini terutama terkait dengan banyaknya dukungan dari lembaga donor maupun LSM yang berkiprah membantu penyediaan kebutuhan dasar diantaranya layanan air minum, sanitasi dan sampah. Tanggapan kondisi ini, kemudian Gubernur NAD melalui Surat Keputusan No. 699/66/ 2008 tanggal 13 Maret 2008 menetapkan Tim Koordinasi Penyelenggara Program Nasional AMPL atau dikenal sebagai Kelompok Kerja AMPL (Pokja AMPL). Keberadaan Pokja ini diharapkan dapat mem-

bantu mensinergikan pembangunan AMPL di NAD.

Sebagai bagian sosialisasi keberadaan Pokja AMPL NAD, pemerintah Propinsi NAD bekerjasama dengan UNICEF, BRR, dan GTZ menyelenggarakan kegiatan Peluncuran Tahun Sanitasi Internasional 2008 dan Program Pembangunan Pokja AMPL Propinsi NAD, bertempat di Banda Aceh pada tanggal 12 Juni 2008. Pertemuan tersebut dibuka oleh Asisten Daerah Propinsi NAD, dan dihadiri oleh lembaga donor, LSM, dinas terkait, dan media massa. Selain mensosialisasikan Keputusan Gubernur tentang Pokja AMPL Propinsi NAD, sekaligus juga dilakukan sosialisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat oleh Pokja AMPL Nasional. Untuk melengkapi, Mardani dari Pokja AMPL Kabupaten Solok berkesempatan menjelaskan pengalamannya selama ini dalam melakukan implementasi kebijakan nasional tersebut di daerahnya. Acara kemudian ditutup dengan penjelasan tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem

**Diharapkan Tahun Sanitasi Internasional menjadi bagian dari kepedulian masyarakat secara umum, bukan hanya pemerintah saja.**

Sanitasi oleh GTZ.

Menariknya, pada sudut jalan utama dipasang baliho besar dan spanduk tentang acara ini. Diharapkan Tahun Sanitasi Internasional menjadi bagian dari kepedulian masyarakat secara umum, bukan hanya pemerintah saja. ■ (Sofyan)

#### **DEKLARASI HARI AIR DUNIA DAN TAHUN SANITASI INTERNASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH**

Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan dimotori oleh Dinas Kimpras-

wil, PSDA, Pokja AMPL bekerjasama dengan UNICEF dan WASPOLA melaksanakan Deklarasi Hari Air Dunia dan Tahun Sanitasi Internasional pada tanggal 29 Mei 2008 dipusatkan di Kabupaten Kendal.

Acara berlangsung meriah dengan rangkaian agenda antara lain sarasehan "Air Minum dan Sanitasi" dihadiri lebih dari 300 peserta dari seluruh Jawa Tengah, lomba poster air minum dan sanitasi, lomba menggambar dan mewarnai bertema "Lingkungan Sehat" yang diikuti sekitar 60 anak. Tidak lupa juga dilangsungkan pameran bertema air minum dan sanitasi.

Puncak acara ditandai dengan sambutan dan pernyataan deklarasi serta diikuti dengan penanaman pohon oleh Gubernur Propinsi Jawa Tengah, Gubernur berpesan pentingnya pelestarian sumber air minum melalui konservasi dan sanitasi lingkungan. ■ (SBR)

#### **RAPAT KOORDINASI AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PENCANANGAN TAHUN SANITASI PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Berempat di Hotel Lombok Raya Mataram tanggal 22-23 Mei 2008, diselenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) AMPL dan Pencanaan Tahun Sanitasi Nusa Tenggara Barat. Mungkin ini adalah Rakor AMPL yang pertama kali di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi melalui Pokja AMPL Propinsi dengan mengundang dinas terkait dari masing-masing kabupaten/kota. Pada kesempatan tersebut juga sekaligus dilakukan pencanaan Tahun Sanitasi Internasional oleh Kepala Bappeda Propinsi NTB, Lalu Fathurrahman, sekaligus membuka acara. Beberapa agenda kegiatan tahun Sanitasi Internasional telah dipersiapkan. Dalam Rakor tersebut dibahas beberapa agenda utama seperti penajaman Renstra AMPL kabupaten, dan penetapan rencana kerja kegiatan WES UNICEF. ■ (OM)



Gubernur provinsi Jawa Tengah Ali Mufiz menanam pohon menandai Deklarasi Hari Air Dunia dan Tahun Sanitasi Internasional. Foto: Sobari.

# Berjejaring Membangun AMPL

Pada 8 Oktober 2007, sekitar 40 lembaga yang terdiri dari pemerintah, lembaga internasional, LSM, proyek terkait, perguruan tinggi, PDAM, badan regulator dan asosiasi profesi telah menyatakan kesepakatan bersama untuk pembentukan Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL). Jejaring ini terdiri dari sembilan Tim Pengarah yaitu Pokja AMPL, WASPOLA, JAS/GTZ, Air Kita/ *Europromocap* IWAT, IHE Indonesia, Plan Indonesia, ISSDP, Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Trisakti, dan PDAM Tirta Pakuan. Berikut ini kami sarikan pandangan dari masing-masing anggota tim pengarah terhadap perlunya Jejaring AMPL dan harapan-harapannya.

## Mengapa perlu membuat Jejaring AMPL?



Oswar Mungkasa  
(Pokja AMPL)

Pembentukan Jejaring AMPL berangkat dari keprihatinan beberapa pihak yang menyadari bahwa isu AMPL selama ini masih di arus pinggiran sehingga belum menjadi perhatian dan komitmen dari para pengambil keputusan.

## Apa yang hendak dilakukan untuk Jejaring AMPL?

Pada saat ini jejaring masih bersifat informal karena belum terdaftar secara resmi di notaris maupun di Departemen Hukum dan HAM. Hal ini memang sengaja dilakukan untuk memberi kesempatan kepada semua anggota jejaring untuk berkiprah dahulu dalam wadah ini. Setelah dua atau tiga tahun kita akan berembuk kembali seperti apa bentuk formal dari jejaring ini. Walaupun demikian kita sudah menyiapkan AD/ART Jejaring berikut kode etiknya. Termasuk juga bentuk organisasinya. Seperti diketahui dalam wadah jejaring ini terdapat empat gugus tugas (gugus tugas pengelolaan sampah/GTPS, gugus tugas sanitasi/GTS, gugus tugas kesehatan dan higienitas, dan gugus tugas air minum) dibawah koordinasi wakil ketua pelaksana, dan empat bidang kerja (data dan informasi, penguatan kapasitas, pengembangan kemitraan, serta komunikasi dan advokasi) dibawah koordinasi sekretaris umum. Bidang-bidang ini mendukung pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing gugus tugas. Pengawasan sendiri dilaksanakan oleh komite pengarah yang terdiri dari sembilan institusi yang menjadi penggagas berdirinya jejaring. Dalam waktu dekat kita akan mulai menyusun rencana kerja untuk tahun 2009. Sementara ini sampai tahun 2008, masih bersifat darurat sehingga banyak kegiatan yang dilakukan masih bersifat sporadis.

## Apa yang diharapkan dari Jejaring AMPL?

Banyak harapan yang ditujukan kepada Jejaring ini. Beberapa peran yang diharapkan dari jejaring diantaranya adalah (i) meningkatkan koordinasi pembangunan AMPL di Indonesia; (ii) menjadi pusat pembelajaran (*resource center*) termasuk juga menjadi wadah penyedia bahan advokasi, bahkan melakukan sendiri advokasi tersebut, *best practice* AMPL; (iii) menjadi *focal point* pembangunan AMPL di Indonesia; (iv) menjadi garda depan pelaksanaan kampanye publik. Semua harapan tersebut sebenarnya dalam rangka menjawab isu pembangunan AMPL di Indonesia seperti (i) data AMPL yang tidak berkesesuaian satu sama lain; (ii) kesulitan memperoleh informasi menyangkut pembelajaran dan *best practice* AMPL; (iii) banyaknya pelaku pembangunan AMPL sementara dilain pihak terlihat kurangnya koordinasi diantara pelaku pembangunan AMPL; (iv) kampanye publik yang masih belum mendapat perhatian selayaknya.



Gary D. Swisher  
(WASPOLA)

Ini penting, untuk pengembangan jaringan sektor AMPL dalam kerangka percepatan reformasi Kebijakan sektor AMPL menuju pelayanan AMPL yang efektif dan tepat sasaran serta berkelanjutan. Relasi dan komunikasi antar-*stakeholders* dalam Jejaring akan membentuk komitmen percepatan pembangunan AMPL, termasuk pembagian peran yang lebih jelas, transparan dan *akuntabel*.

WASPOLA berkomitmen mendorong proses *sharing knowledge* antar-*stakeholders*, termasuk memfasilitasi pertemuan dan pertukaran informasi. Terutama untuk pengembangan kapasitas, reformasi kelembagaan dan *rising awareness*.

Sebagai wadah *stakeholders* yang sangat lengkap, Jejaring diharapkan menjadi media percepatan adopsi dan implementasi Kebijakan Nasional, khususnya berbasis masyarakat sekaligus menjadi media *sharing* sekaligus *pressure advocacy* terhadap komitmen berbagai pihak untuk pembangunan AMPL.

Mengapa perlu membuat Jejaring AMPL?	Apa yang hendak dilakukan untuk Jejaring AMPL?	Apa yang diharapkan dari Jejaring AMPL?
 <p><b>Manfred</b> (JAS)</p> <p>Bidang AMPL di Indonesia masih terabaikan dari persoalan investasi, peraturan yang melingkupi, kebijakan serta kesadaran bersama. Dalam Jejaring AMPL harus ada komitmen secara profesional di bidangnya. Karena itu, komitmen kita dibutuhkan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap bidang air minum dan sanitasi.</p>	<p>Koordinasi kegiatan, menyusun data, membuat modul pelatihan, penelitian, membuat isu legal, standar teknis dan sebagainya. Disamping itu mengajak kerjasama dengan pengambil kebijakan diberbagai bidang seperti politik dan ekonomi.</p>	<p>Kami, sebagai anggota jejaring, mengharapkan ada koordinasi yang baik. Kami berharap bekerjasama dalam pembiayaan dan mengatur kegiatan dengan mempertimbangkan strategi. Kerjasama juga ditujukan untuk membantu mengatasi bidang AMPL yang terabaikan.</p>
 <p><b>Didier Perez</b> (Air Kita Europromacap/IWAT)</p> <p>Untuk organisasi asing yang ingin membantu bidang lingkungan di Indonesia, sampai sekarang tidak ada koordinasi dan susah mencari jalannya. Kami bingung memilih <i>partner</i>, Depkes, Bappenas, Departemen PU, atau PDAM? Jejaring AMPL adalah alat yang paling cepat dan paling efektif.</p>	<p>Saya mau mencoba merubah cara berpikir orang Indonesia karena kesan di luar negeri masih perlu diperbaiki. Saya mau mencoba memotivasi donatur, membuat sinergi, dan kredibilitas.</p>	<p>Saya tidak menginginkan apa-apa. Saya hanya ingin membantu, saya tidak mengharapkan apapun.</p>
 <p><b>Jan Yap</b> (IHE)</p> <p>Sebuah langkah untuk kepentingan bersama tidak bisa dilakukan secara individu dan berjalan sendiri-sendiri. Kita harus berpikir bersama dan berjalan bersama secara berkesinambungan, sekalipun kesadaran itu harus datang dari per individu yang berbeda.</p>	<p>Menyumbangkan pikiran dan ide. Karena Jejaring memiliki program penguatan kapasitas Jejaring AMPL dalam hal ini fokus pada <i>sharing</i> kapasitas antaranggota Jejaring dan pihak lain di luar yang terkait melalui seminar, <i>workshop</i>, dialog, diskusi tematik, dan kajian. Dan mendistribusikan pengalaman, kajian, strategi, dan praktik-praktik terbaik AMPL.</p>	<p>Saya berharap dengan jejaring ini akan membangun budaya yang benar-benar cinta lingkungan. Sebuah pengabdian dan perhatian sepenuhnya untuk kesinambungan lingkungan yang bebas dari pencemaran. Kedepannya Jejaring AMPL menjadi lebih terintegrasi dan berkelanjutan.</p>
 <p><b>Tofik Rochman</b> (Plan Indonesia)</p> <p>Karena keterbatasan sumber daya/dana dalam meningkatkan kualitas dan cakupan kegiatan AMPL di Plan Indonesia.</p>	<p>Menguatkan <i>partnership</i> dan <i>sharing lesson learn</i> dengan lembaga lain dibidang AMPL dalam meningkatkan program AMPL di <i>area Plan</i>.</p>	<p>Implementasi AMPL di Indonesia yang lebih terintegrasi saling menguatkan dan menghindari perulangan strategi implementasi yang tidak berhasil.</p>

**Mengapa perlu membuat Jejaring AMPL?**



**Syarif Puradimadja**  
(ISSDP)

Untuk menjalin dan mengembangkan komunikasi efektif secara timbal-balik dari semua anggota dan *stakeholders* dalam peningkatan layanan air minum dan penyehatan lingkungan. Melalui jalinan komunikasi dalam bentuk wadah jejaring akan sangat memungkinkan terjadinya sinergi dan komitmen bersama dalam menyatukan visi yang lebih terfokus.

**Apa yang hendak dilakukan untuk Jejaring AMPL?**

- Ada tiga fokus kegiatan; bagi pengembangan kemitraan, penguatan kapasitas dan peningkatan komunikasi melalui advokasi serta pembentukan dan penguatan bank data AMPL.
- Ada juga fokus program yang bersifat sektor dibidang pengembangan gugus sanitasi persampahan dan perubahan perilaku dalam upaya membantu peningkatan layanan yang lebih efektif dan efisien.

**Apa yang diharapkan dari Jejaring AMPL?**

- Pengenalan antara semua *stakeholder* yang terlibat dibidang AMPL sehingga dapat diketahui seberapa besar terwujudnya kebersamaan tindak yang lebih bermanfaat.
- Saling mendukung kegiatan dan program antarpemerintah dan non-pemerintah untuk mewujudkan *social objectives* yang semakin terkonsolidasi.
- Terbentuknya pemetaan berbagai kegiatan di bidang yang sama di berbagai sektor dan wilayah sehingga dapat diketahui *base line* yang dapat dijadikan umpan balik bagi tersusunnya suatu rekonsolidasi kebijakan dan strategi pengembangan AMPL di tingkat nasional.
- Pemberian dukungan bagi penajaman program di sisi pemerintah sehingga terdapat prioritas pengembangan program yang terjamin tingkat pelaksanaannya (*workable*) dan pendanaannya secara politis.
- Terciptanya harmonisasi, kerjasama, dan kolaborasi antar-*stakeholders* dalam memfokuskan sasaran layanan yang ditujukan pada target pemihakan pada masyarakat miskin.



**Rositayanti**  
(Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Trisakti)

Supaya setiap kegiatan AMPL yang dilakukan para anggotanya dapat lebih terarah, tepat sasaran, dan luas cakupannya. Selain itu, melalui jejaring diharapkan isu AMPL menjadi perhatian penting dalam kebijakan Nasional.

Menyusun, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan AMPL sesuai kapasitas dan program kerja Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Trisakti.

Memperoleh sinergi dan kemitraan yang lebih luas dalam pelaksanaan kegiatan AMPL di Jurusan TL Usakti.



**Henry Darwin**  
(PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor)

Jejaring AMPL sangat diperlukan sebagai media komunikasi dan sosialisasi tentang kegiatan yang menyangkut air minum dan penyehatan lingkungan, bagi para pelaku AMPL, praktisi, akademisi dan masyarakat.

Menyampaikan ide-ide/gagasan, inovasi, pengalaman atau praktik terbaik di bidang AMPL untuk meningkatkan AMPL secara nasional.

Pelatihan dan informasi terkini dibidang AMPL.

# Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Sudah sejak 2003 masyarakat yang mendambakan lingkungan bersih dan sehat menanti kehadiran undang-undang persampahan. Penantian panjang itu akhirnya berakhir juga. Pada 9 April 2008, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Sampah disetujui Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Undang-undang hasil naskah akademis tim dari Kementerian Lingkungan Hidup ini bernama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. UU ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kehidupan yang baik dan sehat kepada masyarakat Indonesia.

## Latar Belakang Terbitnya UU Pengelolaan Sampah

Seiring pertambahan penduduk, sampah yang dihasilkan semakin bertambah. Namun, pertambahan sampah tersebut tidak terbatas pada volume semata karena mencakup juga jenis dan kualitasnya. Sementara metode pengelolaan sampah saat ini pada umumnya masih dengan cara membuang sampah secara langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Berbagai masalah pun hadir tak sekedar persoalan kebersihan dan pencemaran lingkungan, namun sudah masuk ke wilayah sosial yaitu perselisihan antarwarga di sekitar TPA. Parahnya, hampir semua kota di Indonesia, baik kota besar maupun kota kecil, tidak memiliki penanganan sampah yang baik.

Penanganan kebanyakan dengan manajemen yang sama, kumpul-angkut-buang. Suatu pengaturan klasik yang sudah seharusnya diakhiri. Karena terbukti cara ini memiliki kelemahan dan cenderung merugikan. Tidak hanya bagi lingkungan tapi juga bagi masyarakat di sekitar lokasi pembuangan.

Tentu kita masih ingat bencana ledakan di TPA sampah di Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat yang menelan korban ratusan orang. Belum lagi konflik masyarakat di sekitar lokasi tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bojong, Bogor, Jawa Barat atau TPA Bantar Gebang di Bekasi yang sudah kerap menghiasi media massa. Belum lagi beberapa persoalan persampahan di kota-kota lain. Hal ini tidak hanya berdampak pada satu kota saja tapi berkaitan antarkota.

Untuk itu, penting segera diterbitkan UU persampahan. Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah ini dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berhasil guna dan berdaya guna, sehat, aman dan ramah lingkungan. Hal penting yang diatur dalam UU ini adalah perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah yang semula sekedar mengumpulkan, mengangkut dan membuang sampah ke TPA berganti menjadi pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip 4 R (*reduce, reuse, recycle, recover*).



Foto: Bowo Leksono

## Revolusi Pengelolaan Sampah

Istilah ini muncul dari Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar yang mengatakan bahwa UU Pengelolaan Sampah merupakan revolusi pengelolaan sampah yang diharapkan dalam waktu yang tidak lama, masyarakat mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Seperti yang terdapat pada Pasal 4 yang mengatakan bahwa "Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya".

Dengan diberlakukannya UU Pengelolaan Sampah sejak diundangkannya dalam lembaran negara, penanganan sampah di Indonesia diatur dengan paradigma baru. Semua pihak bertanggung jawab terhadap sampah, baik masyarakat, pemerintah maupun pemangku kepentingan yang berkaitan dengan keberadaan sampah.

Seperti diketahui, selama ini sebagian besar masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan dengan metode kumpul-angkut-buang. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.

### Tanggung Jawab Pengelolaan Sampah

Dalam undang-undang ini, tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab terhadap persoalan persampahan. Masyarakat (rumah tangga) dan pihak swasta (produsen sampah) pun wajib mengelola sampah dengan aturan yang sudah ditentukan.

Aturan ini terdapat pada Pasal 12 ayat (1) yang mengatakan bahwa "Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan".

Sementara pada Pasal 13 menyebutkan "Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah".

Dengan kata lain, undang-undang itu memaksa masyarakat untuk melakukan daur ulang dalam pengelolaan sampah. Tentu bila tidak mengelola sampah akan dikenai sanksi sesuai peraturannya.

Hal lain yang menarik dalam undang-undang sampah ini berkenaan aturan bagi para produsen seperti yang tercantum dalam Pasal 14 dan 15. Seperti kewajiban yang dibebankan pada masyarakat, produsen pun diwajibkan mengelola kemasan dari barang yang diproduksi yang tidak dapat atau sulit terurai oleh alam. Pemerintah akan melakukan mekanisme *punishment and reward* kepada perusahaan yang melanggar dan tidak menjalankan pengolahan sampah. Tak terkecuali pada masyarakat baik secara individu maupun komunitas.

### Kewajiban Pemerintah Daerah

Sebelum diundangkannya UU No. 18 Tahun 2008, tidak ada standar aturan yang tegas mengenai pengelolaan sampah di setiap kabupaten/kota atau provinsi di Indonesia. Semua daerah berpegangan pada peraturan daerah masing-masing, sehingga penanganan sampah pun berbeda-beda.

Parahnya, pemerintah daerah terjebak pada masalah retribusi dan sanksi-sanksi (denda) untuk meningkatkan pendapatan daerah masing-masing dibanding tanggung jawab manajemen pengolahan sampah untuk kepentingan bersama.

Melalui undang-undang inilah konsep dasar berkaitan pembenahan penanganan sampah di Indonesia bisa terwujud segera. Tentu setelah diterbitkannya peraturan pemerintah sebagai pedoman pelaksana undang-undang tersebut. Untuk kemudian diikuti peraturan daerah yang berpedoman pada aturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Secara tersurat Undang-Undang Pengelolaan Sampah



Foto: Bowo Leksono

memaksa pemimpin daerah mengelola sampah bila tak ingin digugat atau terkena sanksi. Aturan ini mewajibkan pemerintah daerah menangani sampah di wilayahnya.

Pada Pasal 5 disebutkan "Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".

Kondisi bersih dan sehatnya suatu daerah dari persoalan sampah memang bergantung pada niat dan minat pemimpin daerahnya. Untuk urusan pengawasan pengelolaan sampah dalam undang-undang ini diatur dengan cara pengawasan bertingkat seperti yang tercantum pada Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2). Sederet kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan sampah terdapat dalam undang-undang yang pertama kali mengatur soal sampah ini.

Tentu semua pihak berharap, dengan diberlakukannya undang-undang mengenai pengelolaan sampah akan mampu mengurangi persoalan sampah di seluruh wilayah Nusantara. Semoga dimasa yang akan datang, Indonesia menjadi negara yang tidak lagi meributkan soal sampah tapi justru mampu membuka peluang kerja dari pengelolaan sampah ini. ■ BW

# Teknologi Pengolahan Sampah di PLTSa Gede Bage Bandung

oleh Sandhi Eko Bramono, S.T., MEnvEngSc. \*)

**P**embangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Gede Bage yang akan dibangun di Kabupaten Bandung, rupanya telah banyak menimbulkan pro dan kontra dalam rencana pembangunannya. Sebagian masyarakat menolak, sebagian lagi menerima, meskipun telah diterbitkannya studi kelayakan dari pengoperasian PLTSa oleh tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Masyarakat berhak untuk mengetahui mengenai proses yang diterapkan di PLTSa, mengingat penanganan sampah juga dapat menimbulkan kerawanan akan friksi sosial. Informasi yang tidak akurat atau bahkan menyesatkan, justru dapat menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri dalam menerapkan PLTSa ini.

Terlepas dari pro dan kontra yang berkembang saat ini, kiranya masyarakat perlu mengetahui, bahwa pengolahan yang akan diterapkan di PLTSa Gede Bage, merupakan pengolahan yang terintegrasi. Pengolahan yang tidak sekedar membakar sampah, namun juga menghasilkan produk berupa listrik, abu sisa pembakaran yang dapat dimanfaatkan, hingga dampak sosial baik lainnya, seperti penyerapan tenaga kerja. Namun di sisi lain, jika pengoperasian tidak dilakukan dengan benar, maka dapat pula menyebabkan kerusakan lingkungan secara lokal dan regional di kawasan tersebut, yang akhirnya berakhir dengan biaya sosial yang mahal yang harus dibayar masyarakat.

## Istilah PLTSa

Istilah ini diciptakan karena adanya proses pembangkitan energi dari sampah yang diolah dalam PLTSa. Sesungguhnya istilah ini cukup beresiko, mengingat besarnya peluang ketidakmampuan pengolahan sampah yang menghasilkan listrik secara ekonomis. Hal ini dapat dimengerti, karena tingginya kadar air dalam sampah di Indonesia (yang rata-rata dapat mencapai 60-80 persen), yang akan menurunkan nilai kalor dan energi yang dapat dibangkitkan dari sampah tersebut.

Seperti saat musim penghujan, dimana kadar air sampah dapat semakin tinggi, maka peluang untuk PLTSa untuk memproduksi listrik akan menurun, justru PLTSa akan menjadi pengonsumsi energi yang lebih banyak untuk dapat mengolah sampah.

Dalam istilah infrastruktur yang berkenaan dengan hal ini, terdapat istilah Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).



Sebuah spanduk dukungan pembangunan PLTSa Gede Bage di depan Pasar Balubur Bandung. Foto: Istimewa

Untuk membuatnya menjadi konsisten, mengapa tidak dinamakan sebagai Instalasi Pengolahan Sampah (IPS)? Selain itu, IPS lebih bertujuan mengolah sampah sebagai tujuan utamanya, bukan untuk memproduksi listrik. Produksi listrik atau produk yang bermanfaat lainnya, hanya merupakan hasil samping dari pengolahan sampah itu sendiri. Dengan pengistilahan menjadi IPS, maka fungsi dari pengolahan sampah tersebut menjadi lebih umum, yaitu untuk mengolah sampah.

## Pembakaran Terkontrol

Teknologi yang akan digunakan dalam PLTSa Gede Bage adalah pembakaran secara terkontrol. PLTSa dirancang untuk mengolah dengan kapasitas 500 ton/hari atau setara dengan pelayanan 850 ribu jiwa penduduk Kota Bandung. Sementara sampah yang dihasilkan di Kota Bandung dengan penduduk sekitar 2,6 juta jiwa (tahun 2007) adalah sekitar 1.600 ton/hari.

Dalam hal ini, PLTSa Gede Bage akan mengolah sekitar 30 persen sampah yang diproduksi Kota Bandung setiap harinya. Pemerintah Kota Bandung masih harus memikirkan untuk mengolah 70 persen sampah yang belum dapat diolah oleh PLTSa tersebut.

Sampah dari lokasi timbulan sampah, seperti di permukiman, kawasan komersial, kawasan perkantoran, kawasan industri, hingga kawasan pariwisata, akan diangkut dengan menggunakan truk pengangkut sampah. Pengumpulan sampah yang umumnya dilakukan oleh gerobak sampah, akan dibawa ke

Lokasi Penampungan Sementara (LPS) sampah.

Truk-truk sampah akan mengangkut sampah yang sudah terkumpul ke PLTSA Gede Bage untuk diolah. Terdapat zonasi daerah pelayanan sampah yang sampahnya akan diolah ke PLTSA, sementara sebagian lagi yang belum terlayani akan dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Bandung.

Sampah yang masuk ke dalam PLTSA akan ditampung dalam bak besar penampung sementara sampah, yang berperan seperti reservoir. Sampah akan diletakkan di sana selama 2-3 hari, untuk menjamin suplai sampah ke dalam PLTSA dapat berlangsung secara terus-menerus dalam laju yang konstan. Tanpa adanya bak penampung sampah ini, maka suplai sampah akan fluktuatif kadang sangat banyak, kadang sangat sedikit. Hal ini harus dihindari, sehingga kinerja proses dapat dipertahankan.

Setelah masuk bak penampung sampah, sampah akan dicacah agar ukurannya lebih kecil dan seragam, sebelum diangkut masuk ke ruang bakar. Setelah pencacahan, sampah akan memasuki ruang bakar pertama dengan suhu 600-800 derajat celcius untuk mereduksi volume sampah menjadi abu dengan volume tersisa hanya 10 persen saja. Dilanjutkan dengan masuk ruang bakar kedua dengan suhu 800-1.000 derajat celcius untuk menjamin kesempurnaan gas hasil pembakaran dari ruang bakar pertama.

Di dalam ruang-ruang bakar tersebut pula, sampah selain ditiup dari bawah dan atas untuk suplai udara, juga akan diangkat dan digerakkan oleh semacam stoker untuk mencampurkan sampah, udara, dan lidah api yang terdapat di ruang bakar tersebut. Abu yang terbentuk dari proses pembakaran di kedua ruang bakar akan terkumpul di bagian bawah ruang bakar, dan digerakkan dengan semacam ban berjalan untuk dikumpulkan di tempat terpisah, dan dibuang ke TPA.

Sekitar 90 persen volume sampah telah terkonversi menjadi gas yang mungkin masih mengandung polutan yang membahayakan. Oleh karenanya gas yang terbentuk dialirkan ke dalam unit pengendali pencemaran udara, untuk mengurangi kadar partikulat, gas karbon monoksida (CO), gas sulfur oksida (SOx), gas nitrogen oksida (NOx), serta berbagai logam berat yang terdapat di sana (Hg, Cu, Zn, dan lain - lain).

Partikulat akan ditangkap oleh *cyclone* dan *wet scrubber* yang akan menangkap partikulat secara sentrifugasi dan kontak dengan air. Hal ini akan menyisihkan partikulat hingga 90 persen. Gas seperti SOx, NOx, serta logam-logam berat akan dikurangi kadarnya pada kedua alat pengendali pencemaran udara.

Kinerja penyisihan polutan-polutan tersebut semakin ditingkatkan dengan adanya *bag house filter* yang akan menyaring partikel yang masih tersisa, sehingga kualitas gas buang akan semakin bersih. Sedangkan gas CO akan dikendalikan di ruang pembakaran dengan pengaturan suhu, pengaturan jumlah udara yang ditiup, hingga pengadukan sampah yang lebih intensif.

Dari kacamata hukum di Indonesia, pembakaran sampah secara terkontrol atau seringkali dikenal sebagai proses insine-

rasi mengacu pada Keputusan KABAPEDAL Nomor Keputusan 03/BAPEDEL/09/1995 tentang baku mutu emisi untuk sumber diam kegiatan lain-lain, termasuk insinerator.

Baku mutu utama dari polutan yang diatur adalah partikulat (harus kurang dari 350 mg/m<sup>3</sup>), oksida nitrogen dalam bentuk nitrogen dioksida (harus kurang dari 1.000 mg/m<sup>3</sup>), oksida sulfur dalam bentuk sulfur dioksida (harus kurang dari 800 mg/m<sup>3</sup>), serta tingkat kepekatan asap atau yang dikenal sebagai opasitas (harus kurang dari 35 persen).

Seluruh pembakaran sampah yang beroperasi di Indonesia, harus mengacu pada peraturan ini, agar dapat memberikan dampak lingkungan yang relatif minimum bagi kesehatan manusia, menurut standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

### Dampak Lingkungan

Setiap aktifitas manusia dipastikan akan memberikan dampak lingkungan, baik yang merugikan maupun bermanfaat bagi lingkungan. Pengoperasian PLTSA yang tidak sesuai kaidah teknis serta hukum yang berlaku, akan menyebabkan PLTSA menjadi sumber polutan baru yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Dampak akibat gas buang yang tidak terolah dengan baik, akan menjadi pencemar udara yang membahayakan. Namun jika PLTSA dioperasikan dengan benar, maka permasalahan sampah dapat tertangani dengan baik, lapangan kerja terbuka dan menyerap banyak tenaga kerja, ahli-ahli persampahan dapat mempraktikkan ilmunya untuk pengembangan dunia persampahan Indonesia yang masih carut-marut, mampu memproduksi listrik dan abu sisa pembakaran yang dapat dimanfaatkan sebagai agregat jalan, serta lingkungan yang terselamatkan.

Dengan kata lain, PLTSA dapat menjadi bumerang untuk lingkungan, namun bisa pula menjadi penyelamat lingkungan. Kini bagaimana Pemerintah Kota Bandung beserta masyarakat mau berperan serta aktif dalam menyelesaikan pengoperasian PLTSA ini.

Di tengah pro dan kontra masalah pembangunan PLTSA Gede Bage ini, ada baiknya kita melihat adanya niat baik Pemerintah Kota Bandung dalam keseriusannya menangani sampah. Sejumlah teknologi yang telah dicoba terapkan di masa lalu, harus diakui belum cukup berhasil membantu penanganan sampah di kota ini, yang sempat mendapat predikat kota terkotor dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena masalah darurat sampah pada tahun 2006.

Sejauh ada keseriusan Pemerintah Kota Bandung, profesionalitas dari pengelolaan PLTSA, serta kajian ilmiah yang obyektif dan jujur mengenai tingkat kesiapan teknis-teknologis-sosio-ekonomi-budaya dari PLTSA Gede Bage, mengapa kita harus tidak siap untuk menyaksikan PLTSA sebagai terobosan baru dalam dunia persampahan Indonesia? ■

\*) penulis adalah mahasiswa program doktoral di Division of Environmental Science and Engineering, National University of Singapore (NUS), Singapura. Kontak penulis: sandhie@yahoo.com

# Unsur Besi (Fe) dan Mangan (Mn) Air Bawah Tanah

Oleh: Ir. Iyus Yusup

KaSubag. Laboratorium Kualitas Air  
PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi



Seorang petugas PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi sedang mengambil air baku di lokasi pengolahan. Foto: Istimewa.

Survei dan analisa terhadap pencarian sumber air baku baru untuk konsumsi konsumen, harus selalu dipertimbangkan hal yang berhubungan dengan kualitas air, disamping perolehan kapasitas (debit) air maksimal. Pertimbangan kualitas akan memberikan informasi mengenai sifat air baku secara fisik, kimia, maupun bakteriologi, yang dapat saja akan menimbulkan dampak permasalahan baik dalam segi kesehatan konsumsi konsumen, atau pun akan menambah biaya produksi (*cost production*) karena harus melakukan perbaikan kualitas air berkelanjutan.

Dalam tulisan ini penulis hanya membahas pertimbangan uraian sebatas pelibatan pengambilan air baku yang berhubungan dengan kualitas air baku bawah tanah (air sumur) untuk konsumsi/pendistribusian/penjualan konsumen. Barangkali tulisan ini cocok sebagai informasi kondisi kuantitas sumber air saat ini yang kian hari semakin terbatas, disebabkan sumber air permukaan semakin langka dan tercemar dan pada akhirnya orang mencari alternatif air baku terutama di perkotaan tertuju kepada sumber air bawah tanah (sumur).

Dari pengalaman penulis selama melakukan penelitian, pemeriksaan, serta analisa kualitas air bawah tanah, baik itu secara fisik, kimia, maupun bakteriologi, air bawah tanah juga hampir mirip dengan air permukaan dalam hal kapasitas dan kualitas air. Kapasitas air sumur semakin cepat menurun pada saat musim kemarau, demikian pula kualitas air saat ini relatif sudah banyak tercemar. Pada gambar foto terlihat air sumur begitu jernih secara fisik pada saat pengambilan sampel (sampling), namun setelah dilakukan uji secara kimia ternyata kandungan Besi (Fe) dan Mangan (Mn) cukup tinggi, dan tidak memenuhi syarat sebagai air bersih/air minum.

Indikasi pencemaran sepengetahuan penulis terutama dari parameter analisa bakteriologi selalu ditandai adanya sejumlah bakteri golongan *Coli* dan *Eschericia. Coli*. Demikian pula berdasarkan hasil pemeriksaan dari parameter kimia selalu kandungan Besi (Fe) dan Mangan (Mn) terlarut didalamnya, yang kadarnya bervariasi tergantung daerah titik lokasi pengambilan sumber air tanah.

Ketiadaan (nihil) unsur Besi dan Mangan dalam air biasanya diikuti pula oleh kandungan unsur-unsur kimia lainnya yang masih memenuhi persyaratan kualitas air bersih/minum, artinya air baku tersebut relatif belum tercemar secara kimia.

Secara teoritis kandungan Besi umumnya hampir terdapat pada semua air tanah, sedangkan unsur Mangan tidak demikian, tetapi biasanya keberadaan unsur Besi selalu diikuti adanya unsur Mangan. Air yang mengandung unsur Besi dan Mangan tidak mengapa dimanfaatkan orang sebagai air bersih/minum, jika memang masih dibawah syarat batas standar maksimum kesehatan yang diperbolehkan (**lihat: Tabel**).

## BATAS STANDAR MAKSIMUM KANDUNGAN BESI DAN MANGAN DALAM AIR BERSIH/MINUM

No	Parameter pemeriksaan	Standar minimum/maksimum	
		Air minum	Air bersih
1.	pH (tingkat keasaman)	6,5 - 8,5	6,5 - 8,5
2.	Kadar Besi (ppm)	0,3	1,0
3.	Kadar Mangan (ppm)	0,1	0,5
4.	Secara visual	Jernih	Jernih

Sumber SK.Menkes No.907/Menkes/SK /2002 untuk Air Bersih dan Air Minum

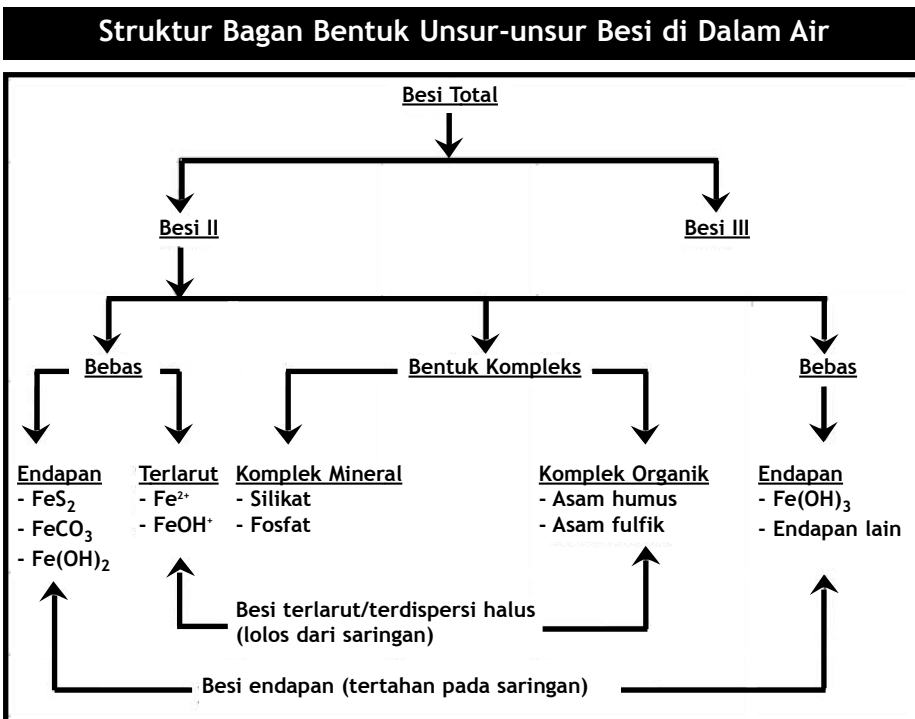
Dapat dijelaskan pula bahwa unsur Besi dan Mangan dalam bentuk mineral yang semula tidak larut ( $Fe^{3+}$  dan  $Mn^{4+}$ ), maka dalam kondisi anaerob di dalam tanah (oksigen rendah) unsur-unsur tersebut akan tereduksi menjadi ion bervalensi  $Fe^{2+}$  dan

Mn<sup>4+</sup> sehingga larut dalam air (lihat: Struktur Bagan Bentuk Unsur-Unsur Besi di dalam air).

Dari hasil beberapa literatur penelitian sering ditemukan juga Fe<sup>2+</sup> dan Mn<sup>2+</sup> dapat bersenyawa dengan Bikarbonat, Sulfat, dan Hidrogen Sulfida (H<sub>2</sub>S), sehingga dari segi estetika terutama warna dan baunya kurang disenangi dan menjadi keluhan para pemakai air.

Unsur Besi dan Mangan jika besaran konsentrasi (mg/l) relatif cukup besar di dalam air akan memberikan dampak pada sistem penyediaan air individu, industri, maupun perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Akan menimbulkan penyumbatan pada sistem instalasi pipa disebabkan secara langsung oleh endapan besi (deposit), dan secara tidak langsung adanya perkembangbiakan kumpulan bakteri besi ini akan meningkatkan gaya gesek (*losses*) sehingga kebutuhan energi akan meningkat. Jika terjadi degradasi akan menyebabkan bau dan rasa tidak enak pada air.



2. Unsur Besi dan Mangan dalam konsentrasi yang lebih besar beberapa mg/l (*parts per million/ppm*) akan memberikan rasa logam atau bau obat.

3. Pada proses *ion exchanger* (pertukaran ion), endapan Besi dan Mangan yang terbentuk, dapat mengakibatkan penyumbatan atau menyelubungi media pertukaran ion (*resin*) yang akibatnya hilangnya kapasitas pertukaran ion.
4. Menyebabkan keluhan para konsumen (seperti terjadi pada kasus *red water*) bila endapan Besi dan Mangan yang terakumulasi di dalam pipa, tersuspensi kembali disebabkan oleh adanya kenaikan debit atau kenaikan tekanan di dalam pipa sistem pendistribusian, sehingga endapan akan terbawa ke konsumen.
5. Keberadaan unsur Besi dan Mangan akan memberikan kenampakan keruh dan berwarna pada air dan meninggalkan noda pada pakaian yang dicuci oleh air ini, oleh karena itu sangat tidak diharapkan oleh pemakai air.
6. Meninggalkan noda kecoklatan disebabkan unsur Besi dan noda kehitaman oleh unsur Mangan pada bak mandi dan peralatan lainnya.
7. Endapan logam ini juga dapat mendatangkan permasalahan pada sistem penyediaan air individu, industri, maupun perusahaan seperti PDAM. ■



Sistem perpipaan untuk mengambil air baku dari sumber air untuk dialirkan ke bak penampungan.  
Foto: Bowo Leksono.

# Lima Tahun Mendatang Desa Tetaf Menjadi Desa Makmur

Oleh Alma Arief dan  
Dormaringan Saragih

Konsultan WASPOLA

Ada yang membanggakan dan bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk tetap berteguh hati bahwa pembangunan AMPL akan mampu menjadi faktor pengungkit tingkat kesejahteraan masyarakat. Artinya, pembangunan AMPL yang pada dasarnya memberikan kemudahan akses-apakah hanya sekedar mendekatkan jangkauan mendapatkan air atau memberikan layanan sampai ke rumah-tanggakan memberikan hasil langsung maupun tak langsung yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat, dan sebagainya.

Keluaran pembangunan sarana air minum tersebut, yang dari perhitungan diatas kertas akan mampu meningkatkan kesejahteraan, secara nyata telah nampak dari pembangunan sarana air minum di desa Tetaf, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang di fasilitasi program ProAir, bantuan hibah pemerintah Jerman. Artikel ini merupakan oleh-oleh dari perjalanan tim membuat film dokumentasi Operasionalisasi Kebijakan AMPL ke Kabupaten TTS yang sebagian besar pengambilan gambarnya diambil di Desa Tetaf, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## Desa Tetaf yang Miskin

Desa Tetaf secara umum bisa dikategorikan miskin. Sandaran mata pencaharian masyarakat adalah bertani dengan tanaman semusim seperti jagung sebagai tanaman utama dan sayur mayur seperti terong, cabe, kool, selada, dan sebagainya. Masyarakat juga menanam kelapa, sirih, pisang, mangga, mahoni, akasia, yang sebagian tumbuh dengan sendirinya dan sebagian lain memang ditanam.

Sesungguhnya, ketika memasuki Desa Tetaf, kesan kemiskinan sama sekali

tidak nampak, sebab seluas mata memandang yang nampak adalah tanaman hijau menghampar yang mengindikasikan kesuburan tanah dan hasil pertanian yang berlimpah. Akan tetapi, pada kenyataannya masyarakat di Desa Tetaf secara umum masih terbelenggu kemiskinan. Pendapatan serta tingkat konsumsi sehari-hari mereka (asupan gizi), masih pada level yang rendah. Anak-anak sekolah di desa ini, sebagian besar masih telanjang kaki, beberapa diantaranya ingusan sebagai indikasi rendahnya pendapatan dan kurangnya asupan gizi.

Bangunan rumah mereka bisa dikatakan masih menggunakan bahan-bahan sederhana; atap dari dedaunan (rumbia), tiang-tiang dari kayu kasar, dan lantai dari tanah. Hanya sebagian kecil rumah penduduk yang ber dinding semen (tembok), beratap seng, dan berlantai ubin. Inilah gambaran umum tingkat kesejahteraan penduduk Desa Tetaf.

## Program Air Bersih ProAir

Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang didanai pemerintah Jerman melalui GTZ dan KFW dengan sangat teliti-kriterianya antara lain ketersediaan sumber air, kesediaan untuk memberikan kontribusi tunai untuk biaya pemeliharaan, pernyataan minat untuk difasilitasi, dan sebagainya-memilih Desa Tetaf untuk difasilitasi pembangunan sarana AMPL.

Program yang lebih dikenal dengan nama ProAir ini, secara konsisten menerangkan prinsip-prinsip kebijakan nasional baik dalam fase inisiasi pemba-

ngunan, perencanaan pembangunan, pembangunan sarana, dan paskapembangunan sarana (pemeliharaan sarana).

Karena sasarannya lebih pada pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan AMPL, tidaklah mengherankan bila pada fase penyiapan masyarakat memerlukan waktu lama-jauh lebih lama dari fase konstruksi fisik- karena kegiatan fasilitasi masyarakat memang lebih ditujukan untuk merubah alam pikiran, sikap, dan perilaku masyarakat, utamanya pemahaman (*affectif*), sikap (*cognitif*), dan perilaku (*psikomotoric*) dalam hubungannya dengan air bersih sebagai benda ekonomi dan benda sosial, serta pengelolaan untuk keberlanjutannya.

ProAir di NTT sudah dimulai sejak akhir 2003 di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, dan Timor Tengah Selatan. Pada awalnya program pembangunan ini cukup sulit diterapkan karena memang merupakan program pembangunan yang menerapkan prinsip tanggap kebutuhan yang didalamnya terkandung gagasan untuk mengarusutamakan peran masyarakat sebagai aktor utama pembangunan. Prinsip-prinsip Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL yang secara lengkap ada 11 butir, diterapkan dengan konsisten.

Adapun yang menjadi masalah, bahwa masyarakat di NTT yang menjadi sasaran pembangunan adalah masyarakat miskin, sedangkan pihak ProAir secara ketat menetapkan syarat bahwa masyarakat harus memberikan kontribusi tunai sebagai dana pemeliharaan sarana. Dalam kebijakan nasional, ini merujuk pada prinsip pemulihan biaya (*cost recovery*).

Keharusan memberikan kontribusi tunai tersebut pada masa awal kegiatan ProAir telah menimbulkan perbedaan pendapat. Disatu sisi ada pihak yang

berpendapat bahwa "masyarakat akan mampu membayar kontribusi tunai (*incash*)" sedangkan di pihak lain berpendapat "masyarakat tidak akan mampu membayar kontribusi tunai karena kemiskinannya".

Pihak yang berpendapat bahwa masyarakat miskin tidak mampu membayar, meminta agar sumbangan tunai masyarakat bisa dipenuhi dengan mengkonversi sumbangan tenaga dan material lokal menjadi rupiah, sedangkan pada sisi lain, yang menyatakan bahwa masyarakat mampu, bersikukuh bahwa masyarakat bisa menyisihkan penghasilannya atau kekayaannya baik dalam bentuk uang maupun barang (hewan, hasil meneun, dan sebagainya) sedikit demi sedikit.

Kemudian, apa yang dilakukan ProAir ternyata memang bisa menunjukkan bahwa masyarakat memang mampu. Namun untuk mengubah paradigma dari yang semula selalu "menerima paket instan" menjadi "terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap tahapan pembangunan, bahkan dimintai kontribusi tunai", ternyata memerlukan waktu lama. Berbagai fasilitasi untuk menjelaskan mengenai cara mengajukan usulan untuk difasilitasi pembangunan sarana air minum dan syarat-syaratnya, penjelasan mengenai manfaat pembangunan sarana air, keharusan memberikan iuran tunai untuk pemeliharaan sarana, pelatihan teknis pemeliharaan sarana, kampanye PHBS untuk mengubah perilaku hidup, pemanfaatan waktu dan tenaga setelah air mudah diakses, dan sebagainya, diberikan secara intensif.

Di seluruh desa yang difasilitasi, ProAir bisa mengumpulkan kontribusi tunai dan juga iuran bulanan. Di TTS jumlah uang yang dikumpulkan baik dari kontribusi tunai sebelum konstruksi dimulai dan iuran bulanan sampai bulan september 2007 adalah sbb :

No	Nama Kelompok/Desa	Jumlah per September 2007
1	Nekmese-OeUe (Desa Tetaf)	Rp 16.547.054
2	Heimituin-Oemofun	Rp 15.597.991
3	Kofi Tel - Nefokoko	Rp 40.211.395

Kesediaan masyarakat miskin memberikan kontribusi tunai dan iuran rutin bulanan sekaligus meruntuhkan mitos bahwa masyarakat miskin tidak mampu membayar. Dengan fasilitasi intensif, pengorganisasian semua kegiatan secara terstruktur dan dengan pengadministrasian yang benar, semua permasalahan bisa diatasi. Masyarakat di desa-desa yang difasilitasi ProAir, apakah mereka yang tinggal di TTS, di Sumba Timur, dan di Sumba Barat, mampu melaksanakan semua butir-butir kebijakan nasional. Dan kini, mereka sudah mulai merasakan hasil pembangunan sarana air tersebut.

### Bersinergi dengan Dinas Pertanian

Ketika akses terhadap air bersih mulai dinikmati masyarakat, mereka kemudian menjadi memiliki sisa waktu dan tenaga dibanding pada masa lalu dimana sebagian besar waktu dan tenaga dihabiskan untuk mendapatkan air bersih bagi pemenuhan kebutuhannya. Perubahan yang seperti itu



Foto: Dok/ProAir

bersamaan masuknya program Dinas Pertanian untuk memfasilitasi bibit jeruk Keprok (dikenal sebagai jeruk Soe).

Sinergi yang seperti itu (apakah kebetulan atau memang direncanakan) tentu saja ditangkap masyarakat yang kini memiliki kelebihan waktu dan tenaga. Di Desa Tetaf, masyarakat kini menanam jeruk Keprok di areal seluas 70 hektar dengan tanaman jeruk sebanyak 30 ribu batang, sedangkan di Dusun OeUe, kelompok tani OeUe yang beranggotakan 20 KK, kini menanam 7.200 pohon di areal seluas 18 hektar.

### Penutup

Pembangunan sarana air, apakah sekedar mendekatkan jangkauan pengambilan air maupun memberikan layanan sampai ke rumah tangga, memang mempunyai daya ungkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Desa Tetaf, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, setelah masyarakat memiliki sisa waktu dan tenaga, dengan bergembira merespon ajakan pemerintah (Dinas Pertanian) menanam jeruk di lahan mereka.

Rasanya tinggal menunggu saat saja untuk menyaksikan penduduk memanen jeruk dengan hati berbunga-bunga sambil menyenandungkan lagu daerah. Anak-anak sekolah berangkat dipagi hari, berbaju rapih dan bersepatu pula. Namun kegembiraan itu masih menyisakan pertanyaan; sudah siapkah masyarakat menyambut hasil panen berlimpah tersebut? Apakah teknologi pascapanen sudah disiapkan? Apakah kelembagaan pascapanen sudah disiapkan? Bagaimana dengan daya serap pasar, dan dimana? Bagaimana mengatasi persaingan dengan hasil produksi daerah lain? Apakah masyarakat cukup terlindungi dari permainan harga tengkulak yang konon memborong secara ijon hasil pertanian mereka dan mereka itu berasal dari Kupang? Masih banyak pertanyaan lainnya, yang intervensi kebijakannya perlu mensinergikan potensi instansi terkait. ■

# Mengenal Pembelajaran Partisipatif Singkat (PPS)

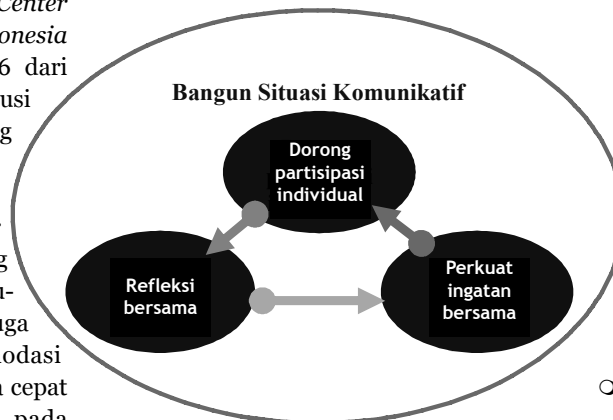
oleh  
Risang Rimbamaja

(Peneliti di JHU/CCP Indonesia)

## Singkat tapi Partisipatif

Meski singkat, PPS menjunjung tinggi prinsip partisipasi dalam proses pembelajaran dengan dasar pemikiran bahwa ruang partisipasi akan menguak lebih banyak pengetahuan warga untuk kemudian disirkulasi antarsesama partisipan termasuk kepada fasilitator, ruang partisipasi akan membangun penerimaan warga atas pengetahuan alternatif yang diidentifikasi bersama. Penerimaan pengetahuan itu kemudian akan banyak membantu dalam membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) pada program.

PPS memiliki empat komponen penting, yakni situasi komunikasi yang kondusif, partisipasi individual, refleksi bersama, dan penguatan daya ingat bersama. Keempat komponen itu haruslah dikembangkan secara sistematis dan terpadu, seperti diilustrasikan sebagai berikut;



Seperti terlihat dalam diagram, membangun situasi yang komunikatif adalah komponen yang perlu dikembangkan

selama proses berlangsung. Situasi yang komunikatif akan membuat partisipan merasa nyaman untuk berpartisipasi dan menerima pengetahuan baru hasil diskusi. Pada saat situasi komunikatif terbangun, partisipasi individual lebih mudah muncul.

Saat partisipasi individual sudah memadai, proses refleksi bersama dapat dilakukan dengan ramai sehingga akan memperkaya warga dengan pengetahuan-pengetahuan alternatif. Pada akhirnya, agar pengetahuan alternatif itu tetap menempel diingatan, partisipan dibantu untuk mengingat pengetahuan alternatif yang mereka gali dari pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri.

## Tahapan PPS

### a. Bangun situasi yang komunikatif

- Bangun komunikasi informal sebelum sesi diskusi dimulai. Bila tidak mungkin mendekati semua partisipan, fokuskan pada sejumlah kecil partisipan (sekitar 1/5 dari total partisipan)
- Kenalkan diri dan tim secara singkat dan sampaikan tujuan dan pesan yang umumnya disampaikan teman-teman fasilitator seperti, sesi ini adalah sesi belajar bersama, semua guru dan semua murid.
- Sepanjang diskusi tunjukkan penghargaan pada partisipan sebagai sumber pengetahuan.
- Ikuti arus diskusi sambil secara elegan mengajak para pendiam membuka suara dan mengendalikan yang terlalu banyak bicara.
- Setelah diskusi, bangun komunikasi informal dengan partisipan yang lebih banyak.
- Ucapkan terimakasih atas proses belajar bersama ini.

Pembelajaran yang partisipatif umumnya dipercaya sebagai proses yang memakan waktu panjang dimana untuk memfasilitasinya, paling tidak, dibutuhkan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Pada kenyataannya, banyak program tidak memiliki waktu sepanjang itu. Banyak program hanya mampu mengalokasikan waktu satu hari atau bahkan kurang dari satu hari untuk memperkenalkan sekaligus mendapatkan persetujuan awal dari warga komunitas.

Dalam kondisi demikian, kebanyakan fasilitator lapangan akhirnya memilih jalur non-partisipatif ketika berbicara kepada kelompok warga. Mereka mengundang warga lalu berceramah. Bila kemampuan *public speaking* fasilitator belum seanggih Bung Karno, Gede Prama, AA Gym ataupun para pembicara hebat lainnya, tak pelak, banyak warga yang kemudian mulai menguap sejak menit kelima.

Pembelajaran Partisipatif Singkat (PPS) adalah sebuah metode belajar kelompok warga yang dikembangkan oleh *Johns Hopkins University/Center for Communication Program Indonesia* (JHU/CCP Indonesia) sejak 2006 dari berbagai pengalaman fasilitasi diskusi kelompok warga, baik yang dilakukan CCP maupun mitra-mitranya.

PPS sebetulnya banyak belajar dari teknik-teknik partisipatif yang telah banyak dikenal terlebih dahulu. Perbedaannya adalah PPS juga ditujukan untuk mengakomodasi kepentingan program untuk secara cepat mengenalkan sejumlah pesan pada kelompok warga serta mendapatkan persetujuan awal atas program yang akan diimplementasikan.

**b. Dorong partisipasi individual**

- Lontarkan pertanyaan menarik yang mudah dijawab semua partisipan, semisal hal-hal yang baru saja mereka alami. Lakukan 2-3 kali lontaran pertanyaan mudah sebelum melontarkan pertanyaan yang agak sulit (seputar pengetahuan ataupun sikap).
- Gunakan gambar dan alat bantu lain untuk memfasilitasi penilaian individual.

**c. Refleksi bersama**

- Munculkan permainan dan berbagai gambar untuk memunculkan pengetahuan alternatif secara tidak langsung.
- Ajak partisipan untuk mempraktikkan, menganalisa, dan menginterpretasikan pengetahuan alternatif.
- Ajak partisipan membandingkan pengetahuan yang lazim dengan hasil interpretasi mereka sendiri terhadap berbagai permainan dan gambar yang menginspirasi pengetahuan alternatif.

**d. Perkuat ingatan bersama**

- Ajak partisipan mencatat dan memampangkan hasil belajar bersama. Meta-plan dapat digunakan bila partisipan merasa nyaman atau fasilitator dapat membantu mencatatkan.
- Bila perlu, gunakan permainan dan kuis untuk menguatkan ingatan.

Seperti dipaparkan di atas, untuk mengaplikasikan MPPS, diperlukan sejumlah alat bantu, khususnya gambar-gambar yang dapat menyampaikan pesan secara lebih mudah ketimbang kata-kata yang abstrak. Selain itu, PPS pun membutuhkan sentuhan pendakatan hiburan (*edu-entertainment*), khususnya untuk memperkuat ingatan bersama. Karenanya, sejumlah permainan dan kuis perlu disiapkan sebelumnya. Dari sisi jumlah partisipan, PPS akan lebih efektif bila diaplikasikan dalam kelompok dengan partisipan sejumlah 15-20 orang.



Seorang peserta pembelajaran partisipatif sedang belajar memberi materi pada peserta lain.  
Foto: Bowo Leksono

**Contoh Aplikasi PPS**

PPS dapat diaplikasikan pada berbagai inovasi seperti air, sanitasi, higienitas dan juga isu-isu kesehatan dan kemasayarakatan lainnya. Perlu diperhatikan dalam mengaplikasikan PPS adalah kemampuan memfasilitasi diskusi dan stok pengetahuan berkenaan isu-isu yang akan diangkat. Pemahaman isu yang diangkat menjadi penting untuk mengalirkan diskusi yang berlangsung. Tanpa pemahaman yang memadai, diskusi akan mengalir ke arah yang tidak diinginkan.

**Komponen 1: Bangun situasi yang komunikatif**

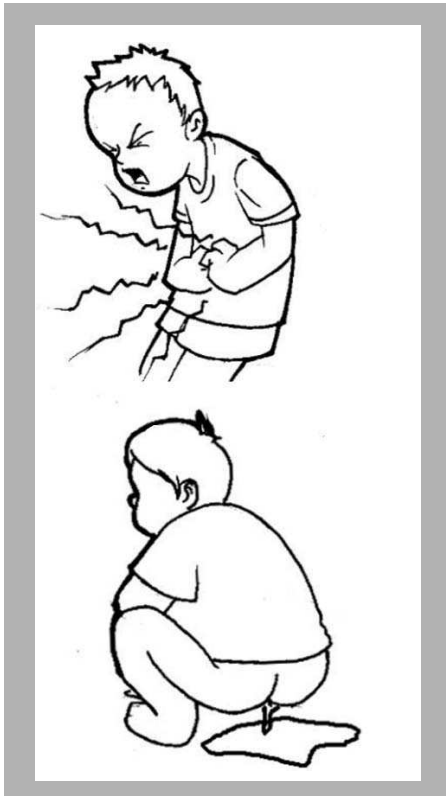
- Sebelum acara dimulai, sapa lah sejumlah ibu dan tanya tentang kabar mereka, suami dan anak-anak mereka. Tanya pula di mana mereka tinggal dan bagaimana mereka mencapai tempat pertemuan. Fokuskan pada satu atau dua dari berbagai kumpulan ibu-ibu dan mulai hapalkan nama.
- Mulai acara dengan salam dan ucapan terimakasih atas kehadiran para kader.
- Perkenalkan diri (nama, organisasi tempat kerja: tempat kita tinggal, status pernikahan dan jumlah anak).

Sampaikan pesan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk belajar bersama tentang air minum.

- Pertanyaan awal: Apakah undangan mendadak? Siapa yang menyampaikan undangan? Mulai identifikasi yang agak enggan bicara.
- Selenggarakan permainan memperkenalkan diri yang dapat diikuti partisipan secara nyaman (partisipan memilih pasangan yang tidak dikenal dan mengenalkan nama, asal, jumlah anggota keluarga, dan kesukaannya)

**Komponen 2: Dorong partisipasi individual**

- Pertanyaan pertama: tanyakan kondisi kesehatan anak-anak dan suami. Ajak partisipan menjawab bergiliran.
- Pertanyaan kedua: tanyakan sakit apa yang diderita akhir-akhir ini. Ajak partisipan untuk menjawab bergiliran. Bila diare tidak muncul, tanyakan sakit pada anak kecil anggota keluarga mereka (anak atau cucu-cucu mereka).
- Gali lebih jauh cerita partisipan tentang diare/kolera/tipus/sakit perut dengan pertanyaan apa yang menjadi penyebab-penyebabnya. Tunjuk-



kan sejumlah gambar penyebab diare dan klarifikasi bersama gambar-gambar itu agar semua memiliki persepsi yang sama.

- Bagikan kertas yang berisi berbagai macam gambar penyebab diare. Minta masing-masing partisipan menandai gambar yang merupakan penyebab diare.
- Ulangi bahwa salah satu sebab adalah air yang diminum (kemungkinan besar itu adalah salah satu jawaban partisipan). Tanya bagaimana partisipan menilai kualitas air minum. Apa kriteria air minum yang bagus? Tulis di kertas plano dan klarifikasi pada partisipan.

### Komponen 3: Refleksi bersama 1

- Munculkan dua gelas berisi air. Satu air bening dan satu lagi air kecoklatan. Minta partisipan memilih mana yang lebih bagus untuk diminum? Bagikan satu kertas kecil berwarna dan minta partisipan meletakkan didekat gelas mana yang dia pilih.
- Hitung jumlah kertas dan tunjukkan

kecenderungan pilihan partisipan.

- Tunjukkan dengan cara membuat dua macam air di atas. Air bening adalah air mentah. Sementara, air kecoklatan adalah air matang yang diberi air coklat kopi. Minta partisipan memilih dengan meletakkan kertas.
- Kembali lagi ke kertas plano berisi catatan tentang kriteria. Minta partisipan untuk meninjau kembali, apa yang perlu diperbaiki, ditambah, atau dikurangi?
- Tuliskan kriteria baru (air minum harus diolah secara benar seperti merebus).

### Komponen 3: Refleksi bersama 2

- Minta partisipan mengelilingi kompor. Demonstrasikan: air mentah yang ada dipanasi direbus dan ketika sudah ada gelembung, matikan langsung. Tanyakan, apakah air yang sudah direbus baik untuk diminum? (Jawabannya kemungkinan besar adalah tidak). Tanyakan kenapa? Balik lagi ke kertas plano berisi kriteria air minum yang bagus. Tanyakan apakah perlu ditambah atau diubah? Tulis tambahan atau perubahannya.
- Sampaikan pesan tentang tenggat waktu menunggu air yang tengah mendidih, yakni 1-3 menit.
- Lanjutkan merebus sampai mendidih antara 1-3 menit. Setelah itu, matikan api dan biarkan air mendingin. Tanyakan apakah mereka bersedia meminum air yang direbus itu sambil menciduk air dengan cangkir dan tangan menyentuh air. Tanyakan kenapa? Balik lagi ke kertas plano berisi kriteria air minum yang bagus. Tanyakan apakah perlu ditambah atau diubah? Tulis tambahan atau perubahannya.

### Komponen 3: Refleksi bersama 3

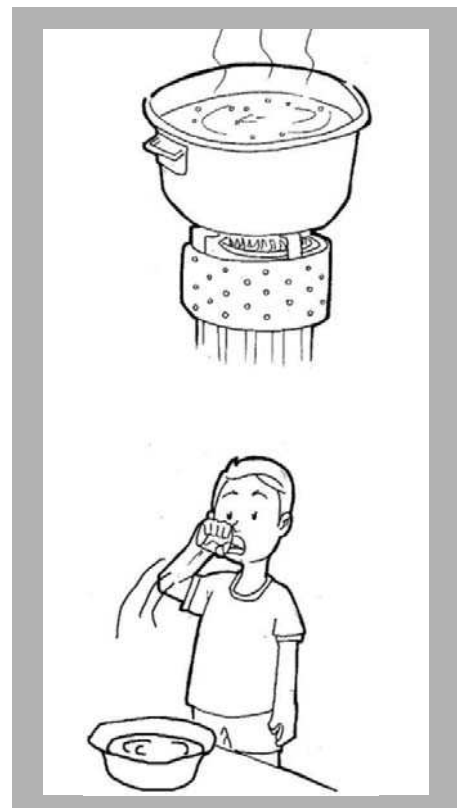
- Tunjukkan gambar-gambar tentang cara membuat air minum (merebus, *sodis-solar disinfection*, filter keramik, klorinasi). Ceritakan bagaimana metode-metode itu

dilakukan.

- Praktikkan aplikasi metode-metode itu.
- Diskusikan bagaimana metode-metode itu dapat membunuh kuman. Tuliskan hasil diskusi di kertas plano.
- Ajak partisipan untuk rehat kopi dan makanan ringan.

### Komponen 4: Perkuatan ingatan bersama

- Tanyakan pada partisipan, apa hal yang telah dipelajari? Metaplan digunakan pada saat partisipan merasa nyaman atau fasilitator dapat membantu mencatatkan.
- Lemparkan pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang dipelajari dan berikan hadiah bagi yang dapat menjawabnya. Usahakan agar semua partisipan kebagian.
- Sampaikan leaflet atau brosur berisi cara, data/fakta terkait metode-metode pembuatan air minum yang benar dan penyimpanannya.
- Sampaikan terimakasih. ■



# ECOPLAS

## Tas Ramah Lingkungan dari Singkong

**P**ersoalan sampah tak semata terkait soal kuantitas atau banyaknya tumpukan sampah. Namun mencakup juga kualitas atau jenis sampah. Kebanyakan sampah keluarga, khususnya dari jenis sampah anorganik, adalah berupa plastik pembungkus makanan yang dikonsumsi setiap hari.

Seperti yang sudah diketahui masyarakat, plastik adalah bahan yang sangat sulit terurai. Sementara setiap keluarga tidak bisa terlepas dari sampah plastik setiap harinya. Untuk itu perlu ada solusi dan tidak sekedar bagi para konsumen (masyarakat), namun juga para produsen (pengusaha) agar menghindari atau mengurangi penggunaan plastik sebagai alat pembungkus produk tertentu.

Salah satu tindakan mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan pemakaian produk plastik ramah lingkungan. Salah satu LSM Indonesia yaitu Dana Mitra Lingkungan (DML) telah meluncurkan produk plastik ramah lingkungan bernama Ecoplas. Sebelumnya Ecoplas ini bernama BioBag yang telah terlebih dahulu dikenal masyarakat.

### Ramah Lingkungan

Ecoplas adalah kantong ramah lingkungan yang merupakan inovasi baru dengan rancangan yang menarik dan harga terjangkau yang dibuat dengan menggunakan bahan resin BE+. Tas jenis ini diproduksi dengan penghematan bahan bakar/energi.

BE+ atau *Biodegradable Resin* adalah resin baru yang dikembangkan dan diciptakan di Indonesia oleh putra Indonesia yang mengandung 50 persen tepung singkong Indonesia beserta sumber-sumber alami lain yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui. Resin BE+ sudah dipatenkan dan diharapkan dapat menjadi pilihan alternatif selain resin-resin lain yang sudah dikenal masyarakat.

Research Management Coordinator DML Eko Junaedi kepada **Percik** mengatakan, tas plastik pada umumnya memerlukan waktu 1000 tahun untuk terurai, sementara Ecoplas hanya memerlukan waktu 10 pekan untuk terurai dalam tanah tropik.



Foto: Bowo Leksono

"Hal ini berdasarkan laporan tes yang dilakukan Sucofindo/SGS," tuturnya.

### Pemasaran Ecoplas

DMI menyediakan dua tipe Ecoplas yaitu *die cut* dan *soft loop*. Terdapat perbedaan ketebalan dan harga pada kedua tipe tersebut. *Soft loop* lebih tebal dan pada bagian pegangan (*handle*) lebih kuat dari *die cut*. Sementara harga untuk tipe *die cut/pack* (isi 50 pcs) adalah Rp 42.000 dan tipe *soft loop/pack* (isi 50 Pcs) Rp 60.000.

Spesifikasi Ecoplas yaitu ukuran: 39,5cm x 31cm x 11cm (P x L x *gussets*/lipatan bawah). Berat: 1,1 kg/*pack* atau 22 gr/*pcs*. Tas ramah lingkungan ini dapat diperoleh melalui Dana Mitra Lingkungan dengan menghubungi nomor telepon (021) 724.8884.

Menurut Eko, Ecoplas dapat dikirim ke seluruh wilayah di Indonesia. "Ongkos kirim akan ditambahkan pada harga Ecoplas yang disesuaikan dengan jarak dan pilihan prioritas pengiriman," ungkapnya.

Eko mengatakan, saat ini tidak ada yang bisa melarang orang menggunakan plastik sebagai bahan yang tidak mudah terurai. "Untuk itu perlu ada solusi, yaitu menciptakan plastik yang mudah terurai," jelasnya.

Dengan menggunakan Ecoplas atau kantong ramah lingkungan lainnya, berarti kita turut berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan sekitar kita. ■ BW

# Membuat Konservasi Air di Sindang Kahuripan

**S**iapa tak mengenal **Ully Sigar Rusady**? Perempuan yang juga pelantun lagu-lagu balada ini sudah lebih dari 30 tahun berkiprah di bidang lingkungan hidup. Segudang pengalaman dan penghargaan pun dikan-tonginya.

Kepedulian kakak kandung aktris berparas ayu Paramitha Rusady ini terlihat ketika mendiri-kan Ya-yasan

Garuda Nusantara (Gabungan Rumpun Pemuda Nusantara) pada 14 Februari 1985. Yayasan ini merupakan wadah kreativitas remaja dengan pengabdian pada alam dan lingkungan.

## Program Konservasi Air

Sudah puluhan program dijalankan Yayasan Garuda Nusantara, mulai dari diklat, posko relawan, perlombaan, hingga program konservasi. Sudah banyak wilayah di Nusantara ini yang menjadi obyek konservasi yang dilakukan Ully dan teman-temannya.

Saat ini, Ully Hary Rusady (nama Hary diambil dari suaminya) sedang konsentrasi pada konservasi air di wilayah Sindang Kahuripan yang terletak di Kawah Merah Gunung Pancar, Kampung Cimandala, Karang Tengah, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Lokasi konservasi ini seluas kurang lebih 30 hektar tepat di kaki dua buah gunung, yaitu Gunung Astana dan Gunung Pancar, Bogor. "Gunung itu menara air kita, menara air bagi bumi, karena air berasal dari pegunungan.


Karena itu, sangat penting untuk kita melindungi ekosistem pegu-

nungan," ungkap Ully mengawali perbin-cangan di kantor redaksi **Percik** sesuai menghadiri penganugerahan Kalpataru di Istana Negara, 5 Juni 2008.

Agar kelestarian ekosistem pegu-nungan tetap terjaga dan ancaman keru-sakannya dapat dikurangi, ujar Ully, di-perlukan adanya suatu pengelolaan yang terpadu dari seluruh kalangan masya-rakat desa dan kota. "Tak terkecuali masyarakat kota-kota besar sangat diha-rapkan partisipasi aktifnya dalam me-lestarikan ekosistem pegunungan sebagai kawasan hulu, mengingat hutan pegu-nunganlah yang membuat masyarakat luas menikmati pasokan air bersih," tutur penerima Global 500 Award dari PBB tahun 2007 yang gemar memakai ikat kepala.

Sebagai areal percontohan, kurang lebih 11 tahun silam, Yayasan Garuda Nusantara menetapkan kawasan atau lokasi Sindang Kahuripan sebagai tempat merealisasikan program-program kon-servasi air, alam dan lahan-lahan kurang terawat.

Dilandasi hasil penelitian dan penga-matan khusus, program ini selaras de-ngan program-program dari Pemerintah



**Ully  
Sigar  
Rusady**

Provinsi Jawa Barat khususnya dan sesuai dalam menjalankan program-program penghijauan untuk konservasi lahan dan air sehubungan banyaknya bukit dan lahan gundul yang dapat menimbulkan tanah longsor dan banjir.

"Kawasan konservasi alam Sindang Kahuripan merupakan areal pegunungan yang sangat luas," kata perempuan bernama kecil Rulany Indra Gartika ini. Dengan program-program penghijauan berkala di kawasan ini, lanjut Uly, diharapkan dapat melestarikan air dan mata air di kawasan hulu (DAS), sekaligus dapat turut serta mengurangi dampak pemanasan bumi (*global warming*) yang sedang melanda dunia.

### Kegiatan di Sindang Kahuripan

Menurut Uly, tujuan dari konservasi di Sindang Kahuripan ini selain menghidupkan lahan-lahan kritis dan kurang terawat di pegunungan demi mengatasi tanah longsor ini, juga untuk melestarikan air dan mata air di kawasan hulu (DAS). "Sekaligus mengajak peran serta masyarakat lokal dan kota melalui diklat-diklat dalam melestarikan sumber daya alam yang berkelanjutan," tutur pendiri dan pimpinan Yayasan Sindang Kahuripan.

Beragam kegiatan dilakukannya di Sindang Kahuripan antara lain, konservasi ekosistem pegunungan, konservasi hutan, lahan, air dan mata air, serta peningkatan SDM petani di seputar hutan.

Sementara kegiatan yang dalam perencanaan, tutur Uly adalah pembuatan sarana-sarana atau balai pendidikan dan pelatihan kesehatan dan lingkungan hidup, sarana kesehatan, saluran dan penampungan air,



Para anggota yayasan Garuda Nusantara di lokasi Sindang Kahuripan. Foto: Istimewa.

jalan yang ramah lingkungan, dan tempat ibadah/mushola alam.

"Kita berharap kelak akan terbentuk masyarakat yang bersahabat dengan alam serta peduli pada alam dan lingkungan secara nyata," ujar pegiat lingkungan kelahiran Garut, 4 Januari 1952 ini.

### Paket Sahabat Alam

Uly bersama yayasan yang dipimpinnya tidak hanya menjadikan Sindang Kahuripan sekedar tempat konservasi untuk kepentingan masyarakat setempat dan kelompoknya. Lebih dari itu, ia mengajak masyarakat seluas-luasnya dari berbagai kalangan untuk turut menikmati dan belajar di alam terbuka.

Foto: BW



Ajakan Uly ini dikemas dalam sebuah kegiatan bernama Paket Sahabat Alam. "Paket kegiatan di alam terbuka ini dapat diikuti berbagai kalangan masyarakat

yang peduli terhadap alam dan lingkungan. Paket ini mengangkat wawasan konservasi alam dan lingkungan hidup dengan lokasi kegiatan di Sindang Kahuripan," tutur penerima Penghargaan Kalpataru dari Menteri Negara Lingkungan Hidup tahun 2001.

Kawasan Sindang Kahuripan memiliki *landscape* berkontur naik dan turun yang di kelilingi perbukitan, lereng, lembah, hutan pinus dengan *terasering* sawah, menjadikan tempat ini semakin memesona, unik dan indah. Lokasi ini tepat sebagai sasaran kegiatan konservasi alam dan lingkungan hidup melalui wisata pendidikan (eko turisme).

Sudah banyak kalangan yang mencoba berwisata, menggali pengalaman, sekaligus belajar di alam terbuka. Kebanyakan dari mereka adalah para pelajar dan mahasiswa, organisasi pecinta alam, LSM, peneliti hingga keluarga.

Menurut Uly, program Sahabat Alam ini merupakan wujud nyata dari kepedulian seluruh kalangan terhadap usaha-usaha pelestarian alam dan lingkungan secara nyata. "Kami mempunyai tujuan bagaimana menjadikan kegiatan ini sebagai tren dan gaya hidup dalam mencintai dan bersahabat dengan alam," ujar anggota Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru dan Kehati Award. ■ Bowo Leksono

# Kunjungan Delegasi Republik Demokratik Timor Leste ke Indonesia

Pelaksanaan program *Community Lead Total Sanitation (CLTS)* yang kemudian diadopsi menjadi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Indonesia, ternyata menarik beberapa negara lain mengunjungi Indonesia untuk bertukar pengalaman. Jika tahun 2007, delegasi pemerintah India, Pakistan dan Bangladesh telah berkunjung ke Jawa Timur, Indonesia, maka pada tanggal 20-25 April 2008 delegasi Timor Leste yang berkesempatan untuk mempelajari STBM langsung pada beberapa desa di Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Rombongan berjumlah 25 orang yang terdiri dari pejabat lintas sektor, LSM, dan perwakilan negara donor yang dipimpin Menteri Muda Listrik, Air, dan

Tata Kota Januario Perreiro da Costa.

Rombongan diterima langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan dengan didampingi Bupati Muara Enim. Pada kesempatan kunjungan tersebut, delegasi berkesempatan berdialog langsung dengan masyarakat. Para tamu terlihat sangat antusias dengan sambutan dari masyarakat yang demikian meriah. Bahkan di tiap desa, masyarakat menyambut dengan tarian dan kasidahan.

Setelah dua hari menyambangi lokasi keberhasilan penerapan program *Community Lead Total Sanitation (CLTS)* yang kemudian diadopsi menjadi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, delegasi Republik Demokratik Timor Leste mengunjungi Kabupaten Tangerang, Provinsi

Banten pada Rabu, 23 April 2008.

Pada kunjungan di Kabupaten Tangerang, delegasi diterima langsung Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang. Sempat pula digelar dialog kedua-belah pihak yang dipimpin langsung Bupati Ismet Iskandar.

Kunjungan ke Kabupaten Tangerang dimaksudkan untuk mendapatkan pembelajaran implementasi kegiatan sanitasi dan higienitas yang dilaksanakan bersama pemerintah dengan LSM.

Januario mengakui menemui banyak kesulitan dalam membenahi bidang air bersih dan sanitasi di negaranya. "Karena itu, kami perlu datang ke Indonesia yang telah berhasil dalam menerapkan CLTS untuk melihat langsung dan mengambil pengalaman masyarakat di Indonesia," ujarnya.

Menurut Ismet, rendahnya derajat kesehatan merupakan pokok permasalahan daerah yang menjadi permasalahan bersama. "Kami telah membangun pola kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam rangka menurunkan insiden kejadian penyakit yang berbasis lingkungan," tuturnya.

## Kunjungan MCK Plus<sup>++</sup> di Kecamatan Sepatan

Seusai berdialog, rombongan bergerak ke Kecamatan Sepatan, tepatnya di Kampung Pisangan Periuk untuk menyaksikan MCK Plus<sup>++</sup> dengan teknologi pengolahan air limbah *devats* dan biogas digester.

Tak jauh dari lokasi MCK, rombongan delegasi menyaksikan praktik cuci tangan pakai sabun (CTPS) yang dilakukan pelajar sekolah dasar. Tak hanya itu, rom-



Delegasi Republik Demokratik Timor Leste saat diterima Bupati dan Wakil Bupati Tangerang.  
Foto: Bowo Leksono

bongan disugui lomba *jingle* hidup sehat dan hiburan musik dangdut.

Keesokan harinya, Kamis, 24 April 2008, delegasi Timor Leste bersemuka dengan *stakeholder* dan berbagai program berkenaan sektor air minum dan penyehatan lingkungan di kantor Bappenas untuk kembali bertukar pengalaman dan informasi.

### Program CTPS di Tangerang

Tepuk tangan riuh ibu-ibu di Desa Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten mengiringi penampilan kelompok-kelompok penyanyi *jingle* 'kebiasaan hidup bersih dan sehat' di sebuah panggung. Penampilan mereka sekaligus menyambut kunjungan delegasi Timor Leste.

Sebelumnya, anak-anak sekolah dasar secara massal mempraktikkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun (CTPS). Semua kegiatan itu merupakan bagian dari kampanye CTPS hasil dari pendampingan CARE International Indonesia.

*Health Environment Project Manager CARE* Marcel Beding kepada **Percik** memaparkan program ini bertujuan menurunkan angka malnutrisi pada balita, ibu hamil dan ibu menyusui serta angka kejadian diare pada keluarga terutama balita. "Di Tangerang bekerjasama dengan pemerintah Kota Tangerang pada 12 Kelurahan dan Kabupaten Tangerang pada 8 Desa, 2 diantaranya berada di wilayah Kecamatan Sepatan yakni Desa Sarakan dan Desa Kayu Agung dengan sumber dana dari USAID," tuturnya.

Program yang dimulai Februari 2006 ini mempunyai tiga strategi utama yaitu gizi masyarakat, kesehatan lingkungan dan pelayanan kesehatan. Khusus untuk kegiatan kampanye cuci tangan pakai sabun, kata Marcel, kegiatan ini dilakukan setelah memberikan pelatihan kepada kader-kader dan anggota komite kesehatan sampai mempunyai kemampuan fasilitasi yang baik, pelatihan tentang teknik membuat proposal yang baik dan pelatihan tentang *event organizer*.

Program CTPS ini melakukan *road show* ke sekolah-sekolah bekerja sama dengan seksi UKS pada bagian Promkes,

**Program CTPS ini melakukan *road show* ke sekolah-sekolah bekerja sama dengan seksi UKS pada bagian Promkes, Dinas Kesehatan masing-masing.**

Dinas Kesehatan masing-masing. Dengan memberikan kepercayaan penuh kepada kader-kader dan komite didampingi pihak Puskesmas, kecamatan dan kelurahan serta fasilitator dari CARE. Total terdapat 24 sekolah dasar pada 12 Kelurahan di Kota Tangerang dan 40 sekolah dasar pada 8 desa di Kabupaten Tangerang.

### Kendala

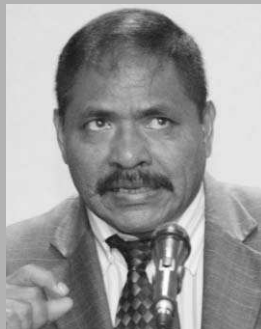
Menurut Marcel, kendala yang dihadapi berupa kurangnya infrastruktur seperti sumber air bersih dan tempat-

tempat cuci tangan yang higienis di sekolah-sekolah maupun di lingkungan keluarga atau di lingkungan RT. "CARE mendanai pengadaan material infrastruktur dan masyarakat menyiapkan lahan, kontribusi minimal 5 persen bahan dan tenaga untuk pembangunannya bagi kegiatan yang prioritas dengan pola padat karya pangan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Marcel mengatakan, CARE juga melakukan pendampingan atau memfasilitasi pelaksanaan musrembang desa/kelurahan agar kebutuhan infrastruktur lainnya dapat terakomodir dalam pembiayaan pemerintah (APBD). "Pemerintah Kabupaten Tangerang pada tahun anggaran 2008 menganggarkan tiga tempat CTPS per sekolah pada 40 SD bersama kegiatan kampanye".

Sampai saat ini, sekitar 90 persen masyarakat telah sadar bahwa dengan berperilaku hidup bersih dan sehat akan terhindar dari berbagai penyakit. Semoga tak terulang kembali wabah diare di wilayah Tangerang. ■ **BW**

## WAWANCARA BERSAMA MENTERI MUDA LISTRIK, AIR, DAN TATA KOTA JANUARIO PERREIRO DA COSTA



**Apa pandangan Anda selama kunjungan ke Indonesia?**

Saya merasakan bagaimana masyarakat Indonesia sendiri bisa mengorganisir dan menyosialisasikan hidup bersih sehingga masyarakat bisa merubah perilakunya. Ini yang saya pikir tidak mudah. Seperti yang terjadi di Muara Enim, hanya dalam waktu 24 hari mampu membuat jamban secara mandiri. Perlu kerja keras dan betul-betul meluangkan waktu untuk melakukan aktifitas itu.

**Kondisi sektor air minum dan sanitasi di Timor Leste sendiri seperti apa?**

Untuk sanitasi baru sekitar 40 persen dan kebutuhan air bersih baru terenuhi 50 persen. Kami mempunyai penduduk tidak lebih dari 1 juta, yaitu sekitar 945 ribu jiwa. Hanya saja perilaku masyarakatnya susah apalagi terkadang terjadi kerusakan. Itu susah. Untuk itu, bagaimana kami dapat mengambil hikmah dari pengalaman yang ada di Indonesia.

**Setelah kunjungan ini, apa yang hendak Anda lakukan?**

Setelah ini, apa yang kami lihat dan alami selama berkunjung ke Indonesia, akan kami terapkan sebagai pembelajaran bagi masyarakat di Timor Leste. Ini satu pengalaman yang sangat berharga. ■ **Bowo Leksono**

# Kota yang Tak Berkelanjutan

**S**eminar sehari pada 24 April 2008 bertema "Kota yang Berkelanjutan: Tantangan bagi Indonesia dan Swedia" yang diselenggarakan Kedutaan Besar Swedia bekerjasama dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan dukungan SIDA (*Swedish International Development Corporation Agency*), SENSE (*Swedish Environmental Secretariat for Asia*) dan SBA (*Swedish Business Association*) telah mengingatkan kita pada kondisi perkotaan di Indonesia.

Kita selama ini terfokus pada masalah kemacetan, polusi lingkungan, dan permasalahan detil didalamnya sehingga kita, sadar atau tidak, mulai terlepas dari kerangka besar permasalahan perkotaan di Indonesia.

Seringkali penanganannya dilakukan tanpa melihat keterkaitan dengan isu lain atau isu yang lebih besar. Kalimat pembangunan perkotaan yang terpadu akhirnya hanya menjadi jargon tanpa makna. Tidak ada tindak lanjut yang nyata. Kalaupun ada, sebagian besar hanya sebatas rencana tindak lanjut tanpa ada pihak yang bertanggung jawab untuk mengawal sampai dituntaskannya rencana tersebut.

Sadarkah kita bahwa kondisi perkotaan di Indonesia semakin terpuruk dengan berbagai masalah seperti banjir, kemacetan, daya dukung lingkungan yang rendah, penyediaan infrastruktur yang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya?

## Fakta Ketidakberlanjutan Kota di Indonesia

Kota seberapapun kecilnya, akan berkembang sampai suatu saat menjadi megapolitan. Contohnya Jakarta, Surabaya, Makassar, Bandung dan kota-kota lainnya. Pada dasarnya, kota-kota di Indonesia, dengan berbagai variasi karakteristiknya, mempunyai permasalahan yang kurang lebih sama, yaitu pembangunan kota yang acak (*urban sprawl development*).

Ibarat membangun rumah, letak dapur terpencar, demikian juga dengan kamar mandi, ruang tidur dan lain sebagainya. Tata kota yang kita miliki saat ini tidak lebih dari sekedar pemanfaatan ruang yang sporadis. Dari fakta ini, sudah dapat diketahui fungsi-fungsi yang tidak berjalan sebagaimana harusnya. Peraturan dan kebijakan yang tidak diaplikasikan dengan baik, dan fungsi pengawasan dan pengendalian yang dapat dikatakan tidak ada.

Dalam hal penyediaan layanan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL), kendala yang sama terjadi juga. Letak permukiman yang tidak terkonsentrasi membuat sulitnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sektor AMPL. Belum lagi adanya masalah persampahan di perkotaan, penyediaan sarana pengelolaan sampah juga seringkali mengalami hambatan.

Ruwetnya sistem transportasi publik di sebagian besar perkotaan di Indonesia pada dasarnya diawali dengan kesalahan yang sama dengan persoalan tata kota di atas, yaitu peraturan



Foto: Bowo Leksono

dan kebijakan yang tidak jelas ditambah tidak adanya pengawasan dan pengendalian.

Fakta berikutnya berkaitan dengan lingkungan. Berlawanan dengan fungsinya sebagai pendukung utama keberlanjutan suatu kota (paru-paru kota), lingkungan seringkali diabaikan. Adanya pemikiran bahwa kita harus melestarikan lingkungan agar tidak terdegradasi lebih parah menjadi terbalik. Perlu diperhatikan bahwa lingkungan apapun kondisinya, baik rusak atau gersang, akan tetap ada. Dilain pihak, manusialah yang tidak akan dapat bertahan dengan lingkungan yang sudah rusak.

## Langkah ke Depan

Berbagai fakta rendahnya tingkat keberlanjutan kota tidak hanya berlaku di perkotaan di Indonesia saja, tetapi di berbagai belahan dunia, termasuk negara yang sudah maju. Bedanya, negara maju sudah melakukan tindakan intensif mengenai hal tersebut. Di Jerman, konon pernah dilakukan evakuasi penduduk di salah satu kota secara besar-besaran untuk dilakukan penataan ulang kota.

Pembenahan tata kota mau tidak mau harus dilaksanakan secara bertahap. Melihat apa yang terjadi di Indonesia, diperlukan sebuah rencana induk tata kota baru yang didukung peraturan, pengawasan dan pengendalian yang sangat tegas.

Usaha-usaha tersebut di atas bukannya tidak dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi seringkali yang menjadi masalah adalah caranya. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan melalui pengalaman, pendanaan dan sebagainya sangat diperlukan.

Dengan demikian isu terbesar saat ini adalah keberanian melakukan langkah tersebut, bukan sekedar komitmen. Sehingga permasalahan perkotaan tidak sekedar menjadi pengetahuan umum, tetapi suatu tantangan untuk diatasi. Mungkin akan terjadi kesalahan dalam proses pelaksanaannya, tapi kita tidak akan tahu sebelum hal itu dilakukan. ■ FW

# Toilet Kering untuk Permukiman Padat dan Wilayah Kurang Air

**S**alah satu kenyamanan hidup adalah ketika persoalan 'belakang' tidak lagi menjadi persoalan. Ada toilet, bersih, tidak harus mewah, dan mudah diakses. Demikian mungkin ukuran hidup yang ideal untuk dapat merasakan kenyamanan.

Namun, tak semua masyarakat berkesempatan dan mampu menikmati hidup ideal yang dimaksud. Masih banyak masyarakat seperti di permukiman padat penduduk maupun di wilayah yang cenderung kekurangan air, tidak terdapat toilet yang ideal bahkan bisa jadi tak ada toilet sama sekali.

Mereka buang air besar (BAB) di tempat-tempat terbuka. Sungai atau kebon, atau di toilet yang kotor dan kurang air. Tapi mereka tetap merasa nyaman. Ini persoalan perilaku, persoalan kebiasaan masyarakat.

Seorang peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr Neni Sintawardani, berhasil menciptakan dan mengenalkan teknologi sederhana berupa toilet kering atau yang kerap dikenal sebagai bio toilet.

"Prinsip toilet kering ini ya toilet yang tanpa air. Jadi bahannya terbuat dari serbuk kayu sebagai matrik untuk menangkap kotoran untuk kemudian diolah di tempat atau di cubluk yang terbuat dari baja," ungkap Neni saat ditemui **Percik** di tempat kerjanya.

## Potensial untuk Permukiman Padat

Toilet kering ini sangat potensial untuk dikembangkan pada permukiman padat penduduk. Karena di lokasi penduduk padat biasanya sarana sanitasi dan air bersih sangat kurang. Toilet jenis ini juga tepat diterapkan pada daerah kering atau daerah yang cenderung kekurangan air.

Dari sisi sasaran, menurut Neni, toilet



Dr Neni Sintawardani. Foto: Bowo Leksono

tanpa air ini diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah. "Kebutuhan air bersih untuk masyarakat menengah ke bawah sangat banyak, namun kemampuannya yang kurang," tutur alumni Universitas Hohenheim, Stuttgart, Jerman ini.

**TUJUAN PENGEMBANGAN BIO-TOILET (BT):**

- Pengembangan sistem pengolahan limbah (smpadat) di tingkat dini agar dilaksanakan dengan konsep berwelaspliat
- Pembuatan strategi penanganan limbah WC Menstr Air (BT) yang sudah teruji di Indonesia sebelumnya menggunakan teknologi pada lokasi air dan material lainnya.
- Efisiensi penggunaan air bersih.
- Prosedur yang memperhatikan yang lebih berdamai lingkungan.

**PRINSIP DASAR BT:**

Rata-rata kebutuhan air bersih penduduk daerah padat untuk BAB/BM: 20 liter (80%) dan toilet, sangat mahal.

**Pengembangan prinsip WC Kering**

- Tidak diperlukan air untuk mengalirkan limbah (mengalirator)
- Tidak menggunakan listrik
- Tidak menimbulkan bau
- Prinsip tanpa limbah serbuk kayu/limbah dari BT bisa dimanfaatkan lebih lanjut sebagai kompos atau untuk material komposit.
- Tidak ada bau tidak sedap

**MANFAAT TEKNOLOGI BT:**

- Hemat air
- Hemat sarana penunjang (pipa saluran)
- Manfaat lingkungan dan ekonomi (dari serbuk perkayu)

**Tanaman Jarak**

- Porositas tinggi (85-90% ruang udara)
- Penyusutan air (35-40%)
- Tingginya kemampuan
- Kapasitas dan tidak mudah rusak berakarnya
- Mudah ditanam secara alami

Foto: Istimewa

Neni bersama timnya menerapkan penggunaan toilet kering di daerah padat penduduk di Kiara Condong, Kota Bandung sejak lima tahun silam. "Tidak mudah memang, karena yang paling sulit adalah merubah perilaku yang menjadi tantangan terbesar," jelas Kepala Biro Kerjasama dan Pemasarakan Iptek LIPI ini.

## Awal Penciptaan Toilet Kering

Awalnya pada 1998, Neni Sintawardani menciptakan alat sederhana untuk pengolahan sampah dapur. Dengan sebuah kotak kecil yang dirancang sedemikian rupa, para ibu rumah tangga bisa langsung mengolah sampah sesuai memasak dengan cara memilah

sampah organik.

Baru pada 2003 penelitian merambah ke pengolahan limbah manusia yaitu dengan penciptaan toilet kering. "Dasar dari penciptaan toilet kering ini ya dari alat pengolahan sampah dapur yang sama-sama diolah menjadi pupuk organik," ujar Neni.

Neni mengakui, memang tidak murah untuk membuat toilet kering ini. Menurutny, satu bangunan toilet yang bisa dipergunakan untuk 40 orang per hari mencapai Rp 40 juta. Namun sudah tidak berhitung kerugian polutannya. "Kesan mahal ini memang pada bahan tabung baja atau logam untuk reaktornya," kata ibu dua anak ini.

Kesan mahal tentu akan bisa ditutup dengan melihat fungsi jangka panjang. Betapa jauh lebih mahal akibat-akibat dari buruknya sanitasi bila tidak dari sekarang mengatasinya. Sampai saat ini, apa yang diciptakan Neni belum banyak diterapkan karena membutuhkan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, yang mau berinvestasi dengan toilet kering. ■ Bowo Leksono

# Persiapan Sebelum Memasuki ISSDP Tahap II

Tak terasa program pengembangan sanitasi bernama *Indonesia Sanitation Sector Development Program* (ISSDP) telah berjalan selama kurang lebih dua tahun. Program ini akan memasuki tahap II pada pertengahan Mei 2008. Pada ISSDP Tahap I, banyak hal yang telah dilakukan dan dihasilkan terutama di kota-kota mitra. Terbentuknya Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi tingkat kota merupakan hasil upaya pembenahan kelembagaan dalam pengelolaan pembangunan sektor sanitasi di daerah.

Dokumen Buku Putih merupakan salah satu produk yang dihasilkan Pokja dengan fasilitasi ISSDP. Buku ini berisi gambaran umum kondisi sanitasi yang dapat diperbaharui setiap tahunnya untuk mengetahui perkembangan kondisi sanitasi kota. Dokumen lainnya adalah Strategi Sanitasi Kota (SSK) sebagai produk utama yang telah berhasil disusun Pokja Kota.

SSK memuat rencana tindak yang merupakan pertemuan antara pendekatan *top down* dan *bottom up*, dimana visi dan misi pemerintah kota dalam pembangunan sanitasi bertemu dengan kebutuhan nyata (*real demand*) masyarakat akan fasilitas sanitasi.

Adapun di tingkat pusat telah dihasilkan berbagai rekomendasi mendukung arah kebijakan nasional dalam pembangunan sanitasi di Indonesia. Rekomendasi ini meliputi bidang kelembagaan, hukum, dan pendanaan. Untuk menyinergikan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan sanitasi, ISSDP pada tahap I telah turut berperan dalam pembentukan Jejaring Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMPL).

Produk lainnya adalah strategi kam-



Diskusi kelompok review pelaksanaan ISSDP tahap I. Foto: Dok/ISSDP.

panye sanitasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sanitasi dan perilaku hidup sehat. Strategi kampanye ini terbagi lima desain berdasarkan kelompok sasaran, yaitu pengambil kebijakan di tingkat pusat, pengambil kebijakan di tingkat daerah, masyarakat umum, masyarakat miskin, dan sektor swasta. Strategi ini direncanakan akan diterapkan pada tahun ini sesuai agenda ISSDP tahap II.

Program ISSDP Tahap I telah memberikan masukan yang cukup signifikan dalam upaya pembentukan kerangka kerja pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan di kota-kota mitranya. Salah satu masukan tersebut adalah pentingnya peran provinsi dalam pengelolaan sanitasi sehingga pada pelaksanaan ISSDP

Tahap II, pendekatan program di tingkat provinsi akan dilakukan secara lebih intensif dengan porsi yang lebih besar.

Melalui peran provinsi ini diharapkan akan terjadi perluasan cakupan program ke kota-kota lain berupa replikasi ISSDP. Untuk itu, ISSDP Tahap II akan memberikan bantuan *advisory* secara lebih efektif kepada pemerintah provinsi. Bentuk fasilitas kepada pemerintah provinsi akan diwujudkan melalui serangkaian pelaksanaan peningkatan kapasitas, penelitian serta pendampingan sehingga mekanisme perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan sanitasi di tingkat provinsi dapat terbentuk dan terselenggara dengan optimal.

Adanya keterlibatan provinsi dalam

ISSDP Tahap II tentu saja perlu disiapkan dengan matang. Informasi yang komprehensif tentang ISSDP Tahap I dan rencana pelaksanaan ISSDP Tahap II perlu disampaikan kepada pemerintah provinsi.

Untuk mencapai maksud tersebut perlu dilakukan suatu lokakarya yang melibatkan Tim Teknis Pembangunan Sanitasi sebagai pengelola pembangunan sanitasi tingkat nasional, Pokja Sanitasi Kota yang selama ini menjadi mitra ISSDP, dan tentunya pemerintah provinsi sendiri.

Pada Lokakarya ini, Tim Teknis Pembangunan Sanitasi dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan ISSDP Tahap I secara komprehensif termasuk hasil-hasil yang telah dicapai, baik di tingkat pusat maupun kota. Kemudian dapat menyampaikan rencana besar ISSDP Tahap II terutama berkaitan dengan rencana perluasan program melalui replikasi.

Pokja Kota sebagai *stakeholder* daerah dapat menyampaikan pengalamannya dalam pengelolaan sanitasi selama

mengikuti ISSDP. Berbagai capaian dan tantangan selama dua tahun tentunya dapat menjadi salah satu referensi provinsi untuk terlibat dalam ISSDP yang akan datang.

Pada akhirnya, Lokakarya ini diharapkan dapat merangkum kembali peran provinsi dalam pengelolaan sanitasi perkotaan, merumuskan serta menyiapkan langkah-langkah operasional ISSDP Tahap II yang mencakup pembentukan kelompok kerja, penggalangan sumber daya serta penyediaan pendanaan, dan menyiapkan kriteria untuk pemilihan kota-kota mitra ISSDP Tahap II.

### Peran Provinsi dalam Pembangunan Sanitasi

Untuk pengembangan sanitasi di Indonesia, wewenang, peran dan fungsi masing-masing susunan pemerintahan perlu dikaji secara terperinci. Hingga saat ini, peran pemerintah provinsi belum optimal dalam penanganan program sanitasi. Pada sisi lain, kerangka kebijakan provinsi yang ada, belum menunjang pembangunan sanitasi.

Pemerintah provinsi dapat berperan sebagai penyelenggara pengembangan program sanitasi di daerah. Hal ini memungkinkan apabila berdasarkan kriteria urusan penyelenggaraan pemerintah, dampak pengembangan program sanitasi di daerah memiliki dampak yang bersifat lintas kabupaten/kota dan/atau regional, atau jika pengembangan program sanitasi di daerah yang bersangkutan akan lebih berdayaguna apabila ditangani pemerintah provinsi.

Untuk memperjelas pernyataan di atas, peranan pemerintah provinsi adalah menyelenggarakan pelayanan dasar di bidang sanitasi yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Dalam hal ini sanitasi dapat diartikan sebagai pelayanan dasar yang mengacu pada PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pada pasal 3 peraturan ini, disebutkan bahwa SPM disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam penyelenggaraan urusan wajib.

Peranan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pelayanan dasar sanitasi dapat dijalankan dengan dua cara, yaitu menyelenggarakan sendiri pembangunan sanitasi di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan atau menugaskan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan azas tugas pembantuan.

Selain itu diperlukan juga peran aktif provinsi untuk melancarkan mekanisme pengembangan sanitasi di daerah atau sinergitas peran provinsi dan kabupaten/kota. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengintensifan komunikasi dengan kabupaten/kota mengenai pengembangan program sanitasi. Tujuannya adalah membuat suatu pemetaan kebutuhan pengembangan sanitasi di kabupaten/kota yang dinaunginya. Peta kebutuhan pengembangan sanitasi dapat dikombinasikan dengan komitmen kabupaten/kota bersangkutan, sehingga target alokasi pengembangan sanitasi provinsi dapat lebih optimal. ■ Tim Sekretariat ISSDP



Bangunan toilet umum yang sederhana. Foto: Dok/ISSDP

# Dari Media Rakyat Hingga Pemasaran Sosial Suatu Strategi Komunikasi Kebijakan

**P**endopo Kecamatan Poncowarno, salah satu kecamatan di Kabupaten Kebumen, tampak semarak. Selama empat hari, 3-6 Maret 2008, digelar "Pelatihan Media Rakyat untuk Sosialisasi AMPL" yang difasilitasi Kelompok Kerja AMPL Kabupaten Kebumen bekerjasama dengan WASPOLA.

Pelatihan ini juga dalam rangka mempersiapkan 16 kecamatan yang pada tahun ini akan mendapat bantuan AMPL di desanya. Sesuai tema AMPL berbasis masyarakat maka pelatihan dilaksanakan di lingkungan terdekat dari masyarakat itu sendiri, karena dalam prosesnya akan banyak praktik di lingkungan warga setempat.

Pelibatan masyarakat langsung mendapatkan dukungan positif dari Bupati Kebumen Rustriningsih. "Potensi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan AMPL dan pelatihan ini harus dilanjutkan" katanya.

Pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk melibatkan masyarakat, termasuk kaum perempuan untuk berpartisipasi sejak awal perencanaan pembangunan AMPL termasuk sosialisasi dan membangun kesepakatan-kesepakatan yang dilaksanakan antarwarga sendiri.

Dalam pelatihan ini masyarakat menggali bersama pentingnya partisipasi semua pihak dalam keberlanjutan AMPL dan kuncinya adalah strategi komunikasi yang tepat sasaran sehingga membuat semua orang semangat untuk terlibat. Peserta diajak merancang media komunikasi dari hasil pemetaan isu, mendata potensi media yang bisa dilibatkan, kemudian menyeleksi media yang akan digunakan. Dipilihlah media dagelan (lawakan) yang dipentaskan di kecamatan, siaran iklan layanan AMPL di radio In FM, cerita bergambar atau cergam, poster dan iklan layanan televisi.

Kemudian dibuatlah naskah dan latihan sebelum diproduksi. Dengan didampingi tim WASPOLA dan tim media dari Studio Audio Visual PUSKAT Yogyakarta dibuatlah produksi program pendek. Disamping itu, pentas dagelan kesenian rakyat dan menayangkan hasil produksi media yang mereka buat di depan masyarakat.

Peserta mempraktikkan metode media kelompok untuk membangun diskusi yang dinamis, sehingga menjadi daya tarik untuk perbincangan warga. Dari hasil pelatihan, enam kecamatan merencanakan sosialisasi serentak yang akan dilakukan di masing-masing kecamatan dan menggunakan media-media AMPL yang telah mereka buat sendiri.

Sementara radio In FM dan Mas FM serta Ratih TV akan menayangkan hasil produksi kepada publik. Hal ini dilakukan dalam rangka persiapan penerimaan bantuan AMPL yang akan turun pada tahun ini. Disampaikan pentingnya forum Pokja AMPL ini dibentuk di tingkat kecamatan sehingga proses inte-



Para peserta pelatihan Media Rakyat untuk sosialisasi AMPL.

Foto: Dok/WASPOLA

grasi kegiatan dan pemberdayaan sampai di tingkat pemerintahan yang terkecil di masyarakat.

## Membangun Masyarakat yang Peduli AMPL

Pada 19-21 Februari 2008, di Pangkal Pinang juga diselenggarakan pelatihan kelanjutan dari *Workshop* Strategi Komunikasi AMPL yang menghasilkan Strategi Advokasi Penyelamatan Lingkungan untuk Air Minum.

Acara ini dibuka Setda Provinsi Bangka Belitung Imam Mardi Nugroho yang menyatakan komunikasi adalah kunci penting dalam pembangunan AMPL. "Keterampilan ini yang justru sering tidak diperhatikan dalam pembangunan AMPL yang berorientasi pada fisik dan lupa menekankan pada perubahan perilaku," ujarnya. Imam berharap dari pelatihan ini akan dihasilkan strategi yang tepat sasaran sehingga banyak pihak terlibat dalam menyelamatkan lingkungan Bangka Belitung untuk kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan di Bangka Belitung, berkaitan dengan penambangan timah yang kian marak tanpa memperhatikan konservasi lingkungan sehingga mengakibatkan penurunan mutu kualitas air maupun mulai mengurangi kuantitasnya. Masyarakat sekitar sudah mulai merasakan akibatnya dan terganggu kesehatannya. Maka

tema-tema kerusakan lingkungan menjadi judul dari empat produksi media yang mereka buat antara lain foto esai untuk surat kabar, artikel, cergam, iklan layanan di radio dan televisi (video).

Tema-tema produksi yang dilakukan dengan logat bahasa daerah ini dibuat oleh peserta sendiri, dari *brainstorming* ide, penulisan naskah, pemotretan dan memainkan peran.

Acara yang berkesan menurut peserta adalah kunjungan ke kantor media setempat yaitu Babel Post dan Radio Republik Indonesia (RRI) Bangka Belitung. Selain ingin menambah wawasan dalam hal media massa, kunjungan ini juga dimaksudkan untuk membangun hubungan baik dan kerjasama dengan media massa setempat untuk advokasi AMPL. RRI menawarkan kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak, karena permasalahan air minum akhir-akhir ini menjadi isu hangat di publik.

Sedangkan Babel Post termasuk media yang peduli dengan masalah AMPL. Mereka merencanakan penulisan artikel berseri AMPL dalam edisi-edisinya. Demikian juga video dan cergam yang dibuat akan dipasang di situs Babel Post sehingga bisa disimak publik lebih luas. Hal lain yang dirasa penting adalah perintis-an forum advokasi masyarakat peduli AMPL di Bangka Belitung, sehingga apa yang dilakukan dalam *workshop* ini akan terus berlanjut dan adanya sinergi dari berbagai pihak.

### **Inisiatif Melibatkan Berbagai Pemangku Kepentingan AMPL**

Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu provinsi yang bersemangat dalam menyosialisasikan AMPL di wilayahnya. Dengan menggunakan dana APBD, Pokja AMPL Provinsi Sumatera Barat berinisiatif menyelenggarakan Strategi Pemasaran AMPL melalui Strategi Komunikasi yang Efektif dengan mengundang kabupaten/kota baik yang sudah memulai program AMPL maupun yang baru akan memulai program AMPL. Acara diselenggarakan di Kota Padang, pada 25-27 April 2008.

Acara ini sekaligus sebagai peringatan



Bupati Kebumen Rustriningsih saat beraksi di depan kamera. Foto: Dok/WASPOLA.

Hari Air Dunia dan *Launching* Tahun Sanitasi Indonesia 2008 yang dilanjutkan acara *talkshow*. Terungkap permasalahan AMPL ternyata bukan permasalahan fisik, justru permasalahan perilaku dari berbagai pihak tidak hanya masyarakat tetapi juga pemerintah dan pihak-pihak lain. Rendahnya tingkat partisipasi dan pengelolaan yang tidak berkelanjutan dikarenakan saat ini sosialisasi masih menggunakan model lama yang terlalu satu arah. Di sisi lain kebiasaan yang turun temurun susah diubah.

Dari strategi yang dirancang, setiap sektor mempunyai target *audiens* yang dirasa berpengaruh dalam berbagai persoalan yang muncul, antara lain lemahnya lembaga pengelola air di tingkat nagari. Maka dibuat drama pendek di radio dengan pesan kunci "lembaga kuat, talago sehat".

Sedangkan dari kelompok sampah sepakat bahwa target adalah ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga dan kelompok perempuan. Ada dua poster yang dihasilkan dengan tema membuang sampah sembarangan akan mendatangkan bibit penyakit dan anda menzalimi tetangga dan lingkungan sekitar.

Sedangkan dikelompok limbah cair

domestik, kelompok menyepakati target adalah warga di sekitar sungai dan masyarakat secara umum. Tema yang diangkat mengenai pencemaran sungai yang menjadi tempat pembuangan sampah dan BAB sehingga lingkungan menjadi tidak sehat. Video yang dibuat singkat dan mengena memperlihatkan akibat sungai yang sangat kotor di tengah permukiman masyarakat dengan kata kunci "limbahmu, harimaumu yang siap mengancam kehidupanmu". Produksi yang dibuat para peserta cukup informatif dan kaya akan makna-makna kebijaksanaan lokal yang sebenarnya sangat dekat dalam kehidupan masyarakat Minang.

Diakhir lokakarya, peserta Kabupaten/Kota merancang acara sosialisasi yang bisa dilakukan di wilayahnya dengan menggunakan media-media yang telah dibuat sendiri oleh mereka. Sedangkan kabupaten/kota yang baru akan menggunakan media tersebut dalam memotivasi pembentukan Pokja AMPL di wilayahnya. Kelompok dari media akan menayangkan hasil produksi dalam siaran mereka masing-masing untuk memotivasi kesadaran publik agar tidak mencemari sumber air minum dan menjaga kesehatan lingkungan. ■ WH

# Pembelajaran Program WES-UNICEF dalam Penguatan Kapasitas Pemerintah dan Persiapan Masyarakat

Pada tahun 2006 telah disepakati perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan UNICEF yang kemudian dituangkan ke dalam *Country Program Action Plan* (CPAP). Kerjasama tersebut dilaksanakan pada beberapa bidang salah satunya adalah program berbasis masyarakat *Water and Environmental Sanitation* (WES).

Program WES dimulai tahun 2006 berakhir pada tahun 2010 dengan target membangun 180 desa, 500 sekolah dasar, dan 70.000 penduduk kawasan kumuh. Pada *batch* I (2006-2007), pelaksanaan dilakukan di NTT, NTB, Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Program WES di Yogyakarta telah selesai pelaksanaannya di tahun 2007, sedangkan untuk NTT, NTB dan Jawa Tengah, pelaksanaannya dilanjutkan pada *batch* II. Pada *batch* II (2007-2010), dengan adanya dukungan dari pemerintah Belanda dan Swedia (*Swedish International Development Corporation Agency/SIDA*), Program WES diperluas pelaksanaannya di 25 kabupaten, dan 5 kota yang tersebar di 6 provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, NTT, NTB dan Sulawesi Selatan.

Dalam pelaksanaan *batch* II, UNICEF bekerjasama dengan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Nasional mengkoordinasikan pelaksanaan program WES tersebut. Belajar dari pengalaman disepakati fokus dari program WES bukan hanya pada pembangunan fasilitas AMPL, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah daerah.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pembangunan sarana AMPL tanpa didukung dengan perubahan perilaku masyarakat, menyebabkan penggunaan sarana yang tidak maksimal dan bahkan tidak digunakan sama sekali.

## Bukan Sekedar Melibatkan Masyarakat

Penguatan kapasitas pemerintah daerah dimulai dengan dibentuknya Pokja AMPL tingkat provinsi dan kabupaten di setiap lokasi program. Diharapkan Pokja AMPL yang telah terbentuk akan dapat mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang terkait dengan AMPL, dimana WES adalah salah satunya. Melalui program WES ini, serangkaian penguatan kapasitas Pokja AMPL daerah dilakukan dengan bantuan teknis dari Pokja AMPL Nasional, seperti *Training on Trainers* (TOT) Perencanaan Strategis (Renstra) AMPL, MPA/PHAST, *Community Led Total Sanitation* (CLTS), promosi kesehatan, fasilitasi sekolah dan monitoring dan evaluasi partisipatif.

Dalam hal persiapan masyarakat, khususnya untuk perubahan perilaku masyarakat, terdapat beberapa hal yang disepakati untuk dilaksanakan, yaitu perlu adanya kampanye kesehatan sebelum, selama dan sesudah masa konstruksi. Hal ini ditujukan agar seiring dengan adanya perubahan perilaku secara bertahap, maka akan tercipta kebutuhan akan sarana air minum dan sanitasi dari masyarakat. Dengan demikian sarana yang akan terbangun akan sesuai dengan kebutuhan – bukan keinginan – masyarakat. Selain itu, diharapkan akan terdapat rasa kepemilikan terhadap sarana yang cukup tinggi.

Pelibatan masyarakat mempunyai dua makna penting yaitu pengambilan keputusan dan tanggung jawab.

Pengambilan keputusan dilakukan karena masyarakat sudah dapat membedakan pilihan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan tanggung jawab adalah komitmen masyarakat dalam menanggung segala konsekuensi dari pilihan yang telah ditetapkan. Peran pemerintah kemudian

menjadi sangat penting dalam mendampingi masyarakat yang sudah mulai mandiri tersebut. Untuk itu, kapasitas pemerintah perlu dikuatkan agar dapat mengimbangi perkembangan dari pemberdayaan masyarakat.

## Tahapan Pelaksanaan Program WES: Sebuah Proses

Dikarenakan luasnya rentang kendali program WES *batch* II ini, Pokja AMPL dan UNICEF sepakat untuk menyusun sebuah *Project Implementation Document* (PID) atau petunjuk pelaksanaan (Juklak) program. PID tersebut disepakati sebagai dokumen yang "hidup" dan diharapkan akan menjadi dokumen yang dapat mengakomodir berbagai hasil pembelajaran dari pelaksanaan program di lapangan. Sehingga pada akhir masa program didapatkan PID yang dapat dijadikan panduan pelaksanaan bagi program sejenis lainnya.

Secara garis besar, pelaksanaan program WES terbagi menjadi 6 tahapan, yaitu (i) tahap *Roadshow*; (ii) tahap persiapan kelembagaan; (iii) tahap penguatan kapasitas pemerintah daerah; (iv) tahap pemilihan lokasi program (desa, sekolah dan kawasan kumuh); (v) persiapan masyarakat; dan (vi) tahap pelaksanaan program. Kegiatan monitoring dan evaluasi sudah terintegrasi dalam masing-masing tahapan.

Program WES *batch* II dimulai dengan serangkaian *roadshow* untuk menentukan daerah yang berminat dan mempunyai komitmen dalam melaksanakan program tersebut. Seperti yang telah disebutkan di atas, pada *batch* ini didapatkan 25 kabupaten dan 5 kota yang tersebar di 6 provinsi. Dari rangkaian *roadshow* tersebut, kemudian disepakati beberapa hal yang akan menjadi tindak lanjut, yaitu penyerahan surat komitmen dari setiap

daerah, perekrutan konsultan pendamping tingkat provinsi (*Project Officer*), pembentukan Pokja AMPL daerah.

Beberapa tindak lanjut yang telah direncanakan, dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala, terutama terkait dengan penyusunan PID. PID tersebut mengalami keterlambatan dalam penyusunannya, sehingga mengakibatkan terjadinya pemahaman program yang berlainan antara lokasi satu dengan lokasi lainnya. Sementara, kegiatan terus dilaksanakan berdasarkan pengalaman daerah dalam mengelola program. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi Pokja AMPL Pusat dan UNICEF dalam mengkoordinasikan kegiatan.

Terlepas dari kesulitan dalam hal koordinasi, pelaksanaan program di keenam provinsi masih berjalan sesuai dengan prinsip pelaksanaan program secara umum. Sampai saat ini, provinsi NTT merupakan provinsi yang paling maju pelaksanaannya dibandingkan kelima provinsi lainnya. Dikatakan paling maju bukan hanya dalam hal tahapan, tetapi juga dalam prosesnya. Sebagai contoh, proses pemilihan lokasi desa dan sekolah yang tahun ini direncanakan sebagai lokasi *pilot project*, dilakukan melalui serangkaian proses yang ideal, yaitu melalui proses *long list*, *roadshow* tingkat kabupaten dan penetapan lokasi. Hal ini patut dijadikan pembelajaran bagi provinsi lainnya bukan semata karena prosesnya saja tetapi dampak yang dihasilkan dengan adanya minat dan komitmen yang besar dari desa dan sekolah yang terpilih. NTT saat ini sudah mulai mempersiapkan kegiatan penyusunan rencana kerja masyarakat (RKM) di tingkat desa. Diperkirakan NTT akan dapat menyelesaikan pilot project ini pada awal tahun 2009.

Provinsi Maluku, dan Papua Barat sampai saat ini telah berhasil melaksanakan tahap persiapan kelembagaan dan penguatan kapasitas pemerintah daerah. Tahap persiapan kelembagaan di Maluku dan Papua Barat dilaksanakan melalui pembentukan Pokja AMPL provinsi dan kabupaten. Sedangkan untuk tahap penguatan kapasitas, kedua provinsi tersebut telah melaksanakan beberapa TOT yang dipersyaratkan untuk melaksanakan program WES atau program sejenis lainnya. Walaupun proses pelaksanaan penguatan kapasitas pemerintah daerah di Papua Barat terkesan sangat terbatas dalam hal waktu dan biaya, tetapi diharapkan proses penguatan kapasitas yang telah dilaksanakan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Menurut informasi yang telah disampaikan kepada Pokja AMPL Pusat dan UNICEF, saat ini kabupaten terpilih di Papua Barat sedang menyusun Renstra AMPL.

Provinsi Sulawesi Selatan dan NTB pada dasarnya telah melaksanakan tahap persiapan kelembagaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar kabupaten terpilih di kedua provinsi tersebut adalah daerah binaan WASPOLA. Dua kabupaten baru di Sulawesi Selatan, kabupaten Luwu Utara dan Barru, juga telah menyusul kabupaten lainnya dengan membentuk Pokja AMPL dimasing-masing kabupaten. Sampai saat ini, kedua provinsi tersebut masih belum memasuki tahap penguatan kapasitas pemerintah daerah dikarenakan beberapa hal, yaitu mengenai kejelasan proses penguatan kapasitas dan tahapan berikutnya, dan, khususnya NTB, fokus pelaksanaan kegiatan masih pada penyelesaian *batch* I.

Sedangkan untuk provinsi Papua, sampai saat ini pelaksanaan kegiatan masih pada tahap persiapan kelembagaan. Direncanakan dalam waktu dekat provinsi Papua akan melaksanakan proses penguatan kapasitas pemerintah daerah.

### **Pembelajaran Program**

Berdasarkan kendala yang ada, kemudian Pokja AMPL dan UNICEF mencoba untuk menata kembali mekanisme pengelolaan program melalui pertemuan tinjauan Paruh Waktu program WES yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2008. Terdapat tiga hal utama yang diidentifikasi sebagai akar permasalahan, yaitu (i) waktu pelaksanaan program yang terlalu singkat untuk program berbasis masyarakat dimana penekanan pada penguatan kapasitas dan persiapan masyarakat adalah sangat penting; (ii) perlu adanya pemahaman yang sama mengenai tahapan pelaksanaan program; dan (iii) pengalokasian anggaran yang berdasarkan kebutuhan dari setiap daerah.

Terkait waktu, pelaksanaan *batch* II, diperkirakan akan selesai sekitar pertengahan tahun 2009. Diusulkan agar pada tahun 2008, telah dilakukan pemilihan sisa target desa untuk dilaksanakan pada tahun 2009, yaitu 4 desa dukungan UNICEF dan 2 desa replikasi oleh pemerintah kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar sisa target desa tersebut dapat dilaksanakan dalam waktu 2 tahun, yaitu tahun pertama untuk penguatan kapasitas pemerintah daerah dan persiapan masyarakat, dan tahun kedua untuk pembangunan sarana AMPL.

Untuk mendapatkan pemahaman yang sama terhadap tahapan pelaksanaan program, akan dilakukan sosialisasi PID pada akhir bulan Juni 2008 sekaligus sosialisasi pada semua pemangku kepentingan. Selain itu, akan dilakukan pula penguatan komitmen daerah untuk melakukan replikasi program di tahun 2009 dengan memastikan dialokasikannya anggaran untuk replikasi tersebut pada APBD tahun 2009.

Pembelajaran yang dipetik selama ini adalah perlunya pemahaman mendasar mengenai filosofi konsep berbasis masyarakat dalam pembangunan AMPL. Pentingnya alokasi waktu yang memadai untuk memastikan proses penguatan kapasitas pemerintah lokal dan persiapan masyarakat untuk merubah perilaku, menjadi suatu keniscayaan dalam menjamin tidak terulangnya berbagai kegagalan yang telah dilakukan sepuluh tahun yang lalu yang terabadikan melalui ratusan bahkan ribuan "monumen" AMPL. Pemahaman ini tentunya berlaku bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pembelajaran lain yang dapat dipetik adalah perlunya pemahaman yang sama terhadap tahapan pelaksanaan program, khususnya program dengan rentang kendali yang sangat luas. Keberadaan lokasi program yang tersebar di Indonesia Timur juga merupakan pembelajaran lain yang perlu mendapat perhatian. Kondisi geografis, budaya dan pemahaman konsep berbasis masyarakat dalam pembangunan AMPL yang masih dapat dikatakan paradigma baru, ditambah lagi dengan adanya kebijakan desentralisasi, memerlukan strategi khusus dalam mengelola dan mengkoordinasikan program. ■ FW

# Deklarasi Bebas BAB sembarangan

**C**ommunity-Led Total Sanitation (CLTS) atau yang diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), sekali lagi menunjukkan kesuksesannya. Terbangunnya jamban di setiap rumah tangga menandai tercapainya kondisi dimana tidak ada lagi individu yang melakukan buang air besar (BAB) di sembarang tempat secara terbuka.

Kali ini, delapan desa di Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek mendeklarasikan kemerdekaannya dari perilaku buang air besar sembarangan. Pada 14 Mei 2008, warga bersama aparat pemerintah berkumpul di Balai Desa Tumpuk untuk mendengarkan pembacaan deklarasi bebas buang air besar secara terbuka (*Open Defecation Free/ODF*).

Delapan desa di Kecamatan Tugu yang telah merdeka dari buang air besar sembarangan adalah Desa Tumpuk, Desa Winong, Desa Puru, Desa Gembleb, Desa Ngulan Kulon, Desa Wonokerto, Desa Pangungsari, serta Desa Tegaren. Sebagai apresiasi atas keberhasilan Desa Tumpuk menjadi yang pertama bebas buang air besar sembarangan, maka acara deklarasi ODF pun dilakukan di Balai Desa Tumpuk.

Kemeriahan yang diselenggarakan warga desa dengan bantuan dana dari pemerintah ini merupakan sebuah *reward* (penghargaan) atas jerih payah warga untuk mengubah perilaku buang air besar secara terbuka menjadi buang air besar di jamban.

## Strategi Pemicuan dengan Metode Percepatan

Pendekatan STBM sudah luas dikenal sebagai salah satu pendekatan perubahan perilaku melalui metode pemicuan terhadap aspek rasa jijik, rasa malu, harga diri dan aspek agama. Meskipun demikian, warga yang dipicu tidak selalu langsung menunjukkan perubahan perilaku. Terkadang ada saja warga yang membandel atau tidak menggubris pemicuan tersebut. Oleh karena itu, di Kabupaten Trenggalek ini, pemicuan tidak dilakukan sekali saja. Pemicuan dilakukan sampai empat kali di setiap desa.

Melalui metode percepatan ini, masukan berupa dana dari APBD untuk program STBM sebesar Rp 150.641.500 dalam waktu 5 bulan dalam bentuk kegiatan fasilitasi telah menghasilkan keluaran berupa dana pembangunan jamban oleh masyarakat sebesar Rp 1.528.500.000.

Selain itu, satu hal yang cukup membanggakan dari program STBM yang berlangsung di Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek ini adalah cakupan bebas buang air besar di delapan desa mencapai 20 komunitas dari 30 komunitas sasaran. Hebatnya, terdapat tambahan empat komunitas yang mencapai ODF yang awalnya tidak menyatakan peminatan.

## Pendampingan dari Pusat

Meskipun sudah dibekali pelatihan dan praktek uji coba,

para fasilitator tidak lantas merasa menjadi ahli dalam hal pemicuan. Banyak fasilitator yang dimobilisasi masih merasa kurang percaya diri, dengan demikian masih terus dibutuhkan kegiatan pendampingan.



Foto: Dyota Condorini

Tidak hanya untuk mendampingi para fasilitator melakukan pemicuan, kegiatan pendampingan ini juga memiliki banyak manfaat dalam pencapaian kondisi ODF. Melalui pendampingan, kegiatan verifikasi akses sanitasi masyarakat menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, pendampingan juga membantu pengumpulan dan pelaporan data sarana sanitasi (jamban) yang tersedia. Kegiatan pendampingan juga berperan untuk menjembatani komunikasi kabupaten dengan pemerintah pusat.

Namun, sangat disayangkan karena masa pendampingan ini dirasakan masih terlalu singkat. Oleh karena itu, diharapkan ke depannya masa pendampingan dibuat lebih panjang untuk dapat memaksimalkan program.

## Rencana Tindak Lanjut

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Trenggalek tidak akan berhenti setelah berhasil membuat delapan desa bebas dari perilaku buang air besar sembarangan. Kabupaten Trenggalek memiliki visi untuk menjadikan kabupaten ini bebas buang air besar sembarangan pada 2009 dan mencapai Trenggalek Sehat pada 2010.

Untuk itu, Kabupaten Trenggalek telah menyiapkan pelatihan untuk menciptakan fasilitator-fasilitator baru sejumlah 29 fasilitator. Pengajuan anggaran untuk melakukan pemicuan berikutnya pun menjadi agenda mengembangkan program STBM. Sehingga, target seluruh desa di Kabupaten Trenggalek telah memperoleh pemicuan pada akhir Desember 2008 akan terwujud. ■ Dyota Condorini

# Lokakarya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Peluncuran Gugus Tugas Kesehatan dan Higienitas

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan sebuah gerakan perubahan menuju pola hidup yang bersih dan sehat. Terdapat lima pilar dalam gerakan STBM ini, yaitu perilaku buang air besar di jamban, cuci tangan pakai sabun, pengolahan air minum skala rumah tangga, pengolahan air limbah skala rumah tangga dan pengolahan sampah skala rumah tangga. Kelima pilar ini telah banyak dilaksanakan oleh berbagai pihak, namun pelaksanaannya sendiri masih belum terkoordinasi dengan baik.

Terkait dengan hal tersebut, telah disusun suatu strategi nasional STBM yang akan menjadi landasan gerak para pelaku STBM. Pada lokakarya STBM ini, strategi nasional STBM tersebut disosialisasikan kepada para *stakeholder* STBM dengan tujuan untuk memperoleh masukan-masukan dari para pelaksana STBM itu sendiri.

Acara lokakarya ini diawali dengan sambutan oleh Osward Mungksa yang mewakili Direktur Perumahan dan Perumahan Bappenas selaku Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Selanjutnya, Direktur Penyehatan



Para peserta Lokakarya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Puncak 26-27 Mei 2008.  
Foto: Dyota Condorini

Lingkungan, Departemen Kesehatan secara resmi membuka lokakarya tersebut.

Pada kesempatan ini, diluncurkan pula salah satu gugus tugas dari Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), yaitu Gugus Tugas Kesehatan dan Higienitas (GTKH). Gugus Tugas ini berada di bawah koordinasi Direktorat Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan.

Setelah pengenalan mengenai Jejaring AMPL dan peluncuran Gugus Tugas GTKH, acara dilanjutkan dengan pre-

sentasi mengenai *draft* strategi nasional STBM. Presentasi dilakukan oleh Kasubdit Penyehatan Air, Zainal Nampira. Presentasi singkat tersebut ditindaklanjuti dengan diskusi terfokus yang merupakan agenda acara berikutnya.

Di dalam *draft* Strategi Nasional STBM, dinyatakan bahwa terdapat 6 komponen strategi, yaitu: (i) Penciptaan Lingkungan yang Kondusif; (ii) Peningkatan Kebutuhan; (iii) Peningkatan Penyediaan; (iv) Pengelolaan Pengetahuan; (v) Pembiayaan; (vi) Monitoring dan Evaluasi.

Dalam lokakarya ini disusun pula rencana kerja STBM selama tahun 2008. Rencana kerja ini merupakan rencana kerja bersama, yang berarti di dalamnya tidak hanya terdapat rencana kerja dari instansi pemerintah, namun juga dari para pelaku lainnya seperti organisasi nonpemerintah maupun institusi pendidikan. Dengan demikian diharapkan tercipta koordinasi, kerjasama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, demi peningkatan profil AMPL di Indonesia. ■ DY0/DHA

## Pertemuan Gugus Tugas Pengelolaan Sampah: Prioritas PP terhadap UU Persampahan

Setelah diluncurkan Januari lalu pada saat Lokakarya Persampahan, Gugus Tugas Pengelolaan Sampah (GTPS) kembali mengadakan pertemuan pada tanggal 9 Mei 2008. Pertemuan yang diadakan di kantor ESP/USAID tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai lembaga seperti Dana Mitra Lingkungan (DML), Yayasan Perisai, IATPI, ISSDP, *Mercy Corps*, Pokja AMPL dan ESP.

Pada pertemuan itu dibahas mengenai prioritas peraturan pemerintah terhadap UU No. 18 tahun 2008 tentang Persampahan. Prioritisasi tersebut

dilakukan dengan cara memberikan nilai terhadap rencana sebelas peraturan pemerintah dan mengurutkan berdasarkan ranking dengan poin terbanyak. Kriteria prioritas disusun berdasarkan dampak terhadap kualitas kesehatan dan sosial masyarakat, pertumbuhan ekonomi rakyat, kualitas daya dukung lingkungan dan kapasitas kelembagaan daerah dengan skala 1 sampai 5.

Setelah melakukan identifikasi, dilanjutkan dengan diskusi yang cukup panjang, pertemuan tersebut menghasilkan prioritas rencana sebelas peraturan pemerintah terhadap UU Persampahan.

Peraturan pemerintah mengenai pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah mendapatkan poin tertinggi dan menempati tingkat skala prioritas yang pertama.

Hasil dari pertemuan GTPS ini, sebagai tindak lanjut, akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada para pengambil keputusan dalam suatu pertemuan khusus yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu bentuk dukungan GTPS untuk mewujudkan Indonesia yang terbebas dari permasalahan sampah. ■ DHA



(1) Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto memberikan sambutan pada Hari Air Dunia 2008. (2) Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, dan beberapa pejabat eselon menghadiri peringatan HAD 2008. (3) Lomba pemilahan sampah antardirektorat Departemen Pekerjaan Umum. (4) Penyanyi balada, Nugie, turut menyemarakkan HAD 2008. Foto-foto: Dini Haryati



## Acara Puncak HARI AIR DUNIA 2008

**A**cara Puncak Hari Air Dunia 2008 diselenggarakan pada Jum'at, 16 Mei 2008 di halaman kantor Departemen Pekerjaan Umum, Jl. Pattimura No. 20-27, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Acara ini diawali dengan laporan oleh Ketua Panitia Nasional HAD 2008, Staf Ahli I Departemen Pekerjaan Umum Mochamad Amron.

Setelah laporan Ketua Panitia Nasional HAD 2008, disampaikan sambutan dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan dilanjutkan dengan sambutan dari Menteri Pekerjaan Umum. Dalam sambutannya, Djoko Kirmanto mengingatkan pada semua pihak akan pentingnya sanitasi dalam menjaga kelangsungan ketersediaan air bersih dan masalah sanitasi yang merupakan permasalahan bersama sehingga sudah tidak harus diselesaikan secara sektoral.

Lebih lanjut dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa inisiatif daerah

merupakan motor penggerak pembangunan sanitasi saat ini. Pemerintah pusat hanya membantu pemerintah daerah yang betul-betul ingin membangun dan memelihara.

Usai sambutan, rentetan acara yang berhubungan dengan Hari Air ditampilkan, diantaranya kampanye "Cuci Tangan Pakai Sabun" oleh Pejabat Tingkat Eselon 1.

Dengan diiringi lagu Cuci Tangan Pakai Sabun, dalam kampanye tersebut para pejabat eselon 1, dengan didampingi oleh murid SDI Al Azhar, Jakarta Selatan, diminta untuk menunjukkan cara cuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar.

Selain itu, diadakan pula lomba pemilahan sampah antardirektorat Departemen Pekerjaan Umum, parodi bertemakan "Sanitasi Jawabannya" dan penampilan penyanyi ibukota, Nugie, yang menyanyikan lagu-lagu bertemakan lingkungan.

Acara yang dikemas dengan cukup menarik ini setidaknya dapat meningkatkan pesan sekaligus peringatan bagi kita semua. Bahwa ketersediaan sumber daya air saat ini telah mengalami degradasi akibat pencemaran yang terjadi secara terus menerus. Tentunya hal ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga dan memperbaikinya. Manfaat yang diperoleh tentu tidak dapat langsung dirasakan oleh kita. Akan tetapi ada yang lebih penting. Siapa lagi kalau bukan anak cucu kita. Jika kita membuat saluran sanitasi yang bagus sejak sekarang, maka air tanah di masa yang akan datang tidak akan pernah tercemar. ■ DH

# Hari Lingkungan Hidup Sedunia

**H**ari Lingkungan Hidup Sedunia (HLHS) pada tahun 2008 ini telah menginjak usia yang ke-36 sejak dicetuskan pertama kali tahun 1972 melalui konferensi PBB. Tema perayaan tiap tahun pun beragam. Tahun 2008 perayaan HLHS direncanakan berlangsung di ibukota New Zealand, Wellington, dengan mengusung tema "*CO<sub>2</sub>, Kick the Habit! Towards a Low Carbon Economy*".

Pemilihan New Zealand sebagai tempat penyelenggaraan dikarenakan New Zealand merupakan negara pertama yang berjanji menjadikan wilayahnya bebas dari gas karbon dan sangat fokus pada manajemen hutan sebagai *tools* untuk mereduksi efek rumah kaca.

Perayaan pada 5 juni 2008 ini akan dipenuhi beragam aktivitas. Diantaranya presentasi dari rumah ke rumah yang akan dilakukan organisasi lingkungan

setempat untuk membicarakan topik seputar pendidikan, makanan, transportasi, energi dan peningkatan kesadaran publik.

Selama 36 tahun perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, topik yang diusung cukup beragam dan biasanya disesuaikan dengan isu hangat yang berkembang pada tahun tersebut. Untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut perayaan HLHS pada tahun sebelumnya, maka akan diulas secara singkat topik-topik perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada dua tahun terakhir.

## Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2007

Topik Hari Lingkungan Hidup pada tahun itu "*Melting Ice-A Hot Topic*" ("Es Mencair. Waspada!"). Tahun itu, perayaan difokuskan pada isi perubahan iklim yang akan memicu mencairnya es di

belahan kutub. Kota yang menjadi tuan rumah perayaan HLHS saat itu adalah Tromse, Norway yaitu sebuah kota yang terkenal sebagai pintu gerbang menuju kutub utara.

Adapun agenda besarnya bagaimana menghadapkan pada semua orang isu lingkungan hidup sekaligus menjadikan masyarakat dunia sebagai agen dalam mewujudkan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan sehingga dapat mengubah perilaku untuk selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip kelestarian lingkungan.

Acara perayaan juga diramaikan parade sepeda, konser "hijau", perlombaan membuat artikel dan poster lingkungan hidup yang diadakan di sekolah-sekolah, menanam pohon dan kampanye daur ulang.

## Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2006

Tahun 2006 tema yang diusung "*Don't Desert Dryland*". Menyusunnya padang pasir dan lahan kering memang sudah mengkhawatirkan. Tidak seperti air dan udara yang notabene dapat diperbaiki maka kerusakan tanah membutuhkan ribuan tahun untuk memperbaikinya.

Sebagai informasi tambahan bahwa 40 persen permukaan bumi diliputi lahan kering dan padang pasir. Oleh karena itu perayaan yang dilangsungkan di Algeria ini memfokuskan pada topik tersebut.

## Tindak Lanjut Perayaan HLHS: Apa dan Bagaimana Lingkungan Kita Kini?

Setidaknya itulah isu yang diangkat pada perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia selama dua tahun terakhir. Isu beragam yang diangkat disesuaikan dengan topik yang sedang *booming* pada waktu itu.

## Penganugerahan Kalpataru dan Adipura

**T**epat pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan penghargaan pelestarian lingkungan atau Kalpataru kepada sembilan orang dari berbagai provinsi dan tiga LSM di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2008.

Kalpataru dibagi dalam empat kategori, yaitu perintis lingkungan, pengabdian lingkungan, penyelamat lingkungan, dan pembina lingkungan. Untuk kategori perintis lingkungan, diserahkan kepada Cukup Rudiyanto dari Indramayu Jawa Barat, Sriyatun dari Surabaya Jawa Timur, Abu Wenna dari Wajo Sulawesi Selatan, Theresia Mia Tobi dari Flores Timur Nusa Tenggara Timur, dan Abbas H Usman dari Indragiri Hilir Riau.

Kategori pengabdian lingkungan diberikan kepada Jadjit Bustami dari Bondowoso Jawa Timur, Lalu Selamat dari Dompu Nusa Tenggara Timur, dan Muthalib Ahmad dari Banda Aceh Nangroe Aceh Darussalam.

Kategori penyelamat lingkungan diberikan kepada masyarakat dari Desa Pekraman Buahon Bangli Provinsi Bali, kelompok tani Argo Mulyo dari Madiun Jawa Timur, dan LSM Bahtera Melayu dari Bengkalis Provinsi Riau. Sedangkan kategori pembina lingkungan diberikan kepada Angerius Takalapeta dari Alor Nusa Tenggara Timur.

Selain Kalpataru, juga diberikan penghargaan Adipura. Untuk kategori kota Metropolitan diberikan pada Kota Palembang, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Surabaya, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat.

Kategori kota besar diberikan kepada Pekanbaru, Padang, dan Batam. Untuk kategori kota sedang ada 28 kota penerima penghargaan Adipura dan kategori kota kecil terdapat 57 kota.

Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH), sejak Kalpataru diberikan kepada perseorangan dan kelompok masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup pada tahun 1980, sedikitnya 240 orang dan kelompok telah menerima penghargaan ini. ■

BW/dari berbagai sumber

Dua tahun telah berlalu sejak perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di tahun 2006 dengan tema Cegah Menyusutnya Padang Pasir dan Lahan Kering. Perbaikan 40 persen permukaan bumi tersebut belum juga tuntas. Justru semakin diperparah dengan adanya efek rumah kaca dan pemanasan global. Masalah baru muncul: es mencair, dan permukaan air naik. Kedua permasalahan ini memicu akibat yang sama: berkurangnya lahan hidup bagi penghuni dunia.

Pencairan es di permukaan bumi menjadi sorotan dalam Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2007. *United Nations Environment Program (UNEP)* mengusung tema "Es Mencair, Waspadalah!". Peringatan puncaknya telah digelar di Tromso, Norwegia. Sama halnya dengan udara, air, dan tanah, es juga memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan di planet ini.

Es, dalam bentuk lautan, gletser, bongkahan, atau salju memantulkan panas matahari. Sebaliknya permukaan laut yang kelim serta permukaan tanah yang tidak tertutup es menyimpan panas, dan menaikkan suhu bumi. Bila lapisan es menghilang, bumi akan terus menyimpan panas matahari. Semakin tinggi suhu bumi, kian banyak es yang akan terus mencair, dan akan terus memicu pemanasan global.

Kenaikan suhu bumi memang sudah diramalkan banyak pihak. Penggunaan bahan bakar yang terus meningkat sejak menggeliatnya dunia industri di berbagai belahan bumi memicu emisi gas buang seperti karbon dioksida dan karbon mo-

noksida. Emisi gas buang ini yang membuat kenaikan suhu permukaan bumi, termasuk kerusakan lapisan ozon di atmosfer bumi.

Dunia industri memabat habis semua sumber daya yang ada di bumi. Tak hanya sumber bahan bakar fosil seperti minyak bumi, tapi juga hutan. Hingga saat ini hutan yang masih tersisa tak lebih dari enam persen dari permukaan bumi, dan merupakan rumah bagi 30 juta spesies dan menyediakan 20 persen hingga 30 persen oksigen bagi dunia.

Pada tahun ini buku rekor dunia *Guinness* akan memasukkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat penghancuran hutan tercepat di antara negara-negara yang memiliki 90 persen dari sisa hutan dunia. *Greenpeace* mencatat, setiap jam Indonesia menghancurkan luas hutan yang setara dengan 300 lapangan sepak bola. Sebanyak 72 persen dari hutan asli Indonesia telah musnah dan se-

tengah dari yang tersisa masih terancam kebakaran, penebangan komersial, dan pembukaan hutan untuk kebun kelapa sawit.

Penghancuran hutan inilah sumber malapetaka sebenarnya. Oksigen yang merupakan elemen penting bagi hidup manusia mulai menipis. Kenyataan itu berbanding terbalik dengan semakin tinggi gas emisi rumah kaca yang justru berpotensi menghancurkan kehidupan.

Tunggu apalagi, mari kita mulai sejak saat ini. Mulailah dari hal-hal sekecil mungkin. Seperti membuang sampah pada tempatnya atau dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kita jadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di tahun 2008 ini menjadi titik awal yang tak akan berkesudahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. ■

Willy dari berbagai sumber

**S**ejak dirayakan pertama kali pada tahun 1972, topik-topik yang diangkat adalah sebagai berikut:

2007 - *Melting Ice-a Hot Topic?*

2006 - *Deserts and Desertification-Don't Desert Drylands!*

2005 - *Green Cities-Plan for the Planet!*

2004 - *Wanted! Seas and Oceans-Dead or Alive?*

2003 - *Water-Two Billion People are Dying for It!*

2002 - *Give Earth a Chance*

2001 - *Connect with the World Wide Web of Life*

2000 - *The Environment Millennium-Time to Act*

1999 - *Our Earth-Our Future-Just Save It!*

1998 - *For Life on Earth-Save Our Seas*

1997 - *For Life on Earth*

1996 - *Our Earth, Our Habitat, Our Home*

1995 - *We the Peoples: United for the Global Environment*

1994 - *One Earth One Family*

1993 - *Poverty and the Environment-Breaking the Vicious Circle*

1992 - *Only One Earth, Care and Share*

1991 - *Climate Change. Need for Global Partnership*

1990 - *Children and the Environment*

1989 - *Global Warming; Global Warning*

1988 - *When People Put the Environment First, Development Will Last*

1987 - *Environment and Shelter: More Than A Roof*

1986 - *A Tree for Peace*

1985 - *Youth: Population and the Environment*

1984 - *Desertification*

1983 - *Managing and Disposing Hazardous Waste: Acid Rain and Energy*

1982 - *Ten Years After Stockholm (Renewal of Environmental Concerns)*

1981 - *Ground Water; Toxic Chemicals in Human Food Chains*

1980 - *A New Challenge for the New Decade: Development Without Destruction*

1979 - *Only One Future for Our Children-Development Without Destruction*

1978 - *Development Without Destruction*

1977 - *Ozone Layer Environmental Concern; Lands Loss and Soil Degradation*

1976 - *Water: Vital Resource for Life*

1975 - *Human Settlements*

1974 - *Only one Earth*



Kota Wellington, New Zealand dilihat dari atas. (Sumber: www.wikipedia.com)

# Hari Bumi 2008

**T**anggal 22 April adalah sebuah tanggal dalam setahun yang tidak semua orang ingat ada apa pada tanggal tersebut. Mungkin untuk para penggiat lingkungan tanggal tersebut tidaklah asing bagi mereka.

Sejak Tahun 1970 sudah didengungkan himbauan untuk melestarikan lingkungan air, bumi dan udara, serta aksi-aksi di seluruh dunia yang intinya bagaimana cara membuat bumi menjadi lebih sehat.

"Hari Bumi". Ya, begitu mereka menyebutnya. Diharapkan disetiap perayaan Hari Bumi, bumi tidak semakin bertambah "sakit" akibat ulah para penghuninya sendiri.

Hari Bumi diperingati untuk lebih menyadarkan kita akan perilaku sehari-hari terhadap bumi tempat tinggal kita.

Banyak hal tidak baik yang dilakukan terhadap bumi, seperti penebangan hutan yang tidak terkontrol, penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi ozon, pemborosan sumber energi seperti air dan minyak bumi, serta pembuangan limbah secara sembarangan.

Pada hari tersebut kita diingatkan akan dampak negatif dari perlakuan kita sendiri terhadap keberadaan planet yang kita singgahi. Dampak yang paling dirasakan saat ini adalah yang sering disebut pemanasan global atau global warming.

Pemanasan global terjadi karena adanya efek gas rumah kaca. Konsentrasi gas rumah kaca ini menghambat pantulan radiasi matahari dari bumi ke angkasa, maka akumulasi radiasi panas ini terjebak di udara yang menyebabkan panas berlebihan.

Banyak cara untuk dapat menekan emisi gas rumah kaca, diantaranya dengan mengurangi kadar karbondioksida (CO<sub>2</sub>) di udara. Salah satu caranya dengan menggunakan kendaraan yang bebas polusi sesering mungkin atau menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan dan juga hemat energi.

Tapi yang lebih penting lagi adalah perubahan perilaku manusia penghuni bumi ini. Mulailah berhemat air, daur ulang sampah, hentikan penebangan hutan ilegal, efisiensi penggunaan sumber energi seperti listrik dan BBM, jangan menggunakan bahan perusak ozon, serta jangan membuang limbah sembarangan.

Dengan demikian, kita sudah ikut serta mengurangi kerusakan di bumi ini. Semoga di tahun mendatang, kita masih bisa memperingati Hari Bumi di bumi yang masih sehat dan menjadi dambaan semua penghuninya.

## Sejarah Hari Bumi

Berawal dari pidato Senator Wisconsin, Gaylord Nelson



Foto: Bowo Leksono

pada tahun 1969 di Seattle, Amerika Serikat. Saat itu, ia mengusulkan agar diberlakukan secara nasional apa yang disebut *teach in*, yaitu sesi kuliah tambahan yang membahas tema-tema kontroversial yang sedang hangat, khususnya tema lingkungan hidup.

Gagasan Nelson mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat sipil. Inilah embrio lahirnya Hari Bumi. Karena setahun kemudian tepatnya 22 April 1970, jutaan orang turun ke jalan, berdemonstrasi memadati *Fifth Avenue*, New York. Tidak kurang 1500 perguruan tinggi dan 10 ribu sekolah berpartisipasi berunjuk rasa di New York, Washington, dan San Fransisco.

Majalah *Time* menulis sekitar 20 juta orang turun ke jalan pada hari itu, bersama-sama mencanangkan Hari Bumi dan menyerukan protes untuk memulai sebuah "revolusi hijau". Peringatan Hari Bumi pertama kali pada tahun 1970 dinilai merupakan puncak kejayaan gerakan lingkungan hidup era 1960-an.

Fenomena gerakan Hari Bumi pertama kali Amerika Serikat tersebut, lahirlah berbagai kelompok besar pelestari lingkungan hidup, antara lain *Environmental Action* (di Washington, 1970), kelompok *Greenpeace* (kelompok pelestari lingkungan yang dikenal radikal dan militan, lahir pada 1971), *Environmentalist for Full Employment* (kelompok penentang industrialisasi, lahir 1975), *Worldwatch Institute* (pusat penelitian dan studi yang mengumpulkan berbagai informasi ancaman lingkungan global, 1975), dan masih banyak lagi kelompok pemerhati lingkungan yang lain.

Gerakan yang monumental ini menurut Nelson, yang meninggal pada 4 Juli 2005 di usia 89 tahun, sebagai "ledakan akar rumput yang sangat mencengangkan". Tak salah bila Nelson disebut sebagai Bapak Hari Bumi Internasional. Dan hingga saat ini, setiap 22 April, negara-negara di seluruh dunia memperingatinya. ■ MCH

# Peletakan Batu Pertama Jamban Sekolah

Peletakan batu pertama percontohan jamban sekolah dalam rangka peningkatan fasilitas sanitasi sekolah dan lingkungan dipusatkan di SD N Sepatan I Kabupaten Tangerang pada Rabu, 7 Mei 2008. Selain SD N Sepatan I, juga SD N Sepatan IV dan V, serta SD N Kedaung I dan III.

Kegiatan dalam rangka Seabad Kebangkitan Nasional dan Tahun Sanitasi Internasional 2008 ini digelar Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) melalui Program Indonesia Hijau dan Bersih bekerja sama dengan Departemen Pekerjaan Umum.

Wakil Bupati Tangerang H. Rano Karno mengungkapkan kebahagiaan namun juga rasa malu. "Daerah di sini termasuk daerah *bolbon, be'ol di kebon*," katanya yang diikuti tawa ratusan warga sekolah.

Namun, lanjut Bang Rano, panggilan akrab wakil bupati yang sekaligus aktor ini merasa yakin bila kita masih mempunyai rasa malu berarti masih mempunyai rasa tanggung jawab. "Setelah jamban sekolah kalian nanti berdiri, bapak tidak ingin mendengar anak laki-laki kencing



Ketua SIKIB Murniati Widodo AS didampingi Wakil Bupati Tangerang H. Rano Karno meletakkan batu pertama. Foto: Bowo Leksono.

di bawah pohon," tegasnya yang kembali terdengar riuh tawa penghuni sekolah.

Bang Rano yang mewakili Bupati Tangerang mengharapkan bantuan jamban sekolah bermanfaat bagi peningkatan pendidikan di lingkungan sekolah. Pihaknya akan berusaha meneruskan apa yang

sudah dilakukan pemerintah pusat pada daerahnya.

## Pancangan bagi Pemda

Rombongan dari pusat terdiri dari SIKIB dan Departemen PU. Tampak Ketua SIKIB Murniati Widodo AS, Lis Djoko Kirmanto, Erna Budi Yuwono, dan Erna Witoelar. Turut hadir Dirjen Cipta Karya Ir. Budi Yuwono.

Koordinator Program Indonesia Hijau dan Bersih SIKIB Erna Witoelar mengatakan memilih Sepatan karena daerah ini rawan soal kebersihan dan kerap terjadi wabah kolera dan demam berdarah. "Di sini kepedulian soal sanitasi kurang diperhatikan terutama di sekolah-sekolah," ujarnya.

Erna mengharapkan bantuan satu unit jamban senilai Rp 150 juta ini sebagai pancangan bagi pemerintah daerah untuk kemudian melanjutkan pembangunan jamban di sekolah-sekolah lainnya yang membutuhkan. "Selain itu yang lebih penting adalah jamban benar-benar dipakai dan dipelihara kebersihannya," tuturnya. ■ BW

## Jamban Sekolah yang Kotor dan Bau

Sinta yang masih duduk di bangku kelas II SD N Sepatan V, tersipu ketika ditanya dimana buang air besar saat di sekolah? Ia pun terpaksa pulang ke rumah yang jaraknya tak jauh dari sekolah.

Berbeda dengan Husni dan kedua temannya yang tampak akrab. Husni yang bersekolah di SD Sepatan I dan duduk di bangku kelas III dan teman-teman laki-lakinya ini akan lari ke belakang sekolah setiap kali hendak buang air besar.

"WC di sekolah kotor, bau, terus

airnya kadang juga tidak ada," ungkap Husni. Kondisi yang diungkapkan Husni inilah yang menyebabkan ia dan semua penghuni sekolah merasa tidak nyaman dalam membuang hajat.

Terakhir, kondisi di SD N Sepatan I, tidak ada jamban bagi siswa dan guru. Siswa buang air di belakang sekolah, sementara guru numpang di kantor PGRI. Sementara SD N Sepatan V yang memang satu kompleks dengan SD N Sepatan I, terdapat enam jamban namun tidak berfungsi karena mampet dan penuh. ■ BW



Para dokter kecil dari SDN Sepatan I Tangerang. Foto: Bowo Leksono

# Lokalatih Penyusunan Renstra AMPL di Kabupaten Barru



Foto: Dok/WASPOLA

Pentingnya sinergitas pengelolaan dan koordinasi sektor AMPL menjadi hal yang sangat mendesak dilakukan di Kabupaten Barru agar tujuan optimal pembangunan air minum dan kesehatan lingkungan (AMPL) yang berkelanjutan dapat tercapai. Hal ini terungkap dalam lokakarya dan pelatihan (lokalatih) penyusunan rencana strategis (Renstra) AMPL di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan selama 5 hari, 14-18 April 2008, di Pare-pare.

Lokalatih Renstra AMPL ini dibuka Kepala Bappeda Kamil R yang menyatakan kegiatan AMPL memerlukan keterlibatan multipihak dan perlu dipayungi perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi. "Renstra SKPD masih sektoral, untuk itu kita memerlukan Renstra program terutama AMPL," katanya.

Tujuan pelatihan membekali anggota Pokja AMPL Kabupaten Barru dengan metode penyusunan Renstra AMPL, kemampuan analisa masalah sektor AMPL dan sekaligus mampu menyusun Renstra AMPL.

Lokalatih yang dikembangkan dengan metode partisipatif, pendidikan orang dewasa dan dinamis ini difasilitasi WASPOLA, yaitu program yang berfokus pada pembangunan kebijakan dan refor-

masi sektor di Indonesia. Kegiatan lokalatih ini sendiri merupakan kerjasama Kelompok Kerja (Pokja) AMPL

melalui misi i) meningkatkan cakupan pelayanan AMPL, ii) meningkatkan peran serta masyarakat dan iii) membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk menentukan isu dan kebijakan strategis, peserta melakukan analisa mendalam terhadap kondisi internal dan eksternal pembangunan AMPL. Identifikasi dan analisa kekuatan dan kelemahan dilakukan untuk mengetahui kondisi internal, sedangkan kondisi eksternal diketahui dengan melakukan identifikasi dan analisa peluang dan tantangan.

Analisa ini dikenal sebagai analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*). Hasilnya, antara lain pada tabel berikut:

INTERNAL		EKSTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Jumlah SDM tersedia</li> <li>o Potensi sumber daya air tersedia</li> <li>o Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan program AMPL</li> <li>o Iklim kepemimpinan yang kondusif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Rendahnya kapasitas aparat fungsional dalam pengelolaan program AMPL yang berkelanjutan</li> <li>o Keterbatasan dana</li> <li>o Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur keberlanjutan AMPL Berbasis Masyarakat</li> <li>o Lemahnya koordinasi dalam pengelolaan program AMPL yang berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Adanya kebijakan Pemerintah Pusat tentang AMPL</li> <li>o Peluang kemitraan dengan swasta dan lembaga honor</li> <li>o Kebutuhan pemenuhan air minum yang semakin meningkat</li> <li>o Dukungan masyarakat terhadap program pembangunan AMPL yang berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya air</li> <li>o Kebijakan AMPL tidak jalan/tidak direspon</li> <li>o Sarana AMPL yang tidak berkelanjutan</li> <li>o Semakin besarnya kebutuhan investasi untuk pemenuhan layanan AMPL penduduk yang semakin meningkat.</li> <li>o Produktivitas layanan air minum semakin menurun.</li> </ul>

Kabupaten Barru, Pokja AMPL Pusat dan WES-Unicef.

Hasil diskusi peserta ketika melakukan identifikasi dan analisa permasalahan AMPL yaitu tidak sekedar sarana yang tidak berfungsi, tetapi juga tidak adanya koordinasi dengan baik. Hasil dari diskusi dipetakan menjadi tujuan pembangunan AMPL di Kabupaten Barru. Hasilnya rumusan visi misi.

Adapun visi yang ingin dituju, yaitu "terpenuhinya air minum dan lingkungan sehat yang berkelanjutan Kabupaten Barru 2015" yang akan diwujudkan

Dari hasil analisis SWOT, peserta mengembangkan isu strategi, kebijakan strategis dan program strategis. Empat program strategis yang disepakati dalam pelatihan ini dikembangkan lebih lanjut dalam kegiatan strategis. Kegiatan strategis ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan dalam SKPD terkait.

Untuk merumuskan dan finalisasi Renstra, disepakati dibentuk tim perumus yang dikoordinasi Bappeda. Anggotanya lintas sektor/instansi. Selain itu pada lokalatih ini dirumuskan keanggotaan dan struktur Pokja AMPL Kabupaten Barru. ■ DHS

## Pelatihan STBM bagi Calon Mahasiswa KKN UGM

Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bagi mahasiswa KKN UGM Yogyakarta dan *Waterplant Community* berlangsung pada 25-27 April 2008 di Ruang Sidang LPPM UGM.

Pelatihan ini merupakan kerjasama antara WASPOLA, Pokja AMPL Pusat dan *Waterplant Community* UGM. *Waterplant Community* merupakan komunitas yang memfokuskan bidang pengembangan *community development* dalam mendukung tercapainya *sustainable development* dalam lingkup penyediaan air bersih di wilayah perdesaan.

Materi pelatihan termasuk praktik lapangan langsung di desa. Kerjasama dengan universitas UGM merupakan kerjasama kedua dengan perguruan tinggi setelah Universitas Tirtayasa Banten.

Direncanakan akan dilaksanakan kerjasama pelatihan STBM antara Pokja AMPL Pusat dengan berbagai perguruan tinggi dalam rangka mempercepat implementasi STBM guna mencapai tujuan MDGs sanitasi 2015.

## Cross Learning Pokja Sumbar ke Pokja Banten

Disela kesibukan mempersiapkan perencanaan pembangunan daerah 2009, Pokja AMPL Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan pembelajaran (*cross learning*) ke Pokja AMPL Provinsi Banten pada 24-25 April 2008. Kunjungan bertujuan saling bertukar informasi tentang pelaksanaan program AMPL di kedua provinsi, terutama pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Dalam kesempatan itu dibahas strategi pengembangan STBM di Provinsi Banten dan implementasi di tingkat kabupaten. Di Banten, STBM pada tahap ekspansi melibatkan Pokja kabupaten, LSM, perguruan tinggi dan sekolah. Desain program disiapkan Pokja Banten,

sedangkan implementasinya dilakukan melalui SKPD terkait.

Untuk mendukung program ini, Pokja Banten telah bekerjasama dengan *Project Concern Indonesia* (PCI), Pokja AMPL Pusat, WASPOLA dan Universitas Tirtayasa. Kemajuan ini menjadikan Banten dijadikan mitra Pokja AMPL Nasional dalam pengembangan STBM. Saat ini Pokja AMPL Pusat membantu pendanaan pengembangan STBM di Provinsi Banten melalui skema pendanaan bersama pusat, provinsi dan kabupaten.



Kunjungan Pokja AMPL Sumatera Barat di Sekretariat Pokja AMPL Pusat.

Foto: Istimewa

Hingga saat ini telah dilakukan pelatihan untuk masyarakat dalam pengelolaan AMPL dan berbagai kelompok lainnya. Pelatihan ini akan terus berlanjut dan menjangkau kelompok sasaran yang lebih luas. Pelaksana lapangan dan desainnya sepenuhnya dikembangkan oleh Pokja AMPL Banten.

Untuk mempertahankan sekaligus mempercepat pelaksanaan STBM, Pokja AMPL Banten juga membidik anggota masyarakat dan lembaga yang bisa menjadi pelopor. Pelopor inilah yang akan dikader dan dibina terus-menerus sebagai agen perubahan perilaku sanitasi di tingkat masyarakat.

Pokja AMPL Banten secara aktif memproduksi leaflet, brosur dan piranti komunikasi lainnya untuk STBM. Beberapa sekolah menggunakan dana BOS untuk produksi leaflet yang sesuai untuk anak sekolah, sebagai sarana kampanye perubahan perilaku hidup bersih dan

sehat sejak dini, termasuk cuci tangan pakai sabun (CTPS).

Upaya lanjutan yang sedang digagas Pokja AMPL Banten adalah kerjasama dengan program Danamon Peduli, tetapi lebih difokuskan pada penanganan sampah perkotaan. Nantinya program ini juga akan dikembangkan dengan pola-pola partisipasi dan pemecuan STBM.

## Kunjungan Lapangan

Setelah pertemuan, dilakukan kunjungan ke Desa Taktakan, Kecamatan Taktakan kurang lebih 30 menit dari ibukota provinsi, untuk melihat hasil penerapan STBM. Di lokasi ini Pokja Sumbar disambut Camat Taktakan dan berdialog dengan masyarakat. Hingga saat ini kepemilikan dan akses jamban di Taktakan telah meningkat sejak dilakukan pemecuan oleh Universitas Tirtayasa, yang saat itu hanya 20 persen.

Masyarakat juga telah menyusun program kerja untuk mempersiapkan STBM dan bebas dari buang air. Untuk percepatan BAB ini bekerjasama dengan Puskesmas yang bersedia menyediakan anggaran untuk fasilitator bidan desa dan tenaga sanitarian.

Inovasi Pokja Banten mendapat perhatian Pokja Sumbar. Strategi Banten akan diadopsi dan diimplementasikan dalam program kerja Pokja Sumbar tahun depan. Pada 2009, Pokja Sumbar rencananya mengembangkan STBM di 10 kabupaten.

## Kunjungan ke Pokja AMPL Nasional

Pada kunjungan kerja ini, Pokja Sumbar mengagendakan pertemuan dengan Pokja AMPL Nasional dan WASPOLA. Pertemuan itu mendiskusikan perkembangan program AMPL Provinsi Sumbar, strategi pelaksanaan program 2009, dukungan Pokja AMPL Nasional ke daerah dan keberlanjutan dukungan WASPOLA di Sumatera Barat.

Secara khusus pertemuan ini membahas tindak lanjut kegiatan WSLIC di Sumatera Barat pascaproyek. Dalam waktu dekat, Provinsi Sumatera Barat akan melakukan lokakarya untuk membahas rencana aksi provinsi dan daerah lokasi WSLIC. ■ dhs/pur/syaf

# SToPS

## Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi

**S**anitasi Total dan Pemasaran Sanitasi (SToPS) atau *Total Sanitation and Sanitation Marketing* (TSSM) merupakan program pertama di Indonesia yang menerjemahkan dalam skala luas strategi baru Pemerintah Indonesia mengenai sanitasi berbasis masyarakat.

Program SToPS adalah sebuah program kemitraan antara Pemerintah Indonesia, *Water and Sanitation Program* (WSP), dan *Bill and Melinda Gates Foundation*. Dana sejumlah US 1,9 juta dolar dari *Bill and Melinda Gates Foundation* digunakan untuk mengembangkan pendekatan tersebut secara komprehensif.

Belajar dari pengalaman CLTS maupun pemasaran sanitasi, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melaksanakan program SToPS di seluruh kabupaten yang berjumlah 29 kabupaten di Provinsi Jawa Timur pada periode 2007-2009. Ini dilakukan sebagai upaya peningkatan akses pada sanitasi yang aman dan sehat serta perilaku higienis secara cepat dan berkelanjutan.

Apa yang dapat dilakukan kabupaten untuk mendapatkan manfaat dari Program SToPS?

- Kabupaten dapat menelaraskan program-program sanitasi yang sudah ada dengan pendekatan Program SToPS.
- Meniadakan dana subsidi pembangunan jamban keluarga dan mengalihkannya menjadi program alternatif seperti untuk menyediakan *reward*/penghargaan bagi masyarakat atas pencapaian perubahan perilaku kolektif, melaksanakan kompetisi antardesa dan kecamatan dalam pencapaian status bebas dari BAB sembarangan, pengembangan pasar sanitasi lokal, dan melakukan promosi perilaku higienis, penciptaan *demand*, dan seterusnya.
- Mengadopsi dan mengembangkan pendekatan SToPS pada wilayah yang lebih luas, mengingat program ini hanya dilaksanakan pada wilayah dan waktu yang terbatas.
- Membentuk tim kerja kabupaten.

### Keuntungan bagi kabupaten yang berpartisipasi dalam program SToPS

Kabupaten yang berpartisipasi dalam Program SToPS akan mendapatkan bantuan teknis untuk:

- Penguatan komitmen politik untuk upaya perluasan (*scale up*), di kalangan pimpinan dan tokoh daerah seperti bupati, DPRD/politisi/parpol, pimpinan ormas, tokoh LSM, camat, media lokal, dan sebagainya.
- Pengembangan kapasitas institusi dan dukungan imple-



Sebuah kakus di samping rumah yang berada di atas kolam ikan.  
Foto: Bowo Leksono

mentasi bagi Pemda (Dinkes, Bappeda, dan lembaga mitra terkait) untuk mengelola penciptaan kebutuhan (*demand*), peningkatan penawaran (*supply*), dan pemantauan kemajuan implementasi pelaksanaan dan hasil yang dicapai.

### Apa yang ingin dicapai Program SToPS di Indonesia?

Diharapkan pada tahun 2009 (akhir masa program), Program SToPS akan:

- Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses pada fasilitas sanitasi yang aman dan higienis setidaknya sebanyak 1,4 juta jiwa di Jawa Timur.
- Mendapatkan pembelajaran mengenai penerapan pendekatan secara berkelanjutan dalam skala yang lebih luas di Indonesia, dalam upaya mencapai target MDG bagi sanitasi perdesaan sebelum atau pada tahun 2015.
- Mengembangkan kontribusi pembelajaran bagi pemahaman global yang akan memungkinkan replikasi pendekatan ini di 5-15 negara lainnya, serta akan menuntun pada peningkatan akses sanitasi yang aman dan higienis bagi lebih dari 250 juta jiwa pada tahun 2015. ■ BW

Pertanyaan dapat disampaikan melalui redaksi Majalah *Percik*  
Kontributor: Sandhi Eko Bramono (Sandhiebh@yahoo.com), Lina Damayanti (Ldamayanti@yahoo.com)

## Reaktor Gas Metan

Saya mencoba mengolah limbah dari industri makanan (berupa sisa makanan) dalam reaktor anaerobik untuk menghasilkan gas metan, yang sudah saya manfaatkan untuk memproduksi listrik untuk keperluan internal instalasi tersebut. Produksi gas yang dihasilkan sangat tinggi pada awalnya, namun setelah berjalan sekitar setahun, produksi gasnya cenderung menurun. Saat sampah selesai diolah dalam reaktor (sekitar 20 hari), ternyata terjadi perubahan warna dari sampah makanan yang umumnya berwarna kehitaman di dalam reaktor dan saat ini menjadi sedikit keabu-abuan. Sebagai informasi, untuk mengatur pH, saya menggunakan *natrium bikarbonat*. Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kembali kinerja reaktor saya? Apakah kadar *natrium bikarbonat* yang saya berikan terlalu berlebih?

(Sukamto, Jakarta)

### Jawab

Penggunaan senyawa *natrium bikarbonat* untuk mengatur pH umumnya dilakukan pada instalasi berkapasitas besar, untuk mengatur pH pada pH optimum proses anaerobik, yaitu 7,0-7,2.

Sangat memungkinkan telah terjadi akumulasi senyawa natrium dalam reaktor, karena *natrium karbonat* dalam jumlah yang sangat banyak dalam reaktor. Kadar *natrium* di atas 3,5-5,5 gram/liter dapat dikatakan toksik untuk mikroorganisme penghasil metan (*methanogen bacteria*). Warna dari sampah makanan dalam reaktor yang telah berubah menjadi abu-abu, menandakan reaksi proses *anaerob* yang tidak berjalan sempurna.

Warna ini diakibatkan karena kegagalan proses reduksi senyawa sulfat men-

jadi sulfur, yang seharusnya menjadi ciri proses anaerobik, dimana limbah akan menjadi berwarna kehitaman. Hal ini pulalah yang menandakan turunnya produksi metan.

Untuk mengatasi hal tersebut, ada baiknya mencampur basa kuat sebagai ne-



Kolam Pengelolaan Air Limbah (PD PAL Jaya) di daerah Setiabudi, Jakarta. Foto: Bowo Leksono

tralisasi (seperti *natrium hidroksida*), yang dicampur dengan *natrium bikarbonat*. Hal ini akan mengurangi akumulasi senyawa natrium, karena kebutuhan *natrium hidroksida* yang dibutuhkan lebih kecil ketimbang *natrium bikarbonat*.

Untuk mengembalikan kinerja reaktor Anda, disarankan untuk menguras sekitar setengah volume dari sampah yang terdapat dalam reaktor, kemudian dilakukan kembali stabilisasi sistem dan pengatur pH diubah dari *natrium bikarbonat* menjadi *natrium hidroksida*, dengan sedikit tambahan *natrium bikarbonat*.

## Instalasi Pengolahan Air

Dalam Instalasi Pengolahan Air (IPA), bagaimana memodifikasi unit proses atau unit operasi untuk menyisihkan senyawa merkuri (Hg)?

(Tatang, Bandung)

### Jawab

Penyisihan merkuri umumnya dilakukan dengan menggunakan proses adsorpsi. Penggunaan karbon aktif dapat mengurangi kadar merkuri hingga di atas 90 persen. Unit adsorpsi dapat diletakkan pada bagian akhir unit operasi setelah proses filtrasi, dengan menggunakan *Granular Activated Carbon (GAC)*.

Dalam beberapa IPA, terkadang penggunaan GAC dijadikan satu dalam unit saringan pasir cepat. Hal ini akan menghemat luas lahan yang dibutuhkan. Namun akan terdapat kesulitan dalam melakukan regenerasi GAC, karena GAC tidak dapat dibersihkan dengan pencucian saringan filter biasa, karena mekanismenya bukan penyaringan (*straining*) seperti pada media pasir, melainkan mekanisme adsorpsi, dimana dibutuhkan regenerasi secara khusus dan terpisah.

Modifikasi proses koagulasi dengan menggunakan bahan koagulan dalam jumlah yang berlebih (*enhanced coagulation*) dapat menyisihkan merkuri, meskipun kinerjanya tidak akan setinggi pada proses adsorpsi. Penggunaan koagulan dalam jumlah berlebih (bisa mencapai 120 mg/l, dimana koagulasi umumnya membutuhkan hanya sekitar 40-50 mg/l saja) akan menggumpalkan partikel beserta merkuri dalam proses koagulasi yang saling memperkuat, dan akhirnya akan mengikat merkuri bersama flok, menjadi flok yang lebih padat, akhirnya terendapkan pada unit sedimentasi. Mikroflokk yang mengandung merkuri yang tidak terendapkan pada unit sedimentasi, akan terbawa dan tersaring pada unit saringan pasir cepat. ■

\* pengasuh adalah mahasiswa program doktoral di Division of Environmental Science and Engineering, National University of Singapore (NUS), Singapura.

Kontak pengasuh: sandhiebh@yahoo.com

## Film Dokumenter MDGs

Mendekati separuh jalan menuju batas pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) pada 2015, kinerja pencapaian Indonesia masih kurang mengembirakan, bahkan cenderung menurun. Sangat jelas bahwa tantangan Indonesia untuk mencapai target 10 pada tujuan nomor 7 yaitu mengurangi separuh, pada tahun 2015, dari proporsi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi dasar, merupakan tugas yang sangat berat.

Salah satu kendala utama adalah masih kurangnya pemahaman dari pengambil keputusan khususnya di kalangan pemerintah daerah tentang MDGs. Untuk itu dipandang perlu menjelaskan MDGs dalam bentuk film dokumenter yang diberi judul "Menuju Indonesia 2015". Isinya terutama sengaja dikemas secara

singkat dan mudah dipahami. Selain itu, sebagai alat bantu, film dokumenter ini dilengkapi dengan buklet sebagai penjelasan tertulis.

Film yang merupakan hasil kerjasama BAPPENAS dengan Plan Indonesia ini merupakan bagian dari upaya menyebarluaskan informasi mengenai MDGs. Film ini memfokuskan pada realita pencapaian tujuan ketujuh MDGs khususnya pada pencapaian akses air minum dan sanitasi dasar.

Dalam film berdurasi 20 menit ini dilengkapi data berupa tabel-tabel pencapaian setiap tujuan yang berjumlah delapan. Disamping itu dilengkapi pidato Mantan Duta MDGs untuk Asia Pasifik Erna Witoelar serta wawancara dengan Bupati Boalemo Iwan Bokings menanggapi soal MDGs. Film ini tersedia di perpustakaan Pokja AMPL, Jalan Cianjur

Nomor 4 Menteng, Jakarta Pusat. ■ BW



## Film Dokumenter "Sang Pawang Air"

"Sang Pawang Air", film dokumenter dari Purbalingga, Jawa Tengah ini menampilkan satu solusi menarik akan permasalahan air di masyarakat. Inisiasi masyarakat dalam mengatasi persoalannya secara kolektif merupakan gambaran menarik di dalam film berdurasi 18 menit ini.

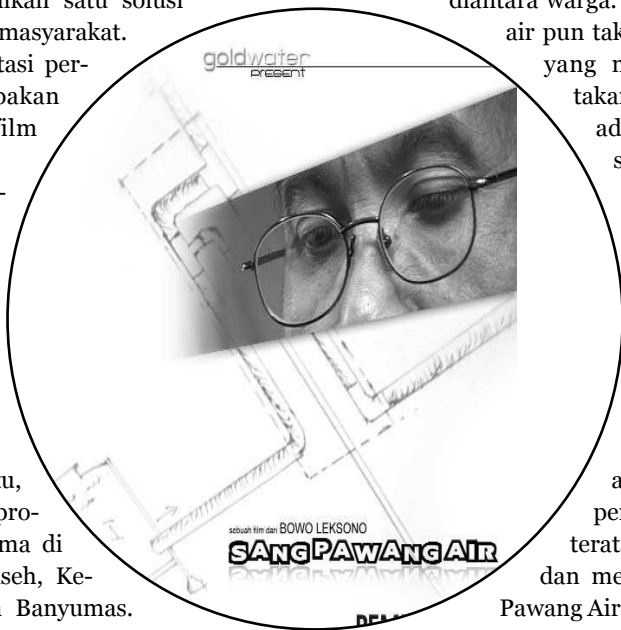
Secara teknis, demikian menurut penilaian dewan juri, film besutan sutradara Bowo Leksono ini pun tampil dengan baik yang kemudian mengantarkan sebagai pemenang kedua pada Kompetisi Film Dokumenter 2008 bertema "Manusia dan Air" yang diselenggarakan FORKAMI.

Mujamil, Sang Pawang Air itu, bukanlah seorang insinyur apalagi profesor. Ia hanya seorang guru agama di sebuah SD dan SMP di Desa Baseh, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Namun, kepedulian pada masyarakat mampu mendorongnya menciptakan alat pembagi air bersih.

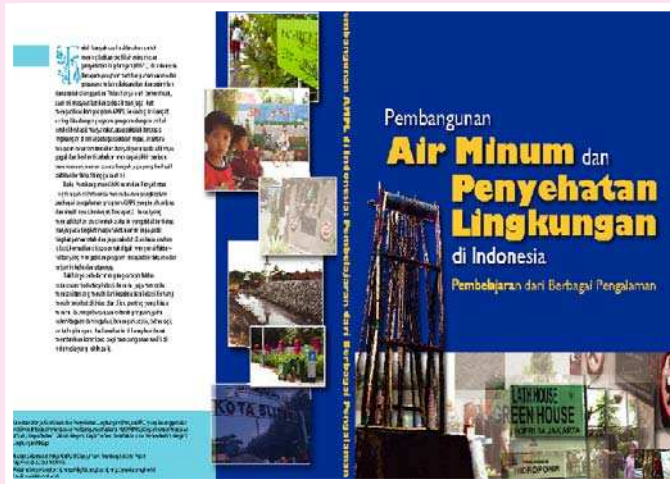
Awalnya, di Desa Baseh, kerap terjadi perebutan air bersih diantara warga. Adanya bak penampung dan saluran air pun tak luput dari perusakan warga. Hal ini yang melatarbelakangi Mujamil menciptakan alat pembagi air agar terjadi keadilan diantara warga dalam mengonsumsi air bersih.

Penciptaan alat yang sempat ditinggalkan Pemkab setempat ini berdasarkan teknik bejana berhubungan. Menjadi tidak penting legalitas pemerintah karena saat itu yang sangat mendesak adalah kebutuhan warga akan air bersih yang tidak bisa ditunda lagi.

Setelah berdirinya alat pembagi air ini, tidak hanya persoalan pemenuhan kebutuhan air bersih yang teratasi namun juga pembagian yang adil dan merata. Pantas Mujamil dijuluki 'Sang Pawang Air'. DVD film dokumenter ini tersedia di Perpustakaan Pokja AMPL. ■ BW



# Gambaran Pembangunan AMPL di Indonesia



Buku ini mengupas tentang pembelajaran (*lessons learned*) dan praktik terbaik (*best practice*) berkaitan dengan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) di Indonesia. Memang, telah banyak buku sejenis yang telah diterbitkan. Namun, buku setebal 163 halaman ini sedikit berbeda. Dimana letak perbedaannya?

Perbedaan terletak pada kerangka dan proses pendokumen-

tasian praktik-praktik pembangunan AMPL sebagai suatu pengalaman. Pemilihan lokasi dan kegiatan tidak dilakukan dengan kriteria ketat tapi lebih pada hasil penjarangan 'dari mulut ke mulut', yang kemudian ditindaklanjuti kunjungan lapangan.

Kerangka buku yang edisi pertamanya terbit pada April 2008 ini terdiri dari tiga bagian dan terbagi menjadi delapan bab. Pada bagian pertama; memotret sekilas gambaran kondisi AMPL di Indonesia, bagian kedua; menguak pembelajaran pembangunan AMPL dengan fokus benang merah pembelajaran yang bisa ditarik dari hasil kunjungan lapangan yang kemudian ditulis lengkap pada bagian lampiran.

Pada bagian penutup; yang merupakan rangkuman keseluruhan pembelajaran secara lengkap. Sementara pada bagian lampiran; disajikan laporan kunjungan lapangan dari masing-masing lokasi dilengkapi daftar narasumber berikut alamatnya.

Buku yang tersedia di perpustakaan Pokja AMPL, Jl. Cianjur No. 4, Menteng, Jakarta Pusat ini merupakan bagian dari kerjasama Bappenas dan Plan Indonesia. Salah satu tujuan utama dari kerjasama tersebut adalah pengembangan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) dan pusat informasi (*resource centre*) AMPL. Setidaknya dengan adanya buku ini menambah referensi dalam bidang AMPL. ■ BW

## Buklet MDGs

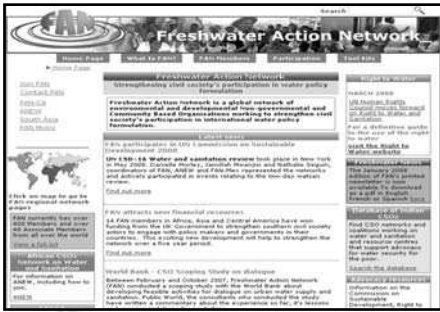


Buklet sederhana *Millennium Development Goals* (MDGs) ini dibuat untuk memberi penjelasan tertulis terhadap film dokumenter MDGs yang diterbitkan atas kerjasama BAPPENAS dengan Plan Indonesia. Berisi tentang delapan Tujuan MDGs dengan 18 target dan 40 indikator. Tujuan MDGs ini sedianya tercapai pada tahun 2015.

MDGs atau Tujuan Pembangunan Milenium merupakan target kuantitatif dan terjadwal dalam upaya penanggulangan kemiskinan global serta dimensi kemiskinan lainnya seperti kelaparan, penyakit, penyediaan infrastruktur dasar (perumahan dan permukiman) serta mempromosikan persamaan gender, pendidikan, dan lingkungan berkelanjutan. MDGs juga merupakan upaya pemenuhan hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Deklarasi Milenium PBB.

Adapun kedelapan Tujuan MDGs yaitu; memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV dan AIDS, malaria, serta penyakit lainnya, memastikan kelestarian lingkungan, serta mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Penjelasan dalam buklet ini, difokuskan pada tujuan ketujuh, yaitu memastikan kelestarian lingkungan yang didalamnya terdapat target untuk menurunkan separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses yang berkelanjutan terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar pada 2015. ■ BW



**FRESHWATER ACTION NETWORK (FAN)**

<http://freshwateraction.net>

*Freshwater Action Network (FAN)* adalah sebuah situs *networking* yang di-sahkan melalui Forum Air Minum Sedunia, Maret 2000. Tujuan utama situs ini untuk memastikan agar seluruh organisasi kemasyarakatan atau LSM yang bergerak di bidang air minum dan sanitasi dapat menyuarakan aspirasinya, khususnya pada forum-forum penentu kebijakan masalah air minum dan sanitasi di tingkat internasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka melalui situs ini, FAN mengundang seluruh LSM yang bergerak pada bidang air minum dan sanitasi untuk menjadi anggota aktif. Manfaat yang diperoleh adalah FAN akan memberikan informasi terkini dalam bentuk buletin dan *newsletter* mengenai kebijakan air minum dan sanitasi. Selain itu FAN juga bisa memberikan pelatihan dan advokasi bagi para anggotanya.

Keanggotaan FAN bersifat terbuka bagi LSM manapun yang peduli pada masalah air minum dan sanitasi. Saat ini FAN telah memiliki anggota sebanyak 400 yang berasal dari seluruh belahan dunia, termasuk beberapa LSM asal Indonesia.

**RWSN (RURAL WATER SANITATION NETWORKING)**

<http://www.rwsn.ch/>

RWSN (*Rural Water Sanitation Networking*) adalah situs global yang berisikan informasi mengenai praktik penyediaan air bersih di perdesaan.

Situs yang berdiri sejak tahun 1992 ini diawali dengan adanya kebutuhan me-

ngenai adanya media yang berfungsi sebagai tempat untuk *sharing* informasi dan pengalaman mengenai penyediaan air bersih di perdesaan. Itu sebabnya, keanggotaannya berasal dari multidisiplin seperti instansi pemerintah, organisasi multilateral, badan donor, LSM hingga perusahaan swasta.

Pertukaran informasi di kalangan pemangku kepentingan adalah vital dalam melakukan sinergi sebagai upaya pencapaian target MDG. Sejak awal pendiriannya, RWSN sudah menetapkan agenda pentingnya yaitu penyediaan air bersih dan sanitasi bagi penduduk miskin melalui teknologi tepat guna yang berkelanjutan yang mampu menjawab kebutuhan dan terjangkau bagi masyarakat kelas bawah.



Hingga kini telah tercatat ada sebanyak 500 individu dan institusi yang telah menjadi anggota diantaranya WSP, UNICEF, *WaterAid*, Departemen Air dan Kehutanan Afrika Selatan, IRC (Belanda) dan lainnya. RWSN saat ini memiliki beberapa *tool* sebagai media pertukaran pengetahuan dan informasinya yaitu *newsletter*, situs interaktif, diskusi elektronik (*e-conference*), pertemuan, pelatihan dan kunjungan langsung ke lapangan. Hingga tahun 1992-2005 kegiatan penyediaan air bersih bagi penduduk miskin telah dilakukan di berbagai negara seperti India, Pakistan, Afrika Selatan dan beberapa negara lainnya.

**KELUARGA SEHAT**

<http://keluargasehat.com>

Situs Keluarga Sehat adalah situs yang menyediakan informasi terkini berkenaan dengan kesehatan dan gizi. Berbagai



artikel singkat mengenai berbagai macam masalah kesehatan dan penyakit dapat menambah pengetahuan.

Terdapat rubrik "Air dan Kita" yang menyuguhkan beragam informasi dan artikel berkenaan dengan air bersih untuk kebutuhan kita. Selain itu, informasi berkenaan dengan lingkungan melengkapi situs ini.

**DIMSUM**

<http://dimsum.its.ac.id>

Dimsum adalah suatu lembaga riset dalam sistem air bersih dan sanitasi di daerah bantaran sungai. Wilayah kerja lembaga ini adalah negara-negara berkembang seperti Nepal, Malaysia, India, dan Indonesia. Di Indonesia, Dimsum bekerjasama dengan Institut Teknologi Surabaya (ITS) dengan wilayah kerja di bantaran Sungai Brantas.

Dimsum Indonesia memiliki situs sendiri yang juga menyambungkan dengan situs Dimsum Internasional dan situs-situs lain terkait bidang air minum dan penyehatan lingkungan. Berbagai informasi seputar program air minum dan penyehatan lingkungan sedikit banyak dapat diakses di situs ini. ■ WL/BW



## PETUNJUK

### BIKIN PUPUK YUK...

Penerbit: Klub Pengembangan Diri SMA Semen Gresik,  
Juni 2007

### DRAFT RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN AMPL-BM KABUPATEN CILACAP 2008-2012

Penerbit: Pemerintah Kabupaten Cilacap, 2007

## PERATURAN

### PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 21/PRT/M/2006

TENTANG KEBIJAKAN DAN  
STRATEGI NASIONAL  
PENGEMBANGAN SISTEM  
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 26  
TAHUN 2007 TENTANG  
PENATAAN RUANG

PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR 48 TAHUN 2006  
TENTANG RENCANA  
STRATEGIS PEMBANGUNAN  
DAN PENGELOLAAN AMPL-BM  
TAHUN 2005-2015

## B U K U

ROMANTIKA TUKANG LEDENG  
Penerbit: Majalah Air Minum  
Perpamsi, Jakarta, 2005

SUMBER DAYA AIR DAN  
LINGKUNGAN: POTENSI,  
DEGRADASI, DAN MASA DEPAN  
Penerbit: LIPI Press,  
Jakarta, 2007

PENGELOLAAN DAS DARI  
WACANA AKADEMIS HINGGA

PRAKTIK LAPANGAN

Penerbit: LIPI Press,  
Jakarta, 2007

### KEGIATAN AIR BERSIH DAN SANITASI UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (WSLIC-2)

Penerbit: Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan  
Lingkungan, Depkes, 2005

### KIAT KERJA SANITASI DI KAWASAN KUMUH: PETIKAN HASIL STUDI SANITASI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI PERKOTAAN

Penerbit: Bappenas - Depdagri - Depkes - Dep.PU - Dep.  
Perindustrian - KLH - WSP- EAP, Jakarta, November 2007

### PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TERPADU

Penerbit: Yayasan Kemitraan Air Indonesia  
(KAI), Jakarta, Oktober 2007

### PENGALAMAN MEMBANGUN SARANA AIR BERSIH: CASE STUDY PRO AIR DI DESA PRAIBAKUL DAN TARAMANU SUMBA BARAT

Penerbit: NTT, Mitra  
Samya - Pro Air GTZ  
Sumba Barat NTT,  
Juni 2007

## MAJALAH PERCIK

Edisi 20, Oktober 2007  
(Versi Inggris)

### PERCIK

Edisi 22, Maret 2008

### Newsletter WSLIC-2

Edisi 11, 2007

### Newsletter WSLIC-2

Edisi 12, 2007

### Newsletter AMPL

Edisi Maret, 2008

### Newsletter AMPL

Edisi April, 2008

### Tekno Limbah

Edisi 7, 2008

### Greeners

Edisi 02, Februari 2008

### ESP News

Edisi 25, Februari 2008

### Kiprah

Edisi 26, Maret 2008

### Air Minum

Edisi 151, April 2008

## C D

### WATER PLANT COMMUNITY: WATER FOR PEOPLE

Penerbit: LPPM UGM-Departemen PU, Yogyakarta, 2008

### INTERNATIONAL WORKSHOP ON CONSULTATIONS AND STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE WATER AND SANITATION SECTOR

Penerbit: Water and Sanitation Program (WSP)-PPIAF, 2008



# ■ AGENDA ■

## NO. WAKTU

## K E G I A T A N

1	3 April 2008	Pertemuan Koordinasi Komite Pengarah dan Pelaksana Harian, diselenggarakan di Jakarta oleh Jejaring AMPL
2	7 April 2008	Lokakarya "Melindungi Kesehatan dari Dampak Perubahan Iklim", diselenggarakan di Jakarta oleh Departemen Kesehatan
3	7 April 2008	Sosialisasi Kebijakan AMPL-BM dan Program WES Kabupaten Belu, diselenggarakan di Atambua oleh Pemerintah Kabupaten Belu dan UNICEF
4	8 April 2008	<i>Wrap-up Meeting Proyek WSLIC-2</i> , diselenggarakan di Jakarta oleh Departemen Kesehatan
5	10-11 April 2008	Lokakarya "Masa depan Pembangunan Sektor Air Minum dan Antisipasi Ketahanannya Terhadap Dampak Perubahan Iklim Global", diselenggarakan di Jakarta oleh PERPAMSI
6	11 April 2008	Seminar Fakultas Teknik Sipil & Lingkungan ITB & <i>Stakeholders</i> "Menuju Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia", diselenggarakan di Bandung atas kerjasama ITB dengan Departemen Pekerjaan Umum
7	12 April 2008	Pencanangan Gerakan Cuci Tangan Pakai Sabun dan Sanimas dalam Peringatan Hari Air Dunia 2008, diselenggarakan di Kota Tangerang, Banten oleh Departemen Pekerjaan Umum
8	14-19 April 2008	Lokalah Penyusunan Renstra AMPL-BM Kabupaten Barru, diselenggarakan di Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Kabupaten Barru dan UNICEF
9	17 April 2008	Lokakarya Pengelolaan Aset/ <i>National Asset Management Program Assessment (NAMPA)</i> , diselenggarakan di Jakarta oleh WASPOLA dan Pokja AMPL
10	18-20 April 2008	<i>Jakarta Go Green Festival</i> , diselenggarakan di Parkir Timur Senayan oleh <i>Green Initiative Forum (GIF)</i>
11	21-26 April 2008	Lokalah Penyusunan Renstra AMPL-BM Kabupaten Luwu Utara, diselenggarakan di Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan UNICEF
12	21-23 April 2008	Kunjungan Lapangan Delegasi Republik Demokratik Timor Leste ke Muara Enim dan Sepatan
13	24 April 2008	Pertemuan dan Diskusi AMPL dengan Delegasi Republik Demokratik Timor Leste, diselenggarakan di Jakarta oleh BAPPENAS
14	24 April 2008	Seminar <i>Sustainable Cities Challenges for Indonesian and Sweden</i> , diselenggarakan di Jakarta oleh Kedutaan Besar Swedia dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup
15	27-30 April 2008	Lokakarya <i>Review Pembelajaran Program Total Sanitation and Sanitation Marketing (TSSM)</i> , diselenggarakan di Surabaya atas kerjasama Pemerintah Indonesia dengan WSP-EAP Bank Dunia dan <i>Bill and Melinda Gates Foundation</i>
16	5-9 Mei 2008	Lokalah Penyusunan Renstra AMPL-BM Provinsi Papua Barat, diselenggarakan di Sorong oleh Pokja AMPL Provinsi Papua Barat dan UNICEF
17	6-9 Mei 2008	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) diselenggarakan di Jakarta oleh BAPPENAS
18	9 Mei 2008	Diskusi UU Persampahan: Prioritisasi Peraturan Pemerintah, diselenggarakan di Jakarta oleh Gugus Tugas Pengelolaan Sampah
19	13 Mei 2008	Lokakarya <i>Kick Off ISSDP 2</i> , diselenggarakan di Jakarta oleh BAPPENAS
20	13-16 Mei 2008	Lokalah Penyusunan Renstra AMPL-BM di Provinsi NTT, diselenggarakan oleh UNICEF
21	15 Mei 2008	<i>Roadshow</i> Pokja AMPL dalam Rangka Sosialisasi Kebijakan Nasional AMPL-BM, diselenggarakan di Kota Serang oleh Pemerintah Kota Serang
22	15 Mei 2008	Forum Diskusi Forkami "Perlunya Konservasi Air Tanah untuk Mengurangi Penurunan Volume Air Tanah", diselenggarakan di Jakarta oleh Forkami
23	16 Mei 2008	Acara Puncak Hari Air Dunia XVI tahun 2008, diselenggarakan di Jakarta oleh Departemen Pekerjaan Umum
24	19-23 Mei 2008	Lokalah Penyusunan Renstra AMPL-BM di Provinsi Maluku, diselenggarakan di Ambon oleh UNICEF
25	5-19 Mei 2008	Lokalah Penyusunan Renstra AMPL-BM di Provinsi Papua Barat, diselenggarakan di Sorong oleh UNICEF
26	21 Mei 2008	Lokakarya Pencapaian <i>Millenium Development Goals</i> , diselenggarakan di Jakarta oleh BAPPENAS
27	22-23 Mei 2008	Rakor Program AMPL dan Pencanangan Tahun Sanitasi Provinsi NTB, diselenggarakan di Lombok, Mataram, oleh Pokja AMPL Propinsi NTB
28	26-27 Mei 2008	Lokakarya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Peluncuran Gugus Tugas Kesehatan dan Higienitas, diselenggarakan di Puncak, Bogor, atas kerjasama Jejaring AMPL dan Departemen Kesehatan
29	27-30 Mei 2008	Lokalah Program Air Bersih, Sanitasi dan <i>Higienitas</i> , diselenggarakan di Ambon oleh UNICEF
30	27 Mei 2008	Rapat TIM Kota dan Evaluasi Kegiatan Proyek HP3/Lestari - <i>Mercy Corps</i> , diselenggarakan di Jakarta oleh <i>Mercy Corps</i>
31	28 Mei 2008	Pembahasan <i>Study on Economic Impacts of Sanitation</i> , diselenggarakan di Jakarta oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi
32	29 Mei 2008	Peluncuran Tahun Sanitasi Internasional Provinsi Jawa Tengah, diselenggarakan di Kabupaten Kendal oleh Pokja AMPL Provinsi Jawa Tengah
33	2 Juni 2008	Pertemuan <i>Mid Term Review (MTR)</i> Program WES-UNICEF, diselenggarakan di Jakarta oleh Pokja AMPL Pusat
34	5-8 Juni 2008	Pekan Lingkungan Indonesia, diselenggarakan di Jakarta oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup
35	7 Juni 2008	Lokakarya Pengelolaan Sampah Sesuai UU No. 18 tahun 2008, diselenggarakan di Jakarta oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup
36	9-12 Juni 2008	Sosialisasi Manual Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, diselenggarakan di Bandung oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri
37	12 Juni 2008	Diskusi Panel Media dan Kampanye Penyehatan Lingkungan, diselenggarakan di Jakarta oleh Jejaring AMPL

# KURANGI CO<sub>2</sub>

dengan

# UBAH POLA HIDUP



Iklan Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (POKJA AMPL) dalam memeriahkan Hari Lingkungan 2008 dan Hari Bumi 2008